

ANALISIS KERANGKA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2023



PUSDALISBANG

Pusat Data dan Analisis Pembangunan

ANALISIS KERANGKA PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2023



PUSDALISBANG

Pusat Data dan Analisis Pembangunan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Patut kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Penyertaan-Nya sehingga Laporan Analisis Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan Serial Tahunan Pusat Data Dan Analisis Kerangka Pembangunan Daerah Provinsi Papua sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas yang berkesinambungan terhadap capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Papua. Selain menyajikan analisis statistik secara historis mengenai hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah Provinsi Papua, laporan ini juga memuat tantangan dan gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah dimasa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan penyusunan rencana kerja tahunan daerah Provinsi Papua.

Tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yaitu seluruh OPD lingkup Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua, serta Tim Tenaga Ahli, yang telah banyak memberi dukungan dan masukan terkait dengan data dan informasi untuk analisis kerangka pembangunan daerah Provinsi Papua yang diperlukan. Untuk itu diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersebut.

Walaupun laporan ini telah disiapkan dengan sebaik-baiknya namun sangat disadari masih terdapat kekurangan didalamnya, sehingga kontribusi pemikiran yang edukatif dan konstruktif untuk perbaikan kedepan sangat diharapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan dampak positif terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Jayapura, 12 Desember 2023
Kepala Bappeda Provinsi Papua,



YOHANES WANLO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19700728 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD & TUJUAN.....	2
1.3. SASARAN	2
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	2

BAB II METODE KAJIAN..... 1

2.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN	1
2.1.1 Ruang Lingkup Wilayah Pelaksanaan Kegiatan.....	1
2.1.2 Ruang Lingkup Obyek Kegiatan	1
2.1.3 Ruang Lingkup Tahapan Kegiatan.....	1
2.2. JENIS DAN SUMBER DATA	1
2.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	1
2.4. METODE ANALISIS	2

BAB III GAMBARAN UMUM..... 1

3.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI.....	1
3.1.1. Aspek Geografi	1
3.1.1.1. Letak Geografis dan Administrasi	1
3.1.1.2. Topografi	3
3.1.1.3. Jenis Tanah	5
3.1.1.4. Stratigrafi	6
3.1.1.5. Tektonik	6
3.1.1.6. Hidrologi	7
3.1.1.7. Klimatologi.....	9
3.1.1.8. Tutupan Lahan.....	10
3.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana.....	11
3.1.1.10. Potensi Pengembangan Wilayah	16
3.1.2. Aspek Demografi	17
3.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (AKM)	17
3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	17
3.2.2. Struktur Ekonomi.....	18
3.2.3. Indeks Gini	20
3.2.4. Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal	20
3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia	22
3.2.6. Angka Harapan Hidup.....	24
3.2.7. Harapan Lama Sekolah	25
3.2.8. Rata-rata Lama Sekolah.....	26
3.2.9. Prevalensi Stunting.....	27

3.3. ASPEK PELAYANAN UMUM (APU)	27
3.3.1. Pendidikan	27
3.3.1.1. Angka Partisipasi Kasar	27
3.3.1.2. Angka Partisipasi Murni	28
3.3.1.3. Angka Partisipasi Sekolah	28
3.3.1.4. Angka Putus Sekolah	28
3.3.1.5. Angka Mengulang	28
3.3.1.6. Angka Kelulusan	29
3.3.1.7. Perkembangan Guru dan Murid	29
3.3.1.8. Fasilitas Pendidikan	30
3.3.2. Kesehatan	30
3.3.2.1. Angka Kematian Bayi	30
3.3.2.2. Angka Kematian Ibu	30
3.3.2.3. Fasilitas dan Layanan Kesehatan	31
3.3.2.4. Asupan Kalori dan Protein	31
3.3.2.5. Perkembangan Penanganan Penyakit Malaria	32
3.3.2.6. Perkembangan Penanganan Penyakit HIV/ AIDS	33
3.3.2.7. Perkembangan Penanganan Ibu Hamil dan Bayi	33
3.3.3. Pekerjaan Umum	35
3.3.3.1. Jaringan Jalan	35
3.3.3.2. Persampahan	35
3.3.3.3. Tempat Ibadah	36
3.3.4. Perumahan Rakyat	37
3.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	38
3.3.6. Sosial	40
3.3.7. Tenaga Kerja	42
3.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44
3.3.9. Pangan	45
3.3.10. Pertanahan	46
3.3.11. Lingkungan Hidup	46
3.3.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47
3.3.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47
3.3.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49
3.3.14.1. Pengendalian Penduduk	49
3.3.14.2. Keluarga Berencana	50
3.3.15. Perhubungan	50
3.3.15.1. Transportasi Darat	50
3.3.15.2. Transportasi Udara	51
3.3.15.3. Transportasi Laut	51
3.3.16. Komunikasi dan Informatika	51
3.3.17. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	53
3.3.18. Penanaman Modal	54
3.3.19. Kepemudaan dan Olah Raga	54
3.3.19.1. Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan	54
3.3.19.2. Organisasi Kepemudaan	55
3.3.19.3. Sarana dan Prasarana Olahraga	55

3.3.20. Statistik.....	55
3.3.21. Kebudayaan.....	56
3.3.22. Perpustakaan.....	57
3.3.23. Kearsipan.....	58
3.3.24. Pariwisata.....	58
3.3.25. Pertanian.....	59
3.3.26. Kehutanan.....	61
3.3.27. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	62
3.3.27.1. Luas Areal Pertambangan.....	62
3.3.27.2. Potensi Sumber Daya Mineral.....	62
3.3.27.3. Ketersediaan dan Sumber Penerangan.....	63
3.3.28. Perdagangan.....	64
3.3.29. Perindustrian.....	66
3.3.30. Kelautan dan Perikanan.....	67
3.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH (ADSD).....	68
3.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	68
3.4.1.1. PDRB per Kapita.....	68
3.4.1.2. Pengeluaran per Kapita.....	69
3.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	69
3.4.2.1. Kapasitas Aparatur Pemerintahan.....	69
3.4.2.2. Rasio Ketergantungan.....	70
3.4.3. Daya Saing Iklim Investasi.....	71
3.4.3.1. Laju Inflasi Daerah.....	71
3.4.3.2. Kondisi Politik dan Keamanan.....	71
3.4.3.3. Produktivitas Total Daerah.....	72

BAB IV Kerangka Pembangunan Sosial Ekonomi Makro & Keuangan Daerah 1

4.1. KERANGKA PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MAKRO PROVINSI PAPUA.....	1
4.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2023.....	1
4.1.2. Prospek Perekonomian Papua 2024 dan 2025.....	2
4.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	10
4.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	10
4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	12

BAB V Tujuan, Sasaran & Prioritas Daerah 1

5.1. TUJUAN, SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH.....	1
5.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN.....	3
5.3. ARAH PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH.....	9
5.3.1. Arah Pembangunan Wilayah.....	9
5.3.2. Kerangka Pengembangan Kewilayahan.....	9

BAB VI Penutup 1

6.1. KESIMPULAN.....	1
6.2. REKOMENDASI.....	3

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	1
Tabel 3.2	Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua	2
Tabel 3.3	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua	3
Tabel 3.4	Kelerengan Provinsi Papua.....	4
Tabel 3.5	Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua	5
Tabel 3.6	Wilayah Sungai di Provinsi Papua	7
Tabel 3.7	Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua	8
Tabel 3.8	Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua Tahun 2020–20221	9
Tabel 3.9	Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022	11
Tabel 3.10	Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022.....	12
Tabel 3.11	Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi Tinggi.....	13
Tabel 3.12	Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi	14
Tabel 3.13	Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi.....	15
Tabel 3.14	Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi	15
Tabel 3.15	Hasil Sensus Penduduk Provinsi Papua 2000, 2010, dan 2020	17
Tabel 3.16	PDRB ADHK Tanpa Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2018-2022 (Rp.Miliar)	18
Tabel 3.17	Distribusi PDRB ADHK Tanpa Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2018-2022 (Persen).....	18
Tabel 3.18	PDRB ADHK Dengan Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2018-2022 (Rp.Miliar)	19
Tabel 3.19	Distribusi PDRB ADHK Dengan Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2022	19
Tabel 3.20	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi Papua.....	21
Tabel 3.21	Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua	21
Tabel 3.22	Kampung Prioritas Sasaran Pembangunan Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	21
Tabel 3.23.	Angka Partisipasi Kasar Provinsi Papua Tahun 2019-2023	27
Tabel 3.24.	Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	28
Tabel 3.25	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2019-2023	28
Tabel 3.26.	Angka Putus Sekolah Provinsi Papua Tahun 2017-2021	28
Tabel 3.27.	Angka Mengulang Provinsi Papua Tahun 2016-2020.....	29
Tabel 3.28.	Angka Kelulusan Provinsi Papua Tahun 2016-2020	29
Tabel 3.29.	Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2017-2021	29
Tabel 3.30.	Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2018-2022.....	29
Tabel 3.31.	Rasio Guru Layak (pendidik dengan ijazah D4/S1 atau lebih) Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Papua Tahun 2021	29
Tabel 3.32.	Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk Tahun 2018-2020	36
Tabel 3.33.	Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa (Persen) Tahun 2017-2021	37

Tabel 3.34.	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber enerangan Listrik PLN (Persen) Tahun 2017-2021	38
Tabel 3.35.	Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Persen) Tahun 2019-2021	38
Tabel 3.36.	Jumlah Organisasi Sosial Dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2017-2020 (Lembaga/Organisasi)	41
Tabel 3.37	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (persen) Tahun 2019–2021	42
Tabel 3.38.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2021.....	45
Tabel 3.39.	Konsumsi kedelai yang terdapat pada tahu, tempe dan kecap di Provinsi Papua Tahun 2020.....	46
Tabel 3.40.	Konsumsi total setara kedelai (tahu, tempe dan kecap) per Provinsi Tahun 2018 – 2020.....	46
Tabel 3.41.	Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Tahun 2017-2021 (Persen).....	46
Tabel 3.42.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021 (Persen)	46
Tabel 3.43.	Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha).....	46
Tabel 3.44.	Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020.....	47
Tabel 3.45.	Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Rp. Triliun)	48
Tabel 3.46.	Rasio Akseptor KB Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (%).....	50
Tabel 3.47.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Tahun 2017-2021 (Unit) (Juta US\$)	54
Tabel 3.48.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2017-2021 (Unit) (Milyar Rupiah)	54
Tabel 3.49.	Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2016-2019 (unit).....	55
Tabel 3.50.	Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2016-2019 (Unit)	55
Tabel 3.51.	Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua	56
Tabel 3.52.	Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2016-2020.....	59
Tabel 3.53.	Luas Areal Tanam dan Produksi Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2017-2020	60
Tabel 3.54.	Produksi Tanaman Sayuran Di Provinsi Papua Tahun 2017-20201 (Ton).....	60
Tabel 3.55.	Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (m3)...	62
Tabel 3.56.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2016-2020 (persen)	64
Tabel 3.57.	Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton).....	64
Tabel 3.58	Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton).....	65
Tabel 3.59.	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2016 – 2020 (ton/US\$)	66
Tabel 3.60.	Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2016-2020 (US\$/%).....	66
Tabel 3.61.	Jumlah Perusahaan pada pada Klasifikasi Industri pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020.....	66

Tabel 3.62.	Produksi Perikanan Provinsi Papua Tahun 2016-2020	67
Tabel 3.63	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2022.....	70
Tabel 3.64	Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023.....	71
Tabel 3.65	Komponen Indeks Demokrasi Indonesia menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020	71
Tabel 3.66	Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021	71
Tabel 3.67	Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021	72
Tabel 4.1.	Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Pada Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2023.....	1
Tabel 4.2.	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Harga Konstan Provinsi Papua Pada Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2023	2
Tabel 4.3.	Target Dan Proyeksi Makro Sosial Ekonomi Provinsi Papua 2022 – 2024.....	10
Tabel 5.1.	Keselerasan Agenda Pembangunan Daerah Papua 2019-2023 Dengan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	7
Tabel 5.2.	Program-Program Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Periode 2019-2023	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Batas Administrasi Provinsi Papua.....	2
Gambar 3.2	Peta Wilayah Adat Provinsi Papua.....	3
Gambar 3.3	Peta Topografi Provinsi Papua.....	4
Gambar 3.4	Peta Wilayah Sungai Provinsi Papua.....	7
Gambar 3.5	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua.....	9
Gambar 3.6	Peta Klimatologi Provinsi Papua.....	10
Gambar 3.7	Peta Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022.....	10
Gambar 3.8	Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua.....	11
Gambar 3.9	Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua.....	13
Gambar 3.10	Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Provinsi Papua.....	14
Gambar 3.11	Peta Rawan Bencana Banjir di Provinsi Papua.....	15
Gambar 3.12	Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua.....	16
Gambar 3.13	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2015-2022.....	17
Gambar 3.14	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2007-2023.....	20
Gambar 3.15	Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Tahun 2020-2040.....	22
Gambar 3.16	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2022.....	23
Gambar 3.17	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua Tahun 2018-2022.....	23
Gambar 3.18	Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2018-2022.....	23
Gambar 3.19	Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/ Kota Provinsi Papua Tahun 2022.....	24
Gambar 3.20	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2017-2022.....	24
Gambar 3.21	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun).....	25
Gambar 3.22	Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2022 (Tahun).....	25
Gambar 3.23	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun).....	26
Gambar 3.24	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2022 (Tahun).....	26
Gambar 3.25	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun).....	27
Gambar 3.26	Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2022.....	27
Gambar 3.27.	Jumlah Sekolah Provinsi Papua Tahun 2021-2022.....	30
Gambar 3.28.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020.....	30
Gambar 3.29.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020.....	30
Gambar 3.30.	Rasio Puskesmas Per 10.000 penduduk Provinsi Papua Tahun 2018-2022.....	31
Gambar 3.31.	Rasio Dokter Per 100 Ribu Penduduk Provinsi Papua Tahun 2018-2022.....	31

Gambar 3.32.	Rasio Tenaga Medis Per 100 Ribu Penduduk Provinsi Papua Tahun 2016-2020	31
Gambar 3.33.	Rata Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari Provinsi Papua Tahun 2019-2023	31
Gambar 3.34.	Rata Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari Provinsi Papua Tahun 2019-2023	32
Gambar 3.35.	Angka Penderita Malaria per 1.000 Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2020	32
Gambar 3.36.	Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2019 ...	32
Gambar 3.37.	HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang) Tahun 2016-2020	33
Gambar 3.38.	Cakupan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Di Provinsi Papua Tahun 2020 (persen)	33
Gambar 3.39.	Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (Persen)	33
Gambar 3.40.	Cakupan Kunjungan K4 Kabupaten Kota di Provinsi Papua Tahun 2019	34
Gambar 3.41.	Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak (Persen)	34
Gambar 3.42.	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapatkan Asi Eksklusif Menurut Provinsi (Persen).....	34
Gambar 3.43.	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (Persen).....	35
Gambar 3.44.	Proporsi Jaringan Jalan dalam kondisi baik Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)	35
Gambar 3.45.	Kondisi Jalan Dalam Menurut Kondisi di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km)	35
Gambar 3.46.	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Provinsi Papua 2016-2020 (km/jiwa)	35
Gambar 3.47.	Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Provinsi Papua 2020-2021 (%).....	36
Gambar 3.48.	Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah di Provinsi Papua 2020-2021 (%).....	36
Gambar 3.49.	Jumlah Timbunan Sampah Tahunan di Provinsi Papua, 2019-2021 (ton)	36
Gambar 3.50.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau (Persen), 2017-2021	37
Gambar 3.51.	Persentase Rumah Tangga dengan Atap Terlulus Bukan Ijuk/Lainnya (Persen) Tahun 2017-2021.....	38
Gambar 3.52.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021.....	38
Gambar 3.53.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)	39
Gambar 3.54.	Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Per 100.000 Penduduk)	39
Gambar 3.55.	Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah (kasus).....	39
Gambar 3.56.	Kondisi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2016-2017	40
Gambar 3.57.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (orang)	40
Gambar 3.58.	Kondisi Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017-2022	41
Gambar 3.59.	Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Provinsi Tahun 2018-2021	43
Gambar 3.60.	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja Tahun 2018-2021 (Persen).....	43

Gambar 3.61.	Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi Tahun 2017-2021 (%)	44
Gambar 3.62.	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian Tahun 2017-2021 (Persen).....	44
Gambar 3.63.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2017-2021	44
Gambar 3.64.	Partisipasi Perempuan dan Sumbangan Pendapatan Perempuan di Provinsi Papua Tahun 2017-2021.....	45
Gambar 3.65.	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Tahun 2016-2020	45
Gambar 3.66.	Indeks Kualitas Air, Udara dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020.....	47
Gambar 3.67.	Persentase Anak yang Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2017-2021	47
Gambar 3.68.	Indeks Desa Membangun Provinsi Papua.....	48
Gambar 3.69.	Kondisi Pemerintahan Kampung.....	48
Gambar 3.70.	Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	49
Gambar 3.71.	Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga	49
Gambar 3.72.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit).....	51
Gambar 3.73.	Jumlah Penumpang Internasional berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (Orang).....	51
Gambar 3.74.	Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (Orang).....	51
Gambar 3.75.	Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Kapal (Org)	51
Gambar 3.76.	Persentase Penduduk dan Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler	52
Gambar 3.77.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Menara BTS Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Selular (Desa).....	52
Gambar 3.78.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Menara Base Transceiver Station (BTS) (Desa).....	52
Gambar 3.79.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah (Desa)	52
Gambar 3.80.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Komputer	52
Gambar 3.81.	Jumlah Keluarga yang Berlangganan Telepon Tetap Kabel (Keluarga).....	53
Gambar 3.82.	Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga yang Memiliki Pengeluaran Telekomunikasi (Rupiah)	53
Gambar 3.83.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengeluaran Telekomunikasi (Persen).....	53
Gambar 3.84.	Jumlah Kantor Pos Provinsi Papua Tahun 2017-2021.....	53
Gambar 3.85.	Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2016-2020 (unit).....	53
Gambar 3.86.	Volume Usaha Koperasi (Juta Rupiah)	54
Gambar 3.87.	Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Tahun 2015-2019	54
Gambar 3.88.	Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019	57
Gambar 3.89.	Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019	57
Gambar 3.90.	Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua Tahun 2016	57

Gambar 3.92.	Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016.....	58
Gambar 3.93.	Jumlah Daya Tarik Wisata dan Perjalanan Wisatawan di Provinsi Papua	58
Gambar 3.94.	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Provinsi Papua Tahun 2020 (hari)	59
Gambar 3.95.	Perkembangan Hotel Bintang dan Non Bintang di Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (Unit).....	59
Gambar 3.96.	Jumlah Kelompok Tani di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (Kelompok).....	61
Gambar 3.97.	Jumlah Penyuluh Pertanian di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (Orang)	61
Gambar 3.98.	Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tahun 2020 (ribu ha)	61
Gambar 3.99.	Angka Deforestasi di Provinsi Papua Tahun 2019-2020 (ha).....	61
Gambar 3.100.	Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan Provinsi Papua (ha).....	62
Gambar 3.101.	Potensi Mineral Batubara di Provinsi Papua (juta ton)	62
Gambar 3.102.	Potensi Mineral Tembaga di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton)	63
Gambar 3.103.	Potensi Mineral Emas Primer di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton).....	63
Gambar 3.104.	Potensi Mineral Nikel di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton).....	63
Gambar 3.105.	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (Unit).....	67
Gambar 3.106.	Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020	67
Gambar 3.107.	Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Papua (kg/kapita) Tahun 2017-2021	68
Gambar 3.108	PDRB Per Kapita Harga Berlaku di Provinsi Papua Tahun 2015-2021 (Persen) .	68
Gambar 3.109	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Dengan Tambang) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2022 (Rupiah).....	68
Gambar 3.110	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah)	69
Gambar 3.111	Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2022.....	70
Gambar 5.1	Kerangka Pengembangan Kewilayahan Papua	10



BAB I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pembangunan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup: kondisi geografis daerah; demografi; potensi sumber daya daerah; ekonomi dan keuangan daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing daerah. Melalui sistem informasi ini diharapkan arah pembangunan daerah lebih terarah pada kebutuhan riil masyarakat secara obyektif, dan bukan hanya bersifat normatif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah dengan melakukan analisis kerangka pembangunan daerah, yaitu suatu analisis outline pembangunan yang berisikan uraian singkat mengenai kondisi dan analisis statistik sosial ekonomi daerah dan keuangan daerah, sebagai gambaran umum dalam situasi historis dan on time hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah. Selain itu juga memberikan tantangan dan gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah di masa mendatang.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan

menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/ daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Ada beberapa implikasi pokok dari perencanaan pembangunan daerah: Pertama, perencanaan pembangunan daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional di mana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut. Kedua, sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik secara nasional. Dan ketiga, perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas yang biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya - sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan obyek perencanaan. Hal ini menandakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses utama yang

akan menentukan keberhasilan pembangunan, sehingga dalam tahapan ini harus dijalankan secara optimal. Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah dapat berhasil jika didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten dan data-data statistik yang akurat. Keberadaan data-data statistik yang akurat akan membantu perencana dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala serta pemikiran ideal yang harus diapresiasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

1.2. MAKSUD & TUJUAN

Maksud dari pada penyusunan dokumen ini adalah memberikan analisis statistik sosial ekonomi daerah secara historis mengenai hasil-hasil pembangunan sosial ekonomi daerah Provinsi Papua, dan juga memberikan tantangan dan gambaran dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan mempengaruhi kinerja sosial ekonomi daerah dimasa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan acuan penyusunan rencana kerja tahunan daerah Provinsi Papua. Adapun tujuan dari pada kegiatan ini secara khusus adalah:

1. Mengidentifikasi dan menetapkan indikator-indikator kerangka analisis pembangunan di Papua periode 2018-2022;
2. Mengukur dan menganalisis capaian kinerja pembangunan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing;
3. Merumuskan peluang dan tantangan, atau stimulus dan distorsi dalam pembangunan daerah Provinsi Papua dimasa mendatang, khususnya tahun 2024 dan 2025.
4. Melakukan proyeksi capaian kinerja pembangunan sosial ekonomi makro daerah Provinsi Papua pada tahun 2024 dan 2025.

1.3. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan penyusunan dokumen Analisis

Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2023 adalah:

1. Teridentifikasinya indikator-indikator kerangka analisis pembangunan di Papua periode 2018-2022;
2. Terukurnya capaian kinerja pembangunan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing;
3. Tersusunnya dokumen Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen ini disusun berdasarkan kebutuhan data perencanaan pembangunan daerah yang dilandasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam penyajiannya secara garis besar sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Sasaran
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II METODE KAJIAN

- 2.1. Ruang Lingkup Kegiatan
- 2.2. Jenis Dan Sumber Data
- 2.3. Teknik Pengumpulan Data
- 2.1. Metode Analisis

BAB III GAMBARAN UMUM

- 3.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 3.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 3.3. Aspek Daya Saing Daerah
- 3.4. Aspek Pelayanan Umum

BAB IV KERANGKA PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MAKRO DAN KEUANGAN DAERAH

- 4.1. Kerangka Pembangunan Sosial Ekonomi
- 4.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah

- 4.3. Tantangan Dan Prospek Pembangunan Sosial Ekonomi Makro Provinsi Papua Tahun 2023, 2024 Dan 2025

BAB V TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
- 5.2. Prioritas Pembangunan
- 5.3. Arah Pembangunan Dan Kerangka Pengembangan Wilayah

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Rekomendasi



BAB II

Metode Kajian

2.1 RUANG LINGKUP KEGIATAN

2.1.1 Ruang Lingkup Wilayah Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksana kegiatan penyusunan dokumen Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2023 adalah UPTD Pusat Data Dan Analisis Pembangunan BAPPEDA Provinsi Papua dan Tenaga ahli yang direkrut dari pihak akademisi. Ruang lingkup wilayah dalam pengukuran Analisis Kerangka Pembangunan ini adalah tingkat provinsi.

2.1.2 Ruang Lingkup Obyek Kegiatan

Obyek yang diamati dalam studi ini mencakup indikator-indikator dalam mengukur kinerja pembangunan daerah yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Papua.

2.1.3 Ruang Lingkup Tahapan Kegiatan

Penyusunan Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua dilaksanakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal dalam bentuk time liner yaitu:

- (1) Penyusunan TOR dokumen Analisis Kerangka Pembangunan Provinsi Papua tahun 2023;
- (2) Penyediaan data pendukung berkaitan dengan capaian-capaian indikator kinerja Pembangunan Provinsi Papua selama periode 2018-2022;
- (3) Proses Penyusunan dan Pengolahan data (Analisis) akan dilakukan oleh pihak akademisi;
- (4) Kegiatan FGD akan dilakukan pihak akademisi yang difasilitasi Oleh BAPPEDA Provinsi Papua jika diperlukan.

2.2. JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penyusunan analisis kerangka pembangunan daerah adalah berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang diperoleh, dlipt dan dikumpulkan dari berbagai laporan yang telah dipublikasikan oleh sebuah institusi sebelumnya. Sedangkan data primer merupakan raw data atau data dasar yang langsung diliput pada obyek yang diamati melalui suatu obeservasi langsung ke lapangan.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, data yang dikumpulkan dapat juga dibagi menjadi dua jenis pengukuran yakni data kualitatif dan kuantitatif. Pengukuran data kualitatif menggunakan skala ordinal yang dapat menunjukkan adanya perbedaan derajat antara penilaian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan data-data kuantitatif dapat berbentuk skala interval atau rasio.

Menurut sumbernya data yang dihimpun dalam studi ini dapat dibagi menjadi beberapa sumber yang berasal dari BPS Provinsi Papua dan Kabupaten/kota, SKPD (Dinas, Badan, Kantor), BPS RI, Kementerian dan Ditjen.

2.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Secara garis besar ada 3 (tiga) teknik yang digunakan dalam meliputi data-data dan informasi yang dibutuhkan. Yaitu :

1. **Riviu Dokumen.** Riviu dokumen atau tinjauan dokumen merupakan cara mengumpulkan data dengan melakukan pemeriksaan kembali dokumen yang ada. Dalam hal ini, peninjuan dokumen dilakukan pada dokumen-dokumen yang

bersifat internal dan eksternal terhadap suatu program atau organisasi.

2. **Wawancara.** Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan analisis dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
3. **Focus Group Discussion.** Focus Group Discussion disingkat FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Atau sederhananya FGD dapat didefinisikan

sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu.

2.3. METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu suatu metode analisis yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap berbagai fenomena masalah. Adapun analisis kuantitatif yang digunakan antara lain meliputi :

- (1) statistik deskriptif;
- (2) rasio-rasio pertumbuhan, proporsi, dan cakupan;
- (3) analisis COR dan ICOR;
- (4) model-model proyeksi time series.



BAB III

Gambaran Umum

3.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

3.1.1. Aspek Geografi

3.1.1.1. Letak Geografis dan Administrasi

Provinsi Papua secara geografis berada di antara garis koordinat 1° 8' 20.8752" LU - 4° 6' 58.626" LS dan 134° 5' 58.8444" - 141° 0' 37.5912" BT. Batas wilayah Provinsi Papua secara administratif meliputi Sebelah Utara dengan Samudra Pasifik; Sebelah Selatan dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah; Sebelah Barat dengan Provinsi Papua Barat; dan Sebelah Timur dengan Negara Papua New Guinea.

Provinsi Papua memiliki luas wilayah kurang lebih 13.158.285,28 hektar dengan batasan wilayah terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut seluas kurang lebih 13.158.285,38 hektar. Adapun wilayah darat memiliki luas kurang lebih 8.268.837,32 hektar dengan 8 kabupaten dan 1 kota di dalamnya yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu: a) Kota Jayapura; b) Kabupaten Jayapura; c) Kabupaten Keerom; d) Kabupaten Kepulauan Yapen; e) Kabupaten Mamberamo Raya; f) Kabupaten Sarmi; g) Kabupaten Supiori; h) Kabupaten Biak Numfor; dan i) Kabupaten Waropen.

Tabel 3.1 Daftar Luas Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Persen (%)
1	Jayapura	1.408.261.62	17,03
2	Kepulauan Yapen	242.842.21	2,94
3	Biak Numfor	226.001.7	2,73
4	Sarmi	1.406.901.96	17,01
5	Keerom	952.631.53	11,52
6	Waropen	1.078.212.89	13,04
7	Supiori	66.069.32	0,80
8	Mamberamo Raya	2.804.347.07	33,91

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Persen (%)
9	Kota Jayapura	83.568.99	1,01
Jumlah		8.268.837.32	100

Sumber: *Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*

Luasan kabupaten/kota, pembagian wilayah administrasi, dan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 3.2. dan Gambar 3.1. Diketahui bahwa kabupaten dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Mamberamo Raya dengan persentase luas sebesar 33,91%, sedangkan Kota Jayapura menjadi kota dengan luas terkecil yaitu sebesar 1,01%. Wilayah administrasi di Provinsi Papua dibagi menjadi beberapa distrik, kelurahan, dan kampung. Berdasarkan Tabel 3.2, diketahui bahwa Kabupaten Jayapura dan Biak Numfor memiliki distrik terbanyak. Kabupaten Biak Numfor juga menjadi kabupaten di Provinsi Papua dengan kelurahan dan kampung terbanyak. Kota Jayapura dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Papua menjadi kota dengan jumlah distrik dan kampung paling sedikit, namun memiliki jumlah kelurahan terbanyak.

Luas wilayah darat terbesar adalah Kabupaten Mamberamo Raya dengan luas sebesar 2.804.347,07 Ha atau sebesar 21,31% dari luas wilayah Provinsi Papua. Sementara wilayah darat terkecil adalah Kabupaten Supiori seluas 66.069,33 Ha atau 0,50% dari luas wilayah Provinsi Papua. Selain wilayah darat, terdapat pula wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang termasuk dalam batas wilayah Provinsi Papua. Hanya terdapat satu kabupaten yang tidak memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Kabupaten Keerom karena dikelilingi oleh wilayah darat.

Gambar 3.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Tabel 3.2 Pembagian Wilayah Administrasi di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Ibukota	Distrik	Kelurahan	Kampung
1	Kab. Jayapura	Sentani	19	5	139
2	Kab. Kepulauan Yapen	Serui	16	5	160
3	Kab. Biak Numfor	Biak	19	14	254
4	Kab. Sarmi	Sarmi	10	2	92
5	Kab. Keerom	Waris	11	0	91
6	Kab. Waropen	Botawa	11	0	100
7	Kab. Supiori	Sorendiwari	5	0	38
8	Kab. Mamberamo Raya	Biurmeso	8	0	60
9	Kota Jayapura	Jayapura	5	25	14
TOTAL			104	51	948

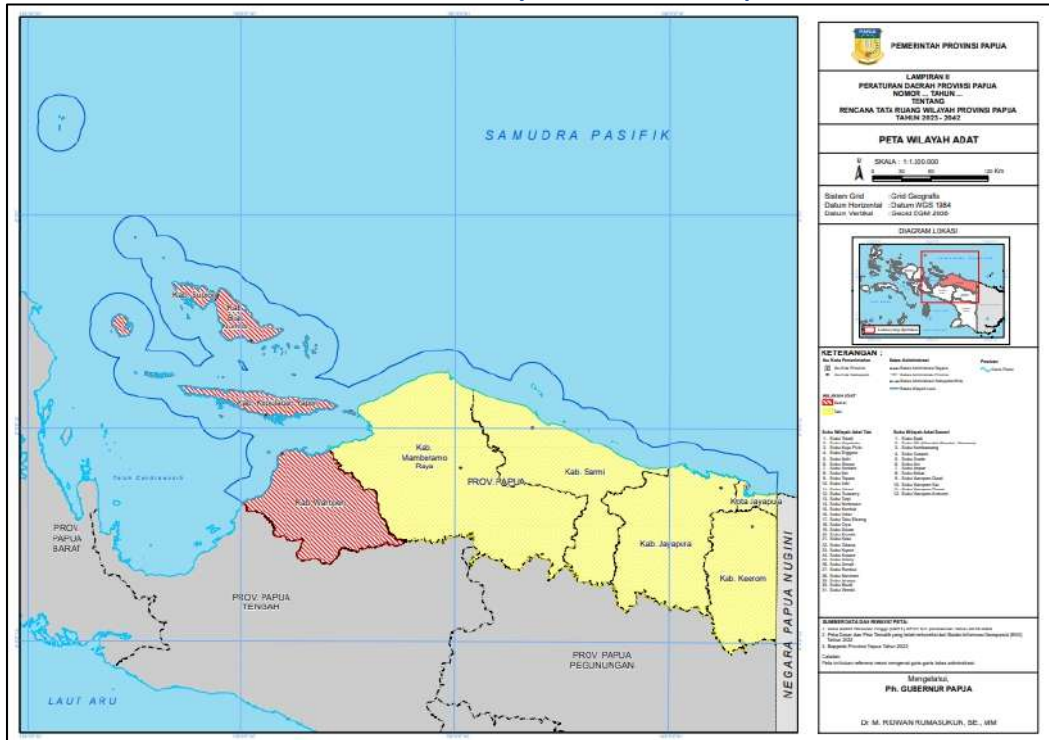
Sumber: Permendagri Nomor 72 Tahun 2019

Wilayah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Papua adalah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut dengan luas kurang lebih 4.889.447,97 hektar. Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan sebaran pulau-pulau di Provinsi Papua. Berdasarkan data BIG tahun

2018, terdapat 4 pulau yang termasuk dalam kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar Provinsi Papua, yaitu Pulau Fanildo, Pulau Brass, Pulau Bepondi, Pulau Liki di Kabupaten Sarmi. Wilayah adat mencakup 2 wilayah yang berada di ruang darat dan maupun laut yaitu Wilayah adat Mamta/TABI dan wilayah adat Saireri yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. Secara budaya, keduanya memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat yang tersebar beberapa kabupaten sebagai berikut:

- a. Wilayah Mamta/TABI meliputi:
 - 1) Kota Jayapura,
 - 2) Kabupaten Jayapura,
 - 3) Kabupaten Keerom,
 - 4) Kabupaten Sarmi, dan
 - 5) Kabupaten Mamberamo Raya
- b. Wilayah Saireri meliputi:
 - 1) Kabupaten Biak Numfor,
 - 2) Kabupaten Supiori,
 - 3) Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 - 4) Kabupaten Waropen

Gambar 3.2 Peta Wilayah Adat Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

3.1.1.2. Topografi

Topografi dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Provinsi Papua didominasi oleh dataran (39,20%) yang berada di bagian pesisir selatan (terluas) dan pesisir utara, dan pegunungan (60,79%) yang berada di bagian tengah wilayah provinsi. Morfologi dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 100 m menjadi bagian terluas yaitu sebesar 5.027.142,57 ha (53,3%). Sedangkan ketinggian lebih dari 1000 m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit dengan luas sebesar 3.241.694.74 ha (39,20%). Berikut peta topografi yang dapat dilihat pada Gambar 3.

Ketinggian di wilayah Provinsi Papua cenderung memiliki elevasi yang beragam, yaitu 0-100 mdpl, 100-3000 mdpl, dan >3000 mdpl. Wilayah dengan elevasi 0-100 mdpl memiliki luas sebesar 3.241.694.74 ha, elevasi 100-3000 mdpl sebesar 5.025.909 ha, dan elevasi >3000 mdpl sebesar 1.233,57 ha. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan wilayah terluas yang memiliki elevasi 0-100 mdpl dan 100-3000 mdpl dengan luas masing-masingnya adalah 1.360.180,62 ha dan 1.444.166,45 ha.

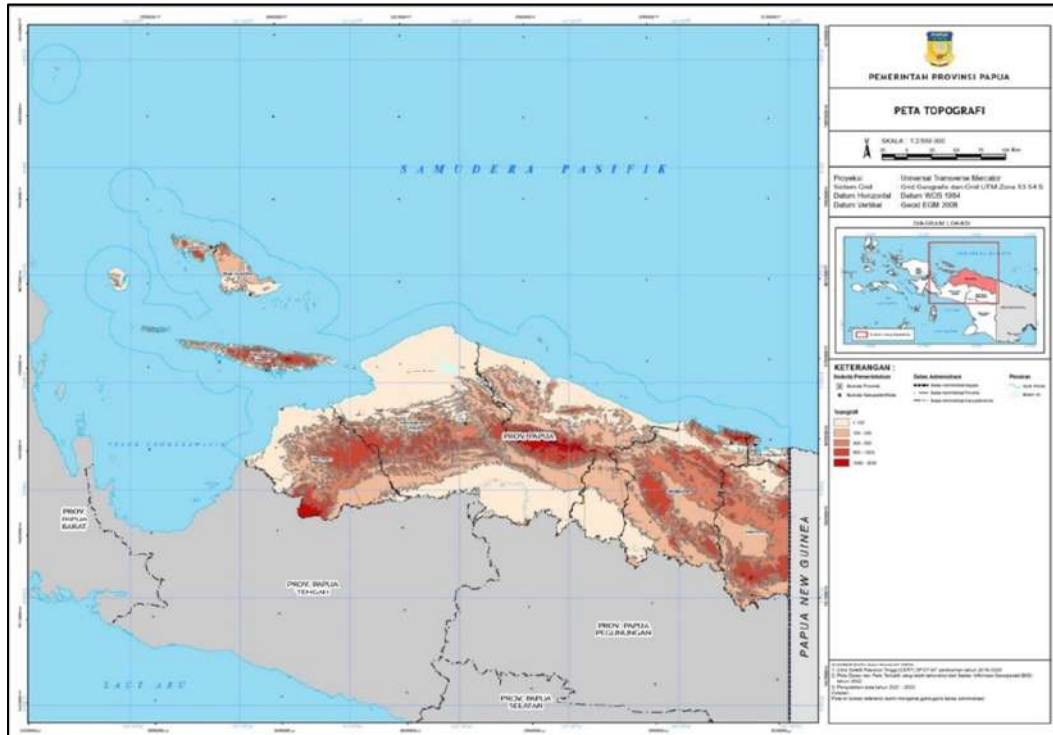
Sementara Kabupaten Keerom menjadi kabupaten dengan wilayah elevasi >3000 mdpl terluas yaitu seluas 1.233,57 ha. Tingkat elevasi kabupaten/kota di Provinsi Papua ditunjukkan melalui Gambar 3.3.

Tabel 3.3 Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian di Provinsi Papua

Elevasi (Mdpl)	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
0-100	Mamberamo Raya	1,360,180.62
	Sarmi	626,262.05
	Waropen	746,554.32
	Jayapura	185,319.99
	Biak Numfor	116,564.00
	Keerom	75,299.98
	Kepulauan Yapen	69,214.21
	Supiori	25,702.05
	Kota Jayapura	36,597.52
	0-100 Total	3,241.694.74
100-3000	Jayapura	1,222,941.63
	Mamberamo Raya	1,444,166.45
	Keerom	876,097.99
	Sarmi	780,639.91
	Waropen	331,658.57
	Kepulauan Yapen	173,628.00
	Biak Numfor	109,437.70
	Kota Jayapura	46,971.47
100-3000 Total	5,025.909	
>3000	Keerom	1,233.57
>3000 Total	1,233.57	
Grand Total		8,268.837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

Gambar 3.3 Peta Topografi Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Tingkat kemiringan lereng seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.4, diklasifikasikan dalam beberapa rentang, yaitu 0-8%, 15-25%, 25-45%, dan > 45%. Kemiringan lereng 0-8 % seluas 3.849.082,03 ha, 8-15% seluas 1.034.503,65 ha, 15-25% seluas 1.531.173,89 ha, 25-45% seluas 1.013.710,94 ha, dan >45% seluas 134.759,41 ha. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan kemiringan lereng 0-8% dan 15-25% terluas dengan masing-masing luasnya sebesar 1.517.691,61 ha dan 484.150,73 ha. Kabupaten Jayapura menjadi kabupaten dengan kemiringan lereng 8-15% terluas sebesar 360.181,45 ha, diikuti Kabupaten Sarmi dengan kemiringan lereng >45% terluas sebesar 57.217,56 ha. Tingkat kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Provinsi Papua adalah landai (0-8%) dengan persentase sebesar 45,9% dan sangat terjal (>40%) sebesar 43,3%.

Tabel 3.4 Kelereng Provinsi Papua

No	Kemiringan Lereng	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
1	0-8 %	Mamb. Raya	1,517,691.61
		Sarmi	786,828.96
		Jayapura	550,385.44
		Keerom	433,272.53
		Waropen	516,193.64
		Biak Numfor	186,892.61

No	Kemiringan Lereng	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
2	8-15%	Kep. Yapen	38,772.07
		Supiori	19,971.85
		Kota Jayapura	56,722.06
		Total 0 – 8 %	4,106,730.77
		Jayapura	295,881.08
		Mamb. Raya	478,660.73
		Sarmi	191,828.18
		Keerom	179,566.75
		Waropen	257,370.93
		Kep. Yapen	26,625.90
3	15-25%	Biak Numfor	18,831.22
		Supiori	13,209.59
		Kota Jayapura	13,741.82
		Total 8-15 %	1,475,716.20
		Mamb. Raya	484,150.73
		Jayapura	350,131.45
		Sarmi	215,357.06
		Keerom	194,529.88
		Waropen	200,660.97
		Kep. Yapen	60,503.87
4	25-45%	Supiori	19,902.39
		Biak Numfor	12,683.64
		Kota Jayapura	17,129.85
		Total 15-25%	1,555,049.84
		Mamb. Raya	310,648.06
		Jayapura	188,532.54
		Sarmi	155,670.20
		Keerom	129,997.55
		Waropen	101,890.17
		Kep. Yapen	96,899.04
Supiori	11,410.49		

No	Kemiringan Lereng	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
		Biak Numfor	6,625.39
		Kota Jayapura	12,037.50
		Total 25-45%	1,013,710.94
5	>45%	Sarmi	47,217.56
		Jayapura	16,331.11
		Kep. Yapen	19,911.49
		Keerom	15,264.83
		Mamb. Raya	13,195.94
		Waropen	2,097.18
		Supiori	1,575.01
		Biak Numfor	968.84
		Kota Jayapura	1,067.61
		>45% Total	117,629.57
		Grand Total	8,268,837.32

Sumber: Revisi RTRWP Papua Tahun 2022

3.1.1.3. Jenis Tanah

Beberapa jenis tanah di Provinsi Papua di antaranya adalah jenis tanah entisol, inceptisol, mollisol, histosol, dan ultisol. Luas jenis tanah yang ada di Provinsi Papua ditunjukkan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Luas Jenis Tanah di Provinsi Papua

Jenis Tanah	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
Entisols	Kabupaten Sarmi	95.060,48
	Kabupaten Mamberamo Raya	57.806,27
	Kabupaten Waropen	48.955,23
	Kabupaten Jayapura	45.312,74
	Kota Jayapura	34.151,52
	Kabupaten Keerom	31.502,84
	Kabupaten Supiori	9.428,63
	Entisols Total	322.217,71
Inceptisols	Kabupaten Mamberamo Raya	1.477.352,81
	Kabupaten Sarmi	913.496,30
	Kabupaten Jayapura	620.843,28
	Kabupaten Waropen	166.698,33
	Kabupaten Keerom	98.038,18
	Kabupaten Kepulauan Yapen	26.293,22
	Kota Jayapura	17.811,94
	Kabupaten Supiori	6.316,86
Inceptisols Total	3.326.850,92	
Mollisols	Kabupaten Biak Numfor	163.713,81
	Kabupaten Jayapura	57.414,34
	Kabupaten Kepulauan Yapen	9.020,44
	Kabupaten Supiori	834,76
	Kabupaten Sarmi	310,87
	Mollisols Total	231.294,22
Histosols	Kabupaten Mamberamo Raya	597.148,74
	Kabupaten Waropen	128.925,63
	Kabupaten Sarmi	29.634,57
	Kabupaten Keerom	3.690,51

Jenis Tanah	Kabupaten/Kota	Area (Ha)
	Kabupaten Biak Numfor	959,97
	Kabupaten Kepulauan Yapen	957,40
	Kota Jayapura	891,31
	Kabupaten Supiori	448,21
	Kabupaten Jayapura	211,33
	Histosols Total	762.867,67
Ultisols	Kabupaten Keerom	795.344,59
	Kabupaten Jayapura	702.901,07
	Kabupaten Mamberamo Raya	359.557,57
	Kabupaten Sarmi	356.243,64
	Kabupaten Waropen	238.450,11
	Kabupaten Kepulauan Yapen	204.626,59
	Kabupaten Biak Numfor	60.764,33
	Kabupaten Supiori	50.073,73
	Kota Jayapura	57,38
	Ultisols Total	2.768.019,01
Tidak Ada Data	Kota Jayapura	8.428,14
	Kabupaten Sarmi	2.345,23
	Kabupaten Waropen	294,52
	Kabupaten Supiori	3,96
	Kabupaten Biak Numfor	0,40
	Kabupaten Jayapura	0,12
Tidak Ada Data Total	11.072,37	
Tubuh Air	Kabupaten Mamberamo Raya	71.983,24
	Kota Jayapura	21.692,73
	Kabupaten Sarmi	13.701,46
	Kabupaten Keerom	13.341,30
	Kabupaten Waropen	3.463,13
	Kabupaten Kepulauan Yapen	83,22
	Kabupaten Biak Numfor	14,21
Tubuh Air Total	124.279,29	
Grand Total	7.546.601,19	

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Adapun jenis-jenis tanah di Provinsi Papua terbagi dalam lima jenis yang dijabarkan sebagai berikut.

a. Entisol

Jenis tanah yang berkembang dari bahan asal atau bahan induknya dan pembentukannya terjadi oleh beberapa akibat seperti iklim yang sangat kering sehingga reaksi kimia dan pelapukan terjadi sangat lambat, erosi kuat sehingga bahan yang tererosi lebih banyak dari yang terbentuk, pengendapan terus-menerus, dan jenuh air yang menghambat perkembangan horison. Tanah entisol cocok untuk pertanian khususnya di daerah endapan sungai. Provinsi Papua memiliki jenis tanah entisol seluas

322.217,71 ha yang dapat ditemukan di beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Supiori.

b. Inceptisol

Jenis tanah yang belum matang dan masih menyerupai bahan induknya. Tanah inceptisol digunakan secara bergaam untuk pertanian maupun non pertanian. Wilayah di Provinsi Papua dengan tanah inceptisol memiliki luas 3.326.850292 ha yang berada di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, dan Kabupaten Supiori.

c. Mollisol

Jenis tanah yang terbentuk dari proses pembentukan tanah berwarna gelap karena penambahan bahan organik. Tanah mollisol sebagian besar digunakan untuk pertanian. Wilayah di Provinsi Papua dengan tanah mollisol memiliki luas 231.294,22 ha yang berada pada beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Sarmi.

d. Histosol

Jenis tanah yang terbentuk akibat penimbunan bahan organik yang lebih besar dari mineralisasinya dan terbentuk pada tempat yang tergenang air sehingga sirkulasi oksigen terhambat dan terjadi akumulasi bahan organik. Agar dapat digunakan untuk usaha pertanian, perbaikan drainase perlu dilakukan bagi tanah histosol. Tanah histosol dapat digunakan untuk bertanam sayur, bawang merah, padi, dan sebagainya. Wilayah di Provinsi Papua memiliki tanah histosol seluas 762.867,67 ha yang berada Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Jayapura.

a. Ultisol

Jenis tanah yang sudah berkembang dan memiliki horison argilik, bersifat masam dan kejenuhan basa rendah (<35%). Penggunaan tanah ini sedikit memiliki kendala karena reaksi masam, kejenuhan basa rendah, kadar aluminium tinggi yang dapat meracuni tanaman, unsur hara rendah, dan fiksasi fosfor yang tinggi. Wilayah di Provinsi Papua memiliki jenis tanah ultisol seluas 2.768.019,01 ha yang berada di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura.

3.1.1.4. Stratigrafi

Provinsi Papua secara garis besar dibedakan dalam 3 kelompok stratigrafi, yaitu batuan Kraton Australia, batuan Lempeng Pasifik, dan batuan campuran dari kedua lempeng tersebut. Batuan Kraton Australia tersusun dari batuan alas, batuan malihan dengan derajat rendah hingga tinggi, dan sebagiannya diintrusi oleh batuan granit di sebelah barat.

3.1.1.5. Tektonik

Terdapat 2 mandala struktur geologi terpenting di Provinsi Papua berdasarkan peristiwa tektonik regional, diantaranya:

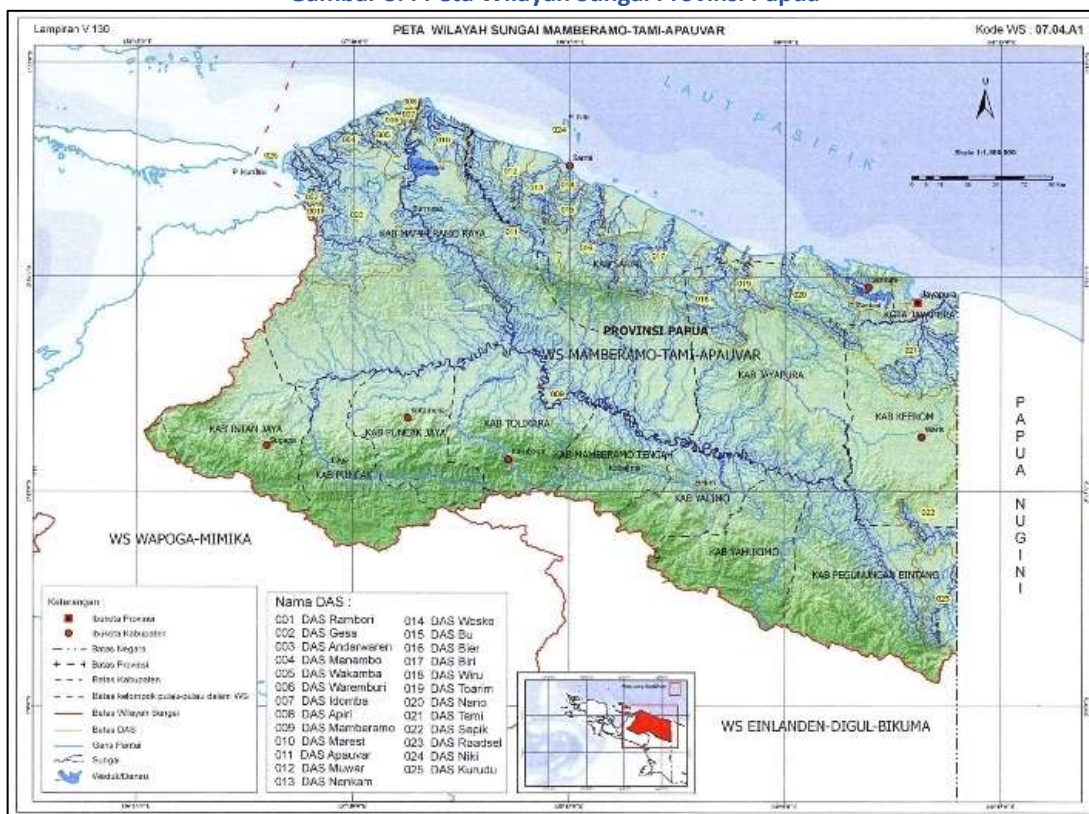
a. Jalur Sesar Naik Pegunungan Tengah (JSNPT)

Berada pada daerah Pegunungan Tengah Papua, jalur sesar sungkup berarah timur barat dan memiliki panjang 100 km. Batu gamping New Guinea menjadi satuan litologi yang paling dominan di JNSPT dengan ketebalan 2000 m. Bentuk daerah JNSPT termodifikasi pada awal Pliosen diduga terbentuk dari penebalan batuan kerak. Perkembangan kerak yang bergerak ke arah utara membentuk Sesar Sungkup Mamberamo (*The Mamberamo Thrust Belt*) dan menjadi awal tempat Gautier (*The Gautier off set*) ditandai pada periode ini.

b. Jalur Sesar Naik Mamberamo

Terdiri dari sesar anjak dan sesar geser (*shear*) serta memanjang 100 km ke arah selatan sehingga menggeser sedikit-demi sedikit batuan Plio–Pleistosen Formasi–Mamberamo dan batuan kerak Pasifik yang berada di bawahnya.

Gambar 3.4 Peta Wilayah Sungai Provinsi Papua



Sumber : Balai Wilayah Sungai Papua, Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR

3.1.1.6. Hidrologi

Hidrologi berkaitan dengan karakteristik kuantitas dan kualitas air di bumi menurut waktu dan ruang. Hidrologi dapat terbentuk oleh proses hidrologi, pergerakan, penyebaran, sirkulasi tampungan, eksplorasi, pengembangan dan manajemen, Kondisi Hidrologi di Provinsi Papua dapat dilihat dari banyaknya sungai yang ada. Banyaknya sungai Papua dilalui oleh wilayah sungai Mamberamo-Tami-Apauvar.

Terdapat 2 sungai besar yang melintasi beberapa kabupaten di Provinsi Papua meliputi :

1. Sungai Mamberamo-Tami-Apauvar melintasi Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mamberamo Raya; dan
2. Sungai Wapoga-Mimika melintasi Kabupaten Supiori, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen.

Adapun Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Papua terbagi dalam wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai lintas kabupaten yang dikelompokkan berdasarkan kewenangan

wilayah sungai, kabupaten, dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Tabel 3.6 Wilayah Sungai di Provinsi Papua

No	Kewenangan Wilayah Sungai	Kabupaten	DAS
Wilayah Sungai Lintas Negara			
A	WS Mamberamo Tami-Apauva	1) Kabupaten Keerom	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Tami (Kab. Keerom, Kab. Jayapura, Kota Jayapura) • DAS Sepik (Kab. Keerom dan Pegunungan Bintang)
		2) Kabupaten Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Wiru (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Toarim (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Nano (Kab. Sarmi, Kab. Jayapura, Keerom) • DAS Sentani (Kab. Jayapura dan Kota Jayapura)
		3) Kabupaten Sarmi	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Muwar (Kab. Sarmi dan Mamberamo Raya) • DAS Nenkam • DAS Woske • DAS Bu • DAS Bier • DAS Biri (Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura) • DAS Niki • DAS Orai

No	Kewenangan Wilayah Sungai	Kabupaten	DAS
		4) Kabupaten Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Rambori • DAS Gesa • DAS Andarwaren • DAS Manembo • DAS Wakamba • DAS Waremburi • DAS Idomba • DAS Apiri • DAS Mamberamo (Kab. Mamberamo Raya, Keerom, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Kab. Jayapura, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Mamberamo Tengah) • DAS Marest • DAS Apauvar • DAS Kurudu
Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota			
A	WS Wapoga-Mimika	1) Kabupaten Supiori	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Bepondi • DAS Rusdori • DAS Wafordori • DAS Waradokdo
		2) Kabupaten Biak Numfor	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Surdori • DAS Sarwodari • DAS Korem • DAS Wardo • DAS Owi • DAS Auki • DAS Pai • DAS Padaidori • DAS Bromsi • DAS Numfor
		3) Kabupaten Mamberamo Raya	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Sorabi • DAS Bariworo • DAS Barapasi • DAS Naduboai • DAS Rawiwa • DAS Wankai • DAS Sosoro
		4) Kabupaten Waropen	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Waron • DAS Wanasanu • DAS Boi • DAS Binatanaboa • DAS Sanoringga • DAS Sabia • DAS Rombak • DAS Rondisi • DAS Dambo • DAS Seram
		5) Kabupaten Kepulauan Yapen	<ul style="list-style-type: none"> • DAS Wadapi • DAS Menawi • DAS Borai • DAS Amboi • DAS Mariadey • DAS Warui • DAS Pamawari • DAS Sumbu • DAS Koanda • DAS Sasawa • DAS Parida • DAS Papuma • DAS Ansus • DAS Marau • DAS Antunai • DAS Jauri • DAS Aibondeni

No	Kewenangan Wilayah Sungai	Kabupaten	DAS
			<ul style="list-style-type: none"> • DAS Kairawi • DAS Wooli

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2042

Cekungan air tanah (CAT) di Provinsi Papua dibagi berdasarkan 2 kewenangan yaitu CAT dalam wilayah provinsi dan CAT lintas negara. CAT dalam wilayah Provinsi Papua meliputi CAT Numfor, CAT Warsa, CAT Biak, CAT Pom, CAT Ansar, CAT Serui, CAT Samberdada, CAT Waren-Demta, CAT Taritatu, Cat Hulu S. Senggi, CAT Timur Arso, CAT Lereh-Leweh dan CAT Ubrub. CAT di Provinsi Papua.

Tabel 3.7 Cekungan Air Tanah di Provinsi Papua

No.	Kewenangan	Cekungan Air Tanah
1	CAT dalam wilayah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • CAT Pom di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Ansar di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Serui di Kabupaten Yapen Waropen • CAT Samberdada di Kabupaten Kepulauan Yapen • CAT Waren-Demta di Kab. Nabire, Waropen, Sarmi, Jayapura • CAT Taritatu di Kab. Waropen, Sarmi, Jayapura, Keerom • Cat Hulu S. Senggi di Kabupaten Keerom • CAT Timur Arso di Kabupaten Keerom • CAT Lereh-Leweh di Kabupaten Keerom dan Jayapura • CAT Ubrub di Kabupaten Keerom
2	CAT lintas negara	<ul style="list-style-type: none"> • CAT Jayapura di Kabupaten Jayapura dan Keerom

Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Gambar 3.5 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Papua



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023 - 2042

3.1.1.7. Klimatologi

Klimatologi merupakan salah satu hal terpenting dalam melihat perubahan iklim selama beberapa tahun terakhir. Perubahan iklim menjadi salah satu isu internasional untuk menjaga lingkungan. Klimatologi berkaitan akan dampaknya bagi kelangsungan hidup penduduk dilihat dari perubahan iklim yang terjadi serta pola dan perilaku suatu penduduk. Klimatologi dilihat dari rata-rata temperatur, kelembaban, curah hujan, angin, dan tekanan atmosfer.

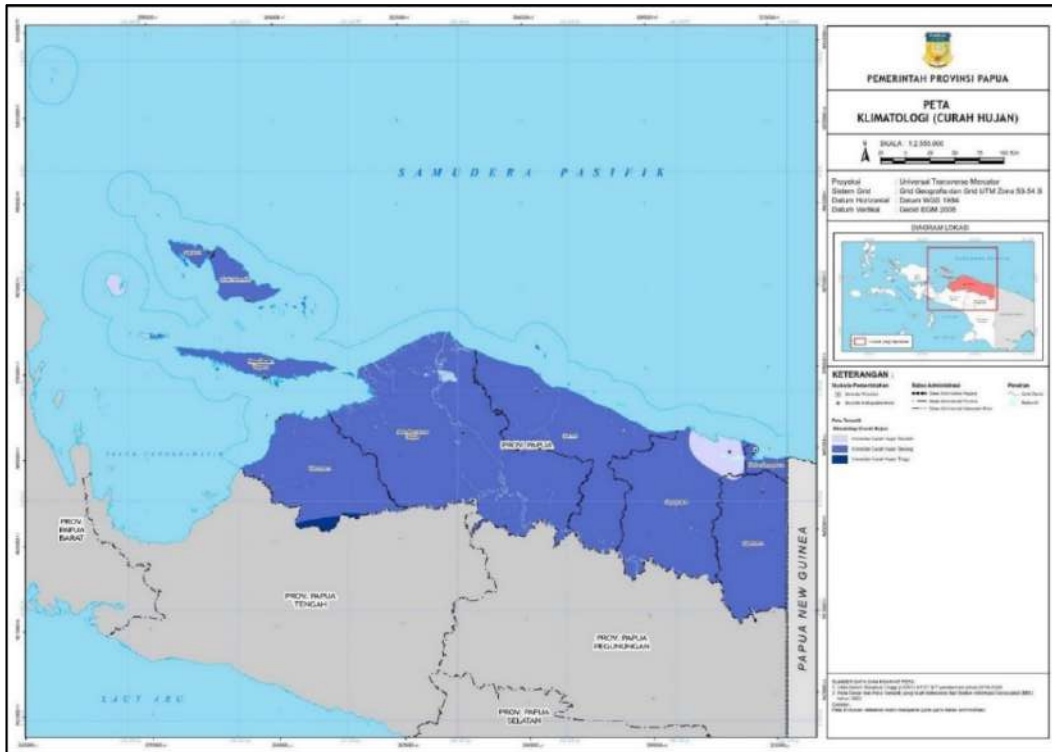
Hasil catatan pengamatan BMKG yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Sentani dalam mengamati unsur iklim sebagai komponen data klimatologi ditunjukkan pada Tabel 3.. Berdasarkan data tahun 2020-2022, diketahui bahwa rata-rata suhu dan tekanan udara tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan kelembaban serta kecepatan angin pada tahun 2022. Jumlah curah hujan dan hari penyinaran tertinggi terjadi pada tahun 2021 dan persentase penyinaran matahari tertinggi pada tahun 2020

Tabel 3.8 Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua Tahun 2020–20221

Unsur Iklim	2020			2021			2022		
	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.
Suhu (°C)	21,20	27,90	36,70	21,30	27,50	36,60	22,60	27,03	35,00
Kelembaban (%)	38,00	75,00	98,00	38,00	75,80	96,00	45,00	77,74	93,00
Kecepatan Angin (m/det)	calm	2,06	11,31	calm	3,50	31,00	0,00	4,06	24,00
Tekanan Udara(mb)	955,70	999,00	1.022,40	988,50	998,70	1.012,90	991,20	997,04	1.002,60
Jumlah Curah Hujan (mm)		1.501,50			2.028,30			217,40	
Jumlah Hari Hujan (hari)		217,00			221,00			25,00	
Penyinaran Matahari (%)		70,00			5,20			2,45	

Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam Provinsi Papua dalam Angka 2023

Gambar 3.6 Peta Klimatologi Provinsi Papua



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Papua

3.1.1.8. Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Provinsi Papua didominasi oleh peruntukkan hutan rimba sebesar 7.878.548,02 ha atau 95,28% terhadap luas wilayah provinsi. Tutupan lahan di Provinsi Papua selain hutan rimba meliputi badan air yang berupa air danau, air sungai dan air rawa sebesar 205.741,87 ha

(2,49%), bukit pasir sebesar 1.223,84 ha (0,015%), pelabuhan udara sebesar 753,26 ha (0,009%), permukiman sebesar 24.316,08 ha (0,29%), perkebunan sebesar 51.907,5 ha (0,63%), sawah sebesar 10.795,94 ha (0,13%), tegalan sebesar 14.714,49 ha (0,18%) dan semak belukar sebesar 80.835,33 ha (0,98%).

Gambar 3.7 Peta Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: Revisi RTRW Provinsi Papua, Tahun 2022

Tabel 3.9 Tutupan Lahan di Provinsi Papua Tahun 2022

Tutupan Lahan	Biak Numfor	Jayapura	Keerom	Kep. Yapen	Mamberamo Raya	Sarmi	Supiori	Waropen	Kota Jayapura	Grand Total
Air Danau/Situ	147.9	9,736.09	1.24	85.88	23,161.06	1,947.76	7.75	293.84	225.95	35,607.47
Air rawa	114.99	325.03	41.4		87,168.44	1,434.87		2,499.34	393.5	91,977.57
Air Tawar	41.8	8,053.29	3,281.83	3.37	50,055.65	10,364.59	5.47	5,899.04	451.79	78,156.83
Sungai										
Hutan Rimba	203,707.74	1,336,427.4	904,413.2	240,166.29	2,616,480.42	1,378,715.7	64,415.9	1,066,834.9	67,386.41	7,878,548.02
Pasir/Bukit					28.83			992.25		1,021.08
Pasir Darat										
Pasir/Bukit	92.39	1.71		44.43	5.91		58.01	0.93	0.38	203.76
Pasir Laut										
Pelabuhan Udara Domestik	227.93									227.93
Pelabuhan Udara Internasional	253.33									253.33
Pelabuhan Udara Perintis	41.61	146.11	11.01	50.75	11.83	5.2		5.49		272
Perkebunan/kebun	254.85	24,307.52	26,974.8			135.46	200.13		34.74	51,907.5
Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,943.33	5,622.88	4,032.09	1,802.32	510.38	2,267.09	637.25	962.14	4,538.6	24,316.08
Sawah	45.51	1,512.76	5,180.16	165.39				215.16	3,676.96	10,795.94
Semak Belukar/Alang-Alang	15,798.96	17,848.07	2,740.42	463.25	26,921.01	10,883.73	731.84	424.27	5,023.96	80,835.33
Tegalan/Ladang	1,331.35	4,280.74	5,955.35	60.53	3.55	1,147.59	12.95	85.54	1,836.89	14,714.49
Grand Total	226,001.7	1,408,261.6	952,631.5	242,842.21	2,804,347.07	1,406,902	66,069.3	1,078,212.9	83,568.99	8,268,837.31

Sumber: Keputusan Menteri KLHK Nomor: SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

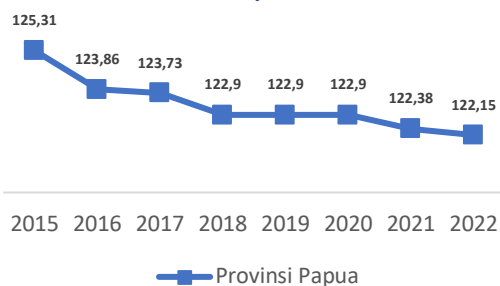
3.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Provinsi Papua dilalui oleh dua lempeng benua yaitu Australia dan Samudera Pasifik aktif serta dikelilingi dua samudera besar yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Papua secara geografis memiliki berbagai kerawanan akan bencana. Guna mengantisipasi bencana, diperlukan adanya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dapat bersifat preventif, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan. Provinsi Papua rawan terhadap bencana geologi berupa gempa bumi dan gerakan tanah. Pergerakan ini juga dapat menyebabkan tsunami yang dapat terjadi pada beberapa daerah rawan bencana tsunami seperti Pulau Biak, Yapen, dan bagian utara Kabupaten Waropen.

Pengukuran risiko bencana di Indonesia diukur melalui indeks risiko bencana yang dilihat berdasarkan tiga faktor utama yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Berdasarkan catatan yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi

Papua memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 122,15 pada tahun 2022. Hal ini menurun dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 122,38. Berdasarkan hal tersebut, Provinsi Papua berada dalam capaian “turun”, yang diartikan bahwa terjadi keberhasilan penurunan risiko bencana pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Papua. Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori risiko bencana “sedang” dengan perolehan skor total indeks risiko bencana berada pada rentang 13-144 sehingga dari tahun 2015-2022, Provinsi Papua berada dalam kelas risiko bencana “sedang”. Perolehan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di Provinsi Papua tahun 2015-2022.

Gambar 3.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Papua



Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB (data diolah)

Nilai indeks risiko per ancaman bencana di Provinsi Papua menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2022 berdasarkan Indeks Risiko Bencana 2022. Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi. Jenis bencana dengan risiko

kerawanan tinggi di Provinsi Papua antara lain adalah tanah longsor, banjir bandang, banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, tsunami, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, dan gelombang ekstrem.

Tabel 3.10 Nilai Indeks Risiko Per Ancaman Bencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022

No.	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Jayapura	203.20	Tinggi	Gempa Bumi	32.40	Tinggi
				Tsunami	14.40	Tinggi
				Karhutla	24.00	Tinggi
				Longsor	36.00	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	17.60	Tinggi
				Kekeringan	36.00	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	6.80	Sedang
2	Kepulauan Yapen	93.60	Sedang	Gempa Bumi	21.60	Tinggi
				Tsunami	24.00	Tinggi
				Karhutla	8.40	Sedang
				Longsor	25.20	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
				Kekeringan	20.80	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
3	Biak Numfor	138.40	Sedang	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	24.00	Tinggi
				Karhutla	25.20	Tinggi
				Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	20.00	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	6.80	Sedang
4	Sarmi	169.63	Tinggi	Banjir	33.18	Tinggi
				Gempa Bumi	13.27	Tinggi
				Tsunami	22.12	Tinggi
				Karhutla	15.48	Tinggi
				Longsor	23.23	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	18.80	Tinggi
				Kekeringan	28.76	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.32	Rendah
5	Keerom	127.20	Sedang	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Longsor	25.20	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
6	Waropen	140.00	Sedang	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	14.40	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
				Kekeringan	20.80	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	7.20	Sedang
7	Supiori	92.40	Sedang	Gempa Bumi	14.40	Tinggi
				Tsunami	6.40	Sedang
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	13.60	Tinggi
				Kekeringan	20.80	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
8	Mamberamo Raya	165.60	Tinggi	Gempa Bumi	21.60	Tinggi
				Tsunami	19.20	Tinggi
				Karhutla	16.80	Tinggi
				Longsor	16.80	Tinggi
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	20.40	Tinggi
				Kekeringan	31.20	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.60	Rendah
9	Kota Jayapura	114.40	Sedang	Banjir	18.52	Tinggi
				Gempa Bumi	11.11	Sedang
				Tsunami	8.23	Sedang

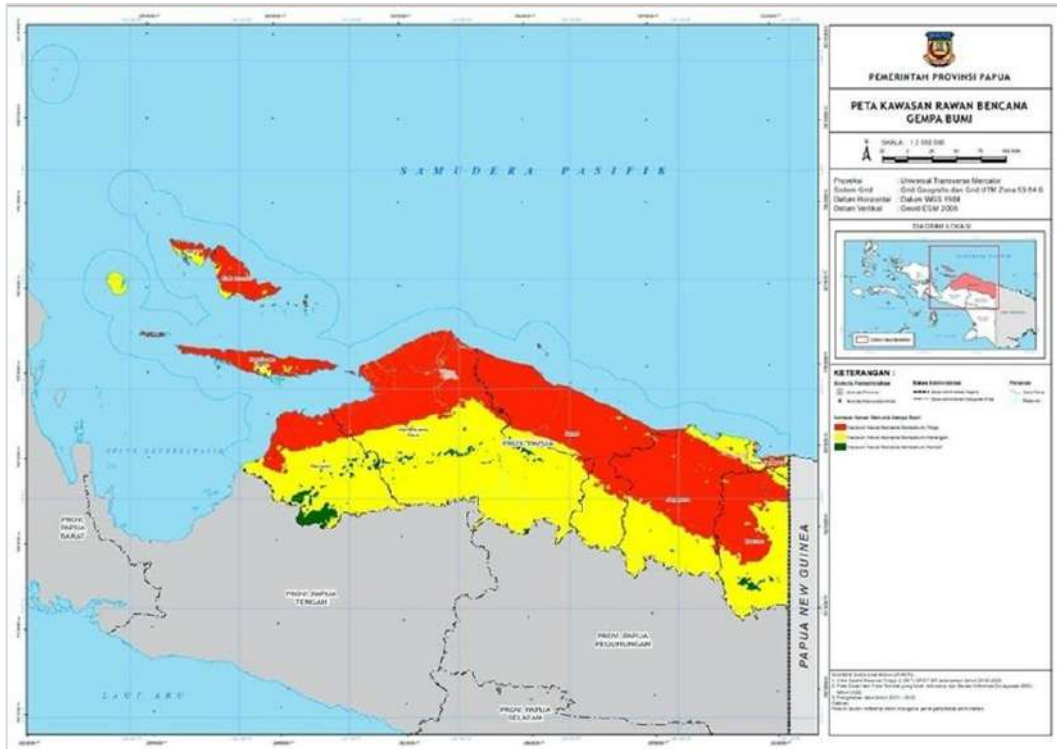
No.	Kabupaten	Nilai IRB	Kelas Risiko	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
				Karhutla	4.32	Rendah
				Longsor	8.64	Sedang
				Gelombang Ekstrim dan Abrasi	10.29	Sedang
				Kekeringan	16.05	Tinggi
				Cuaca Ekstrim	3.50	Rendah

Sumber: IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022, BNPB

Wilayah rawan bencana di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan beberapa jenis bencana yang terjadi di antaranya adalah gempa bumi, longsor, banjir, tsunami, kekeringan, dan

bencana alam lainnya yang berpotensi membawa bencana. Masing-masing jenis bencana dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 3.9 Peta Kawasan Rawan Bencana di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

a. Gempa Bumi

Provinsi Papua rawan gempa bumi akibat dari tatanan tektonik di Pulau New Guinea. Provinsi Papua juga termasuk dalam kategori wilayah rawan bencana gempa bumi dan tsunami berdasarkan kajian kerawanan bencana gempa bumi di Indonesia. Adapun tingkat kerawanan gempa bumi berada di jalur pegunungan tengah hingga bagian utara Pulau Papua tergolong menengah hingga tinggi dengan percepatan tanah maksimal. Berdasarkan catatan Balai BMKG wilayah V Jayapura, sebanyak lebih dari 2600 kali terjadi gempa bumi di Provinsi Papua pada tahun 1988-2007. Gempa bumi kuat dan dapat merusak berpusat di sekitar Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi, dan Jayapura.

Tabel 3.11 Wilayah dengan Bahaya Gempa Bumi

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH (ha)	PROPORSI (%)
1	Jayapura	667,913.15	19.94
2	Kepulauan Yapen	195,268.72	5.83
3	Biak Numfor	124.55	0.00
4	Sarmi	624,831.77	18.66
5	Keerom	36,642.82	1.09
6	Waropen	65,968.39	1.97
7	Supiori	30.85	0.00
8	Mamberamo Raya	1,698,934.93	50.73
9	Kota Jayapura	59,148.48	1.77
TOTAL		3,348,863.66	100

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Daerah rawan gempa bumi di Provinsi Papua berada di satu wilayah yaitu pulau Biak-Yapen yang secara umum berada di bagian utara pegunungan tengah Papua. Gempa bumi yang biasa terjadi adalah gempa tektonik yang terjadi akibat tubrukan dari dua lempeng. Gempa

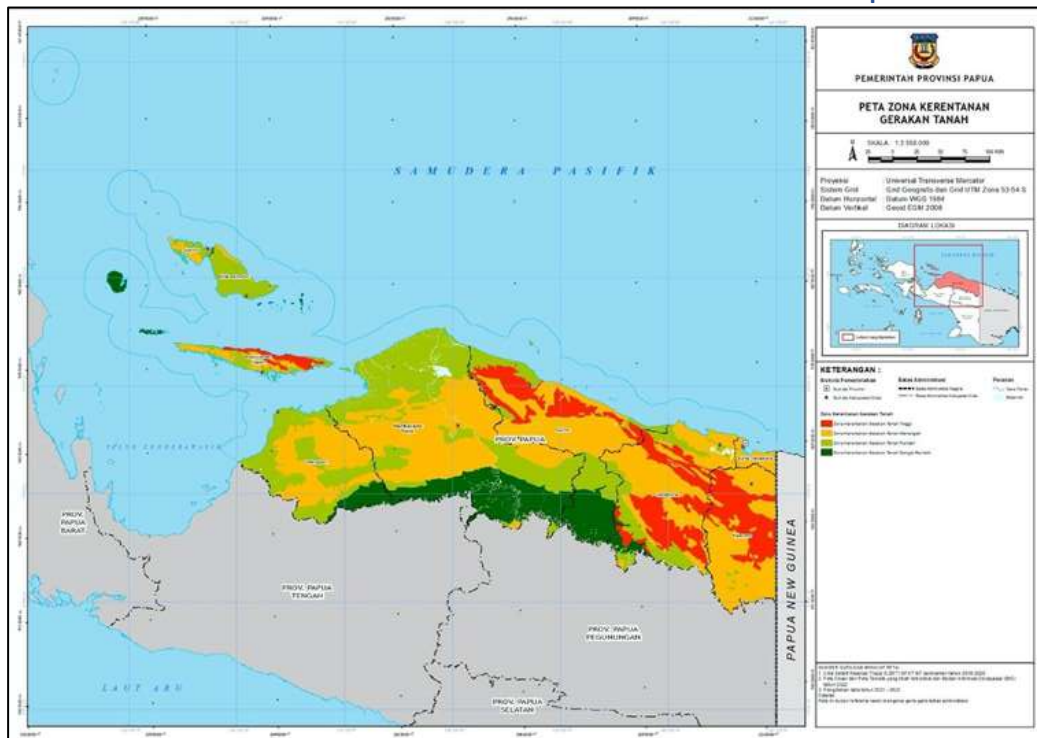
dangkal sering kali berhubungan dengan aktivitas sesar yang ada di jalur pegunungan tengah Papua. Gempa yang terjadi akibat pergerakan sesar Sorong secara berkelanjutan dirasakan di Pulau Biak dan Yapen serta dapat terjadi di darat dan di bawah laut.

b. Longsor

Longsor terbagi dalam 3 kategori yaitu zona kerentanan gerakan tanah tinggi, zona kerentanan gerakan tanah menengah, dan zona

kerentanan gerakan tanah rendah. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi merupakan daerah dengan tingkat kerentanan tinggi yang dapat terkena gerakan tanah. Zona kerentanan gerakan tanah menengah merupakan daerah dengan tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah dan zona kerentanan gerakan tanah rendah merupakan daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah.

Gambar 3.10 Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Provinsi Papua berada pada daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi khususnya pada jalur pegunungan tengah dan pegunungan utara Papua. Bahaya longsor tinggi di Provinsi Papua meliputi seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Jayapura menjadi wilayah dengan bahaya longsor tinggi terluas diikuti Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom. Proporsi bencana longsor tinggi di Provinsi Papua.

Tabel 3.12 Wilayah dengan Bahaya Bencana Longsor Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	219,388.10	51.68
2	Kepulauan Yapen	58,886.97	13.87
3	Biak Numfor		0.00
4	Sarmi	53,175.90	12.53

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
5	Keerom	87,688.31	20.66
6	Waropen	0	0.00
7	Supiori	0	0.00
8	Mamberamo Raya	3,044.21	0.72
9	Kota Jayapura	2,314.49	0.55
TOTAL		424,497.98	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

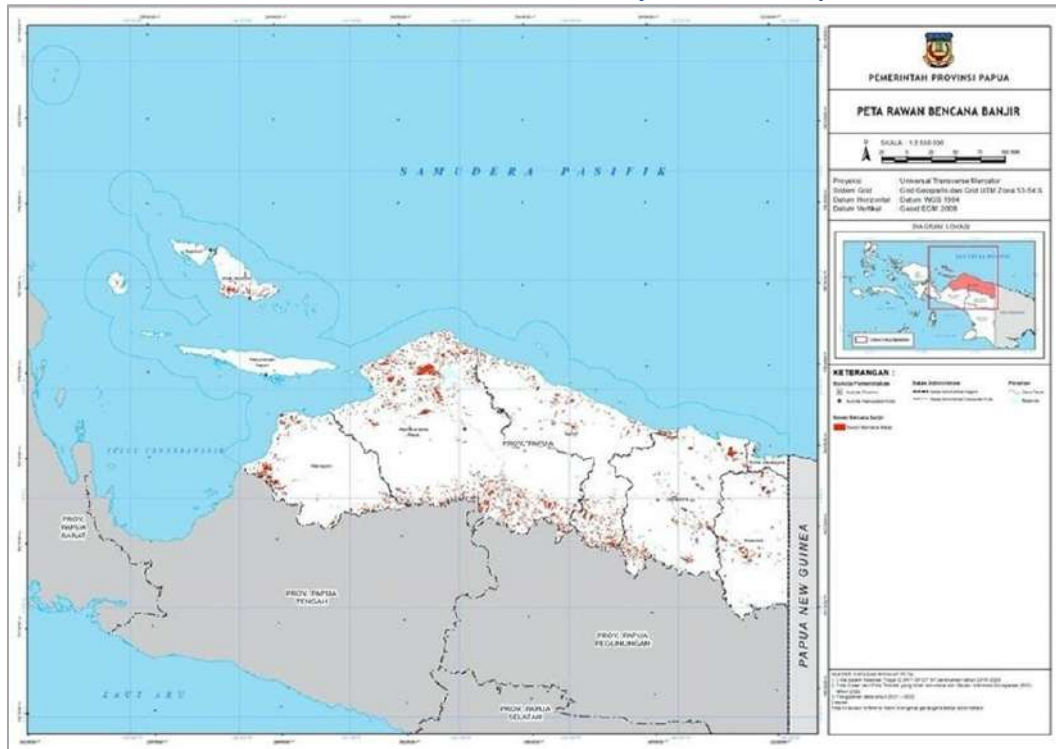
c. Banjir

Banjir terjadi akibat beberapa faktor di antaranya curah hujan yang tinggi dan lama, lokasi topografi yang cenderung datar dengan pola sungai berbelok-belok dan dataran banjir yang luas, keadaan tanah maupun batuan yang lambat dalam meresap air, dan kapasitas sungai yang penuh sehingga tidak memungkinkan untuk menampung dan mengalirkan air ke laut. Wilayah rawan banjir di Provinsi Papua berada di

bagian pesisir utara yaitu Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Mamberamo Raya, dan Waropen. Bahaya banjir tinggi terdapat pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua

dengan wilayah bahaya banjir terluas berada di Kabupaten Mamberamo Raya diikuti Kabupaten Sarmi dan Waropen. Proporsi bahaya banjir menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua .

Gambar 3.11 Peta Rawan Bencana Banjir di Provinsi Papua



Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

Tabel 3.13 Wilayah dengan Bahaya Bencana Banjir Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	48,859.59	8.24
2	Kepulauan Yapen	739.34	0.12
3	Biak Numfor	1,318.71	0.22
4	Sarmi	63,365.16	10.68
5	Keerom	26,972.71	4.55
6	Waropen	62,418.33	10.52
7	Supiori	282.66	0.05
8	Mamberamo Raya	385,285.77	64.95
9	Kota Jayapura	3,939.93	0.66
TOTAL		593,182.20	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

d. Tsunami

Provinsi Papua melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tahun 2006, mencatat kejadian tsunami di Provinsi Papua tepatnya di pulau Yapen pada tahun 1900, 1914, 1957, 1979, dan 1996. Wilayah rawan tsunami di Provinsi Papua diprediksi berada di bagian pesisir utara Papua termasuk semenanjung Wondama (Teluk Cenderawasih). Terdapat 8 kabupaten/kota dengan risiko tsunami tinggi di Provinsi Papua

yaitu Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mamberamo Raya, Sarmi, Supiori, Waropen, dan Kota Jayapura. Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki area rawan tsunami tinggi terluas diikuti Kepulauan Yapen dan Sarmi.

Tabel 3.14 Wilayah dengan Bahaya Tsunami Tinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Ha)	Proporsi (%)
1	Jayapura	503.16	2.37
2	Kepulauan Yapen	3,429.65	16.13
3	Biak Numfor	2,749.78	12.93
4	Sarmi	3,062.08	14.40
5	Keerom	1,171.63	5.51
6	Waropen	1,812.36	8.52
7	Supiori	7,886.21	37.09
8	Mamberamo Raya	544.89	2.56
9	Kota Jayapura	503.16	2.37
TOTAL		21,159.76	100

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042

e. Kekeringan

Kekeringan dapat terjadi ketika terjadinya musim kemarau berkepanjangan. Beberapa

dampak langsung yang dapat dirasakan dari kekeringan adalah produksi pangan yang semakin berkurang dan kegiatan ekonomi masyarakat yang terganggu. Bahan pangan yang cenderung sulit didapatkan pada masa kemarau mengakibatkan harganya menjadi mahal. Selain itu, air bersih menjadi sulit didapatkan dan hewan dapat mati dan menimbulkan wabah penyakit.

Provinsi Papua memiliki bahaya kekeringan pertanian yang lebih menonjol dibandingkan dengan jenis kekeringan lainnya. Bahaya kekeringan pertanian di Provinsi Papua sering ditemukan di pegunungan yang memiliki topografi tinggi dan curam serta memiliki kondisi dan perubahan cuaca yang sangat ekstrem namun dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Wilayah rawan kekeringan di Provinsi Papua masih belum dipetakan secara lebih rinci dan lengkap karena informasinya lebih banyak berasal dari instansi teknis pertanian. Informasi mengenai penyebab dan antisipasi penanganan bahaya kekeringan masih belum tertangani dengan baik.

f. Bencana Alam Lainnya

Bencana lain yang dapat terjadi dan mengancam serta memiliki risiko tinggi di antaranya adalah banjir bandang, wilayah dataran rendah dan wilayah pegunungan.

3.1.1.10. Potensi Pengembangan Wilayah
Skenario pengembangan wilayah provinsi Papua, dibagi dalam 3 (tiga) wilayah pengembangan, yang meliputi:

- a. **Wilayah pengembangan I**, meliputi wilayah Jayapura dan sekitarnya dengan fokus pengembangan, yaitu (1) Kabupaten Keerom dengan pertanian (food estate, tanaman pangan dan perkebunan) dan pertambangan; (2) Kabupaten Sarmi dengan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan kelapa dalam (PICO/Papua Home industri Coconut Oil); (3) Kabupaten Jayapura dengan pertanian dan industri; serta (4) Kota Jayapura sebagai pusat perdagangan, jasa dan pariwisata;
- b. **Wilayah pengembangan II**, yaitu: (1) Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat perikanan, industri pengolahan perikanan dan wisata bahari; serta (2) Kabupaten Supiori dengan pengembangan perikanan dan pariwisata; dan
- c. **Wilayah pengembangan III**, yaitu: (1) Kabupaten Mamberamo Raya dengan pengolahan hasil hutan, pertanian dan Pariwisata; serta (2) Kabupaten Waropen meliputi pariwisata, perikanan dan pertanian serta potensi pertambangan.

Gambar 3.12 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Papua



3.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk Provinsi Papua, jumlah penduduk di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2022. Pada hasil sensus penduduk tahun 2010 tercatat jumlah penduduk Provinsi Papua adalah sebesar 534.050 jiwa, kemudian meningkat lagi pada sensus tahun 2010 menjadi 718.782 jiwa. Pada hasil sensus tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Papua mencapai 1.008.086 jiwa. Sedangkan, hasil proyeksi Sensus menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Papua pada tahun 2023 sebanyak 1,05 juta jiwa.

Tabel 3.15 Hasil Sensus Penduduk Provinsi Papua 2000, 2010, dan 2020

Kabupaten/Kota	2000	2010	2020
Jayapura	167.227	111.943	166.171
Kepulauan Yapen	81.593	82.951	112.676
Biak Numfor	111.092	126.798	134.650
Sarmi	-	32.971	41.515
Keerom	-	48.536	61.623
Waropen	-	24.639	33.943
Supiori	-	15.874	22.547

Kabupaten/Kota	2000	2010	2020
Mamberamo Raya	-	18.365	36.483
Kota Jayapura	174.138	256.705	398.478
Provinsi Papua	534.050	718.782	1.008.086

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

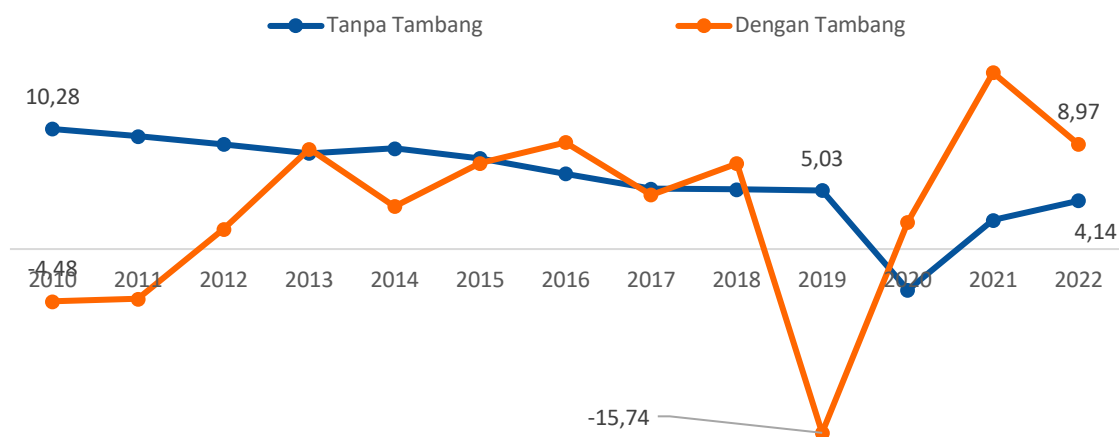
Pada tahun 2023, persebaran penduduk di Provinsi Papua didominasi di Kota Jayapura sebanyak 39,62 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Provinsi Papua didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 62,59 persen.

3.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (AKM)

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha untuk mengidentifikasi sektor basis dan PDRB ADHK digunakan untuk melihat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3.13 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Berdasarkan gambar diatas. diketahui bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHK dengan tambang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 15,11%, walaupun di tahun 2022 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan menjadi 8,97%. Sedangkan, laju pertumbuhan PDRB

tanpa tambang mengalami penurunan pada 2010-2020 hingga mencapai -3,40% dan mengalami peningkatan pada 2020-2022 menjadi 4,14%.

3.2.2. Struktur Ekonomi

Adapun perkembangan PDRB ADHK Tanpa Tambang menurut lapangan usaha di

Provinsi Papua ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16 PDRB ADHK Tanpa Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2018-2022 (Rp.Miliar)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.577.205	16.617.847	16.496.259	16.754.976	17.133.418
B Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C Industri Pengolahan	3.048.372	3.010.357	2.859.434	2.853.499	2.855.820
D Pengadaan Listrik dan Gas	51.921	55.485	54.950	58.121	62.033
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83.930	81.116	78.782	81.789	86.581
F Konstruksi	17.139.236	18.689.442	18.531.082	19.257.532	20.158.246
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.662.034	13.473.789	13.129.135	13.888.814	14.543.064
H Transportasi dan Pergudangan	6.825.159	7.231.602	4.799.334	5.090.760	5.948.661
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.056.636	1.113.666	925.148	938.469	976.447
J Informasi dan Komunikasi	5.485.887	5.887.489	6.106.728	6.295.318	6.639.241
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.180.430	2.273.745	2.240.425	2.293.479	2.409.122
L Real Estate	3.746.188	3.974.607	3.965.361	4.247.215	4.449.454
M,N Jasa Perusahaan	1.768.814	1.888.211	1.744.314	1.778.496	1.844.324
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.231.851	13.716.326	13.690.532	13.561.131	13.876.902
P Jasa Pendidikan	3.192.964	3.406.329	3.384.494	3.227.353	3.273.861
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.377.349	2.492.202	2.587.409	2.619.669	2.620.862
R,S,T,U Jasa lainnya	1.650.034	1.745.166	1.689.099	1.748.966	1.801.711
PDRB Papua	91.078.010	95.657.379	92.282.487	94.695.587	98.679.745

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Tabel 3.17 Distribusi PDRB ADHK Tanpa Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2018-2022 (Persen)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Gerata
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,20	17,37	17,88	17,69	17,36	17,70
B Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
C Industri Pengolahan	3,35	3,15	3,10	3,01	2,89	3,10
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
F Konstruksi	18,82	19,54	20,08	20,34	20,43	19,84
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,90	14,09	14,23	14,67	14,74	14,32
H Transportasi dan Pergudangan	7,49	7,56	5,20	5,38	6,03	6,33
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,16	1,16	1,00	0,99	0,99	1,06
J Informasi dan Komunikasi	6,02	6,15	6,62	6,65	6,73	6,43
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2,39	2,38	2,43	2,42	2,44	2,41
L Real Estate	4,11	4,16	4,30	4,49	4,51	4,31
M,N Jasa Perusahaan	1,94	1,97	1,89	1,88	1,87	1,91
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,53	14,34	14,84	14,32	14,06	14,42
P Jasa Pendidikan	3,51	3,56	3,67	3,41	3,32	3,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,61	2,61	2,80	2,77	2,66	2,69
R,S,T,U Jasa lainnya	1,81	1,82	1,83	1,85	1,83	1,83

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Berdasarkan PDRB ADHK Tanpa Tambang menurut lapangan usaha di Provinsi Papua tahun 2018-2022, diketahui bahwa sektor konstruksi menjadi sektor dengan distribusi tertinggi (19,84%) yang diikuti dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (17,70%), kemudian

perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (14,32%), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (14,42%). Selanjutnya, perkembangan PDRB ADHK Dengan Tambang Provinsi Papua pada tabel berikut:

Tabel 3.18 PDRB ADHK Dengan Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2018-2022 (Rp.Miliar)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.602.562	16.608.106	16.496.259	16.754.976	17.133.418
B Pertambangan dan Penggalian	68.611.175	38.925.046	45.395.084	63.915.452	74.225.102
C Industri Pengolahan	3.048.372	3.010.408	2.859.434	2.853.499	2.855.820
D Pengadaan Listrik dan Gas	51.921	55.485	54.950	58.121	62.033
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	83.930	81.116	78.782	81.789	86.581
F Konstruksi	17.139.236	18.689.442	18.531.082	19.257.532	20.158.246
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.659.356	13.463.341	13.129.135	13.888.814	14.543.064
H Transportasi dan Pergudangan	6.825.146	7.231.554	4.799.334	5.090.760	5.948.661
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.056.636	1.113.666	925.148	938.469	976.447
J Informasi dan Komunikasi	5.485.887	5.887.489	6.106.728	6.295.318	6.639.241
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.180.430	2.273.745	2.240.425	2.293.479	2.409.122
L Real Estate	3.746.188	3.974.607	3.965.361	4.247.215	4.449.454
M,N Jasa Perusahaan	1.768.814	1.888.211	1.744.314	1.778.496	1.844.324
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.231.851	13.716.326	13.690.532	13.561.131	13.876.902
P Jasa Pendidikan	3.192.964	3.406.329	3.384.494	3.227.353	3.273.861
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.377.349	2.492.202	2.587.409	2.619.669	2.620.862
R,S,T,U Jasa lainnya	1.650.034	1.745.166	1.689.099	1.748.966	1.801.711
PDRB Papua	159.711.853	134.562.240	137.677.571	158.611.039	172.904.848

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Berdasarkan PDRB ADHK Dengan Tambang Menurut Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor dengan kontribusi rata-rata terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian

(37,62%) yang diikuti dengan sektor Konstruksi (12,38%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (11,04%), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (9%)

Tabel 3.19 Distribusi PDRB ADHK Dengan Tambang Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rerata
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,40	12,34	11,98	10,56	9,91	11,04
B Pertambangan dan Penggalian	42,96	28,93	32,97	40,30	42,93	37,62
C Industri Pengolahan	1,91	2,24	2,08	1,80	1,65	1,93
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05
F Konstruksi	10,73	13,89	13,46	12,14	11,66	12,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,93	10,01	9,54	8,76	8,41	8,93
H Transportasi dan Pergudangan	4,27	5,37	3,49	3,21	3,44	3,96
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,66	0,83	0,67	0,59	0,56	0,66
J Informasi dan Komunikasi	3,43	4,38	4,44	3,97	3,84	4,01
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,37	1,69	1,63	1,45	1,39	1,50

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	Erata
L	Real Estate	2,35	2,95	2,88	2,68	2,57	2,69
M,N	Jasa Perusahaan	1,11	1,40	1,27	1,12	1,07	1,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,28	10,19	9,94	8,55	8,03	9,00
P	Jasa Pendidikan	2,00	2,53	2,46	2,03	1,89	2,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,85	1,88	1,65	1,52	1,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,03	1,30	1,23	1,10	1,04	1,14

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

3.2.3. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu metode atau indikator untuk menunjukkan tingkat ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran masyarakat pada suatu wilayah tertentu. Semakin kecil rasio gini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi semakin menurun antar masyarakat. Sebaliknya semakin tinggi rasio gini, menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi

antar masyarakat semakin tinggi. Tahun 2011 menjadi tahun dengan rasio gini terendah di Provinsi Papua yaitu sebesar 0,274. Sementara tahun 2013 menjadi tahun dengan capaian rasio gini tertinggi yaitu sebesar 0,442. Tercatat bahwa indeks gini pada mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2023 masih berada di bawah garis provinsi terkecuali pada Kabupaten Waropen.

Gambar 3.14 Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2007-2023



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

3.2.4. Tingkat Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Berdasarkan data statistik Provinsi Papua selama lima tahun terakhir, secara keseluruhan 9 kabupaten/kota di Papua memiliki capaian angka kemiskinan yang semakin membaik.

Sampai dengan tahun 2022, terdapat beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan diatas 20% diantaranya adalah Kabupaten Supiori (37,70%), Mamberamo Raya (0,73%), Waropen (30,22%), Kepulauan Yapen (26,15%), dan Biak Numfor (24,48%). Sedangkan daerah lainnya memiliki

tingkat kemiskinan dibawah rata-rata Provinsi Papua, seperti Kota Jayapura (11,12%), Kabupaten Jayapura (11,94%),armi (13,76%), dan Keerom (15,77%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Penduduk di Provinsi Papua

Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Jayapura	13,44	13,13	12,44	12,13	11,94
Kep. Yapen	27,17	27,13	26,3	26,09	26,15
Biak Numfor	25,72	25,5	24,57	24,45	24,48
Sarmi	14,51	14,41	13,87	13,84	13,76
Keerom	16,9	16,83	16,32	16	15,77
Waropen	30,53	30,95	29,54	29,85	30,22
Supiori	39,22	38,79	36,91	37,91	37,7
Mamb. Raya	30,1	29,13	28,38	28,78	30,73
Kota Jayapura	11,37	11,49	11,16	11,39	11,12

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) kabupaten di Provinsi Papua yang termasuk dalam daftar Daerah Tertinggal, yaitu Kab. Keerom dan Kab. Mamberamo Raya di wilayah adat Mamta serta Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori di wilayah adat Saireri. Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat 5 (lima) penyebab ketertinggalan yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah/daerah tertentu.

Tabel 3.21 Daerah Tertinggal dan Penyebab Utama Ketertinggalan di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Penyebab Utama Ketertinggalan (Menurut Urutan)				
		1	2	3	4	5
1	Keerom	Aksesibilitas	Ekonomi	Kuangan	SDM	
	Mamberamo Raya	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM		
2	Waropen	Aksesibilitas	Ekonomi	SDM	Karakteristik	Kuangan
	Supiori	Ekonomi	Aksesibilitas	Kuangan	Karakteristik	SDM

Sumber: *Strategis Daerah, Tahun 2022*

Dalam hal ini, penyebab utama ketertinggalan untuk setiap kabupaten ditampilkan dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi telah menetapkan 54 kampung di Provinsi Papua sebagai kampung yang diprioritaskan dalam sasaran pembangunan kampung dan pembangunan daerah tertinggal serta daerah transmigrasi yang terdiri dari 8 (delapan) kampung dengan status Berkembang dan 46 kampung dengan status tertinggal.

Tabel 3.22 Kampung Prioritas Sasaran Pembangunan Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Wilayah Adat	Kab/Kota	Distrik	Kampung	Status Perkembangan
MAMTA	Keerom	Web	Umuaf	Tertinggal
	Keerom	Web	Dubu	Tertinggal
	Keerom	Web	Yuruf	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Molof	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Senggi	Berkembang
	Keerom	Senggi	Warlef	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Jabanda	Tertinggal
	Keerom	Senggi	Woslay	Berkembang
	Keerom	Waris	Kalimo	Tertinggal
	Keerom	Waris	Yuwainda	Tertinggal
	Keerom	Waris	Banda	Tertinggal
	Keerom	Waris	Kalifam	Tertinggal
	Keerom	Waris	Ampas	Tertinggal
	Keerom	Arso	Sawyatami	Tertinggal
	Keerom	Arso	UPT Pir III / Bagia	Tertinggal
	Keerom	Arso	Ubiyau	Tertinggal
	Keerom	Arso	Asiaman	Berkembang
	Keerom	Arso Timur	Kriku	Tertinggal
	Keerom	Skanto	UPT Arso XIV / Wulukubun	Berkembang
	Keerom	Skanto	Arsopura	Berkembang

Wilayah Adat	Kab/Kota	Distrik	Kampung	Status Perkembangan
	Keerom	Skanto	UPT Arso IX / Intaimilyan	Tertinggal
	Mamb. Raya	Waropen Atas	Barapasi	Tertinggal
	Mamb. Raya	Mamberamo Ilir	Trimuris	Tertinggal
	Mamb. Raya	Mamberamo Ilir	Warembori	Tertinggal
	Mamb. Raya	Mamberamo Tengah	Burmeso	Berkembang
	Mamb. Raya	Mamberamo Ulu	Dabra	Tertinggal
SAERERI	Waropen	Waropen Bawah	Sawara Jaya SP VI	Berkembang
	Waropen	Waropen Bawah	Waren Satu	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Waren Dua	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Sarafambai	Tertinggal
	Waropen	Waropen Bawah	Nonomi	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Awaso	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Soimiangga	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Harapan Jaya SP II	Tertinggal
	Waropen	Inggerus	Demisa SP III	Tertinggal
	Waropen	Urei Faisei	Kemon Jaya SP V	Tertinggal
	Waropen	Urei Faisei	Apainabo	Tertinggal
	Waropen	Oudate	Botawa	Berkembang
	Waropen	Kirihi	Dairi	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	SooH	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Diwa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kawari	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Kuaisa	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Foida	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Dirou	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Antu Aru	Tertinggal
	Waropen	Kirihi	Wauka	Tertinggal
	Supiori	Supiori Selatan	Biniki	Tertinggal
	Supiori	Kep. Aruri	Rayori	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warsa	Tertinggal
	Supiori	Supiori Utara	Warbor	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Koiryakam	Tertinggal
	Supiori	Supiori Barat	Wayori	Tertinggal
	Supiori	Supiori Timur	Douwbo	Tertinggal

Sumber: Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No 126 Tahun 2017

Gambar 3.15 Sebaran Lokus Daerah Tertinggal Tahun 2020-2040

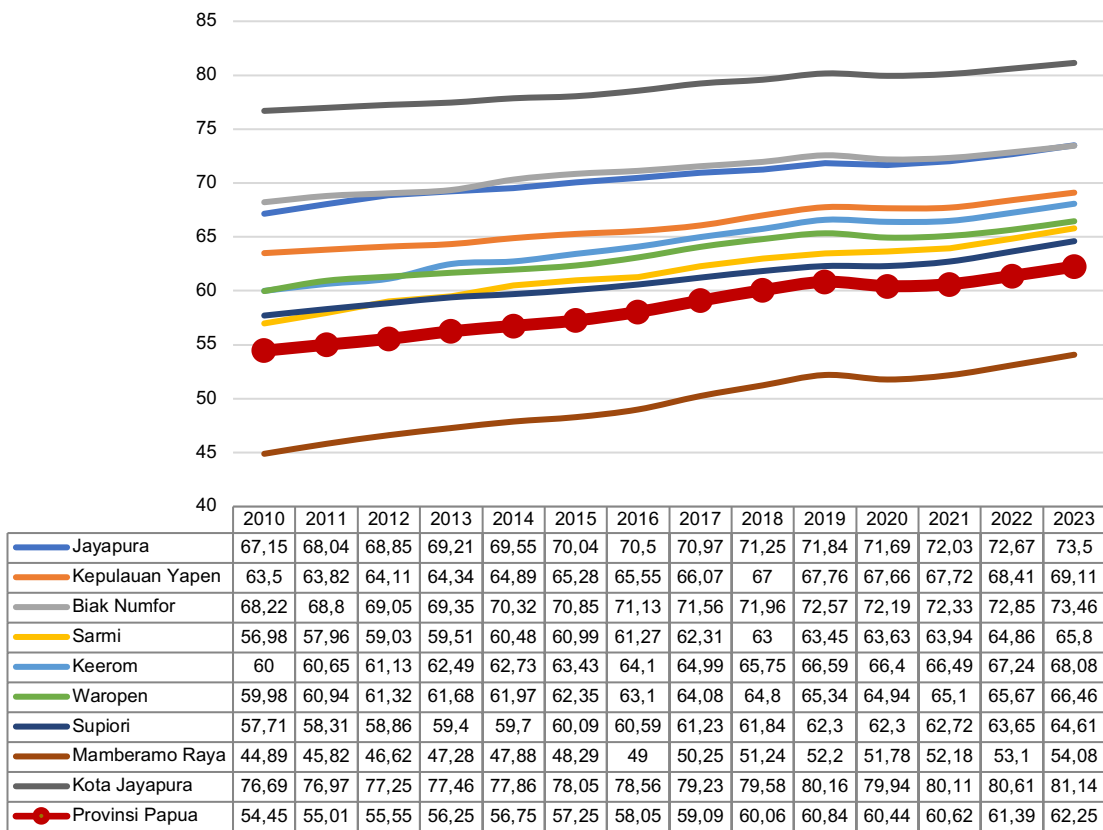


3.2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia. IPM dihitung berdasarkan 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan layak. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia pada kurun waktu 2010-2022. Hal tersebut membuat Provinsi Papua kini berstatus

“sedang” dari status sebelumnya “rendah”. Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Papua yang memiliki IPM tertinggi pada tahun 2010-2022, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua sekaligus berada di bawah garis provinsi. IPM di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota dari tahun 2010-2022 ditunjukkan pada gambar berikut ini:

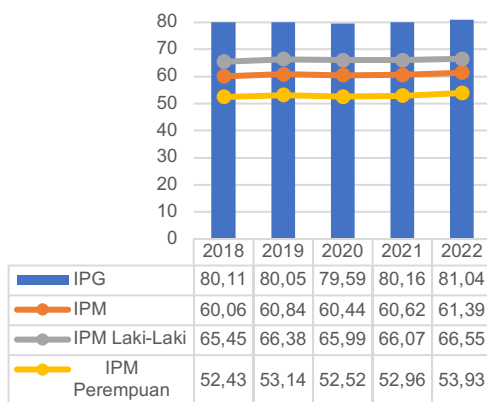
Gambar 3.16 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IPM Provinsi Papua berdasarkan gender ditunjukkan pada Gambar 3.17 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua Tahun 2018-2022.

Gambar 3.17 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Gender dan IPG di Provinsi Papua Tahun 2018-2022



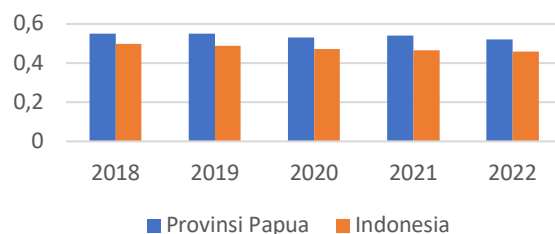
Sumber: BPS RI, 2023 (data diolah)

IPM di Provinsi Papua pada tahun 2018-2022 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Kesenjangan pencapaian pembangunan

manusia antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan di Provinsi Papua digambarkan melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Diketahui juga bahwa IPG di Provinsi Papua masih berada di bawah angka 100 yang diartikan bahwa capaian Perempuan masih lebih rendah dibandingkan capaian laki-laki.

Gambar 3.18 Indeks Ketimpangan Gender di Provinsi Papua Tahun 2018-2022

Sumber: BPS RI, (data diolah)



Hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami peningkatan IPG menuju 100 yang menunjukkan semakin berkurangnya ketimpangan yang terjadi antara Perempuan dan laki-laki di Provinsi Papua. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Provinsi Papua

menunjukkan penurunan yang diartikan bahwa kesetaraan gender semakin membaik di Provinsi Papua.

3.2.6. Angka Harapan Hidup

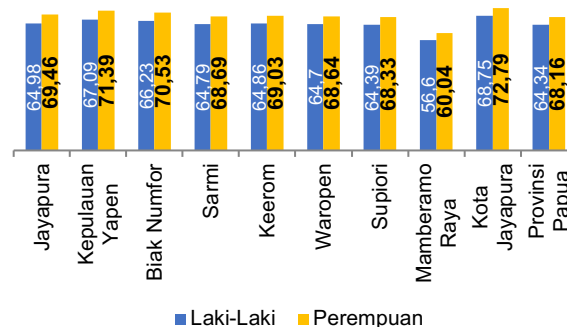
AHH merupakan indikator penting dalam kesehatan yang dapat mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat umum pada waktu tertentu di level dampak sehingga AHH merupakan gambaran keadaan kesehatan di suatu wilayah. Faktor-faktor penentu tinggi rendahnya AHH antara lain angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, ketersediaan pelayanan kesehatan, dan kondisi sosio-ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, AHH menjadi komponen di bidang kesehatan dalam menentukan angka Indeks Pembangunan Manusia. Semakin tinggi AHH menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.

AHH baik secara provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun 2017-2022. Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Jayapura dengan tingkat AHH tertinggi, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah di Provinsi Papua. Terdapat beberapa kabupaten dengan AHH di bawah garis

provinsi pada tahun 2022 di antaranya adalah Kabupaten Sarmi, Waropen, Supiori, dan Mamberamo Raya.

Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan tingkat AHH tertinggi pada tahun 2022 untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan diikuti Kabupaten Kepulauan Yapen.

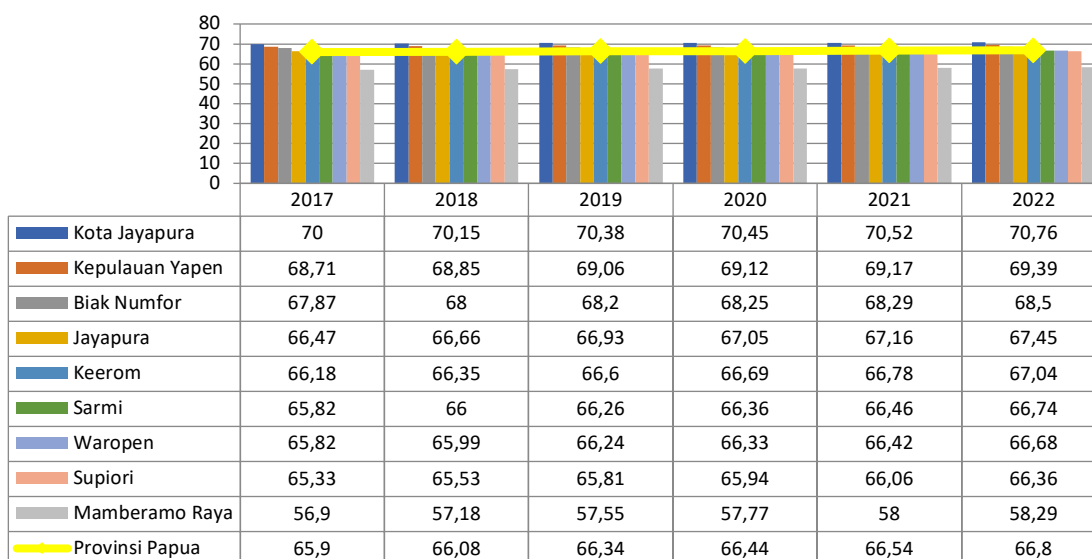
Gambar 3.19 Angka Harapan Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/ Kota Provinsi Papua Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan AHH terendah pada tahun 2022 di Provinsi Papua untuk kedua jenis kelamin. Berdasarkan gambar juga diketahui bahwa AHH pada tahun 2022 didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

Gambar 3.20 Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

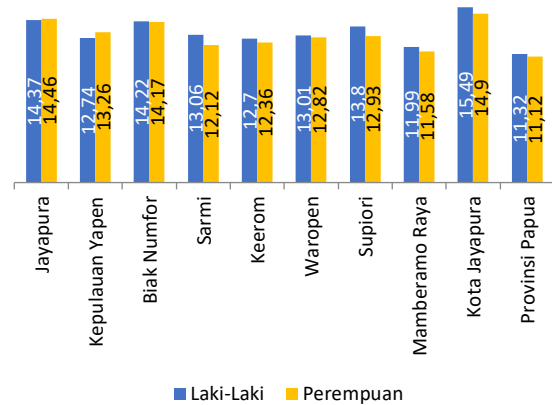
3.2.7. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua dapat dilihat secara umum maupun berdasarkan jenis kelamin. HLS Provinsi Papua secara umum digunakan untuk melihat lamanya tahun bersekolah yang diharapkan dapat kemudian hari dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas.

Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan suatu indikator untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk yang berada di usia sekolah oleh pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar, HLS dihitung bagi penduduk dari usia 7 tahun ke atas.

HLS di Provinsi Papua mengalami peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Hal tersebut membuktikan bahwa Provinsi Papua secara terus menerus meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan bagi penduduk usia sekolah di atas 7 tahun di Provinsi Papua. Kenaikan secara Provinsi juga sudah diikuti dengan kenaikan HLS pada masing-masing kabupaten/kota yang ada.

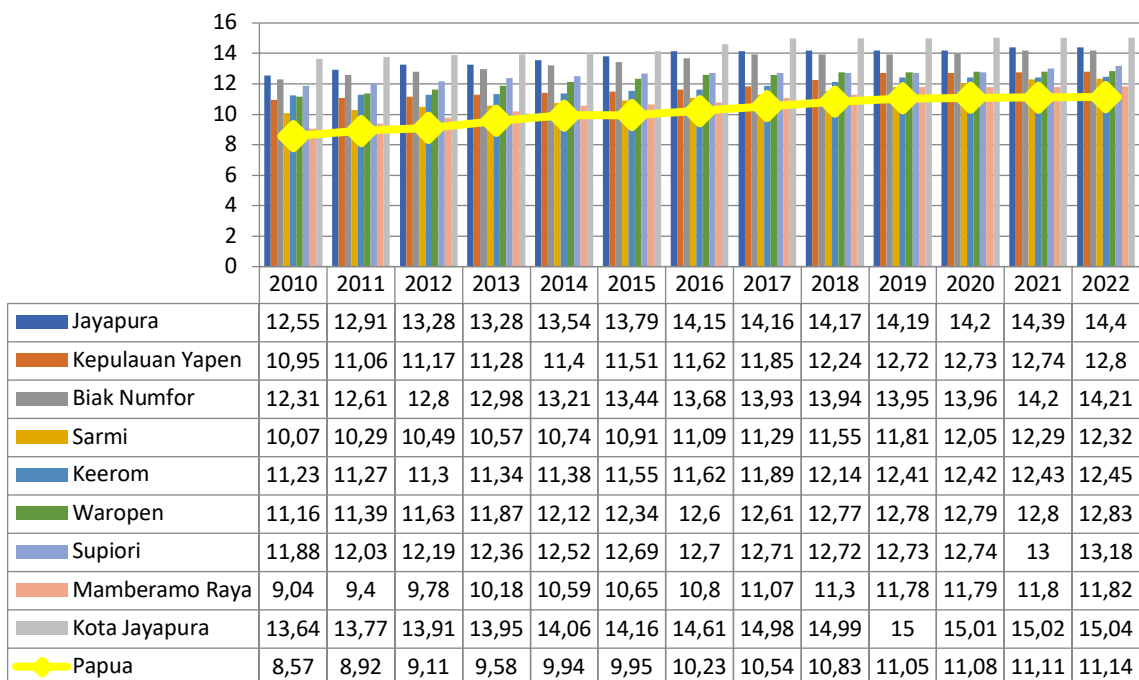
Gambar 3.21 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Diketahui bahwa, Kota Jayapura menjadi kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan angka HLS tertinggi untuk kedua jenis kelamin diikuti Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten di Provinsi Papua dengan angka HLS terendah pada tahun 2022. Angka HLS berdasarkan gender pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua diketahui telah berada di atas rata-rata provinsi.

Gambar 3.22 Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

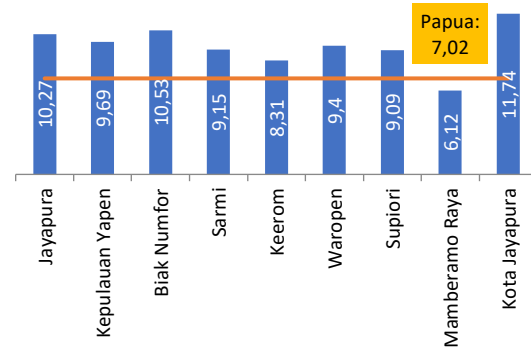
3.2.8. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan perhitungan jumlah tahun oleh penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, dan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua berada di atas rata-rata Provinsi. Masih terdapat kabupaten dengan RLS di bawah rata-rata Provinsi Papua yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. RLS tertinggi di Provinsi Papua adalah Kota Jayapura.

RLS di Provinsi Papua menurut masing-masing kabupaten/ kota mengalami peningkatan selama lebih dari 10 tahun terakhir. Secara kabupaten/kota, Kota Jayapura memiliki RLS tertinggi selama lebih dari 10 tahun terakhir namun hal tersebut belum diikuti oleh Kabupaten Mamberamo Raya yang memiliki RLS masih di bawah RLS Provinsi Papua.

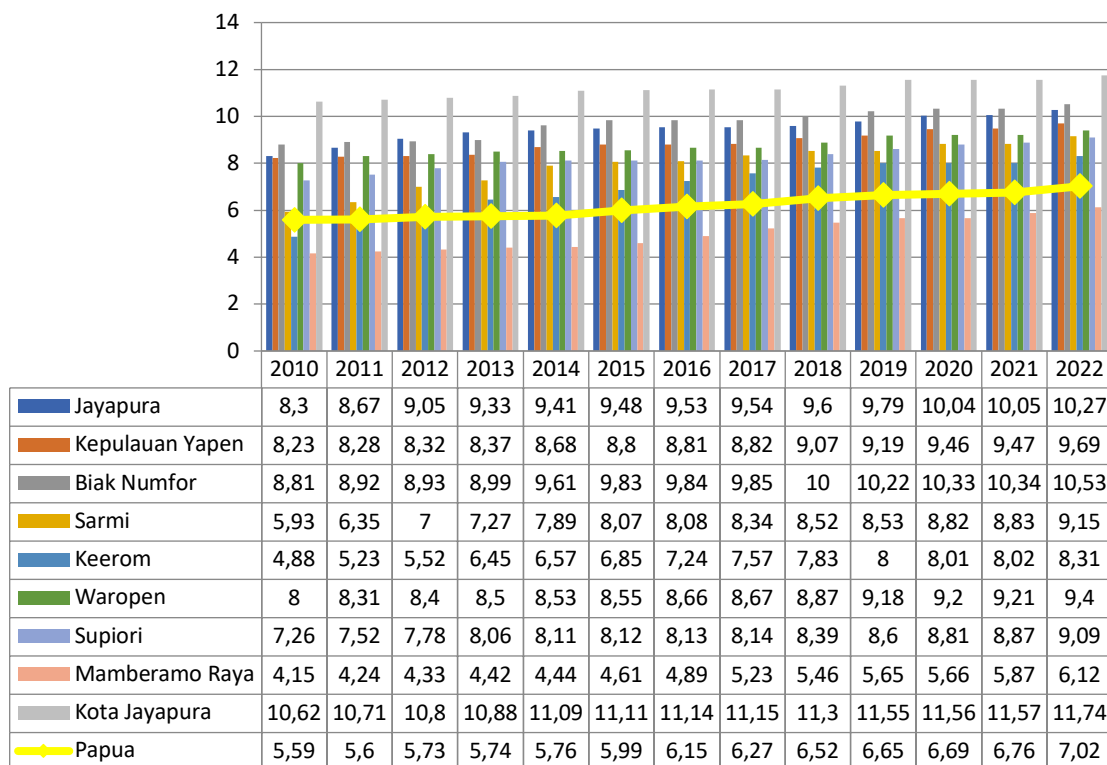
Gambar 3.23 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

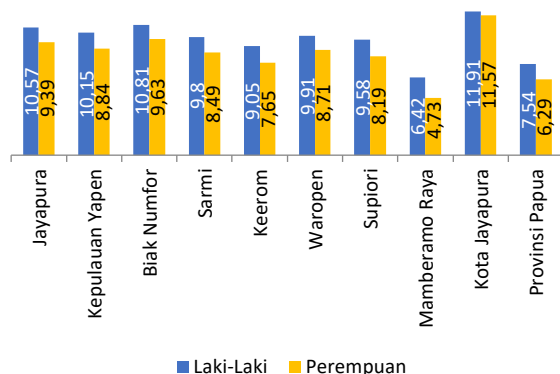
Rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Papua berdasarkan gender. Angka RLS tertinggi di Provinsi Papua untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tahun 2022 adalah Kota Jayapura. Sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan RLS berdasarkan gender terendah di Provinsi Papua. Kabupaten Mamberamo Raya juga menjadi kabupaten dengan capaian RLS yang masih berada di bawah garis rata-rata secara provinsi.

Gambar 3.24 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua 2010-2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Gambar 3.25 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2022 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Jenis kelamin laki-laki cenderung mendominasi perolehan RLS berdasarkan gender di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Apabila dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, Kota Jayapura cenderung memiliki capaian RLS yang hampir serupa untuk kedua jenis kelamin.

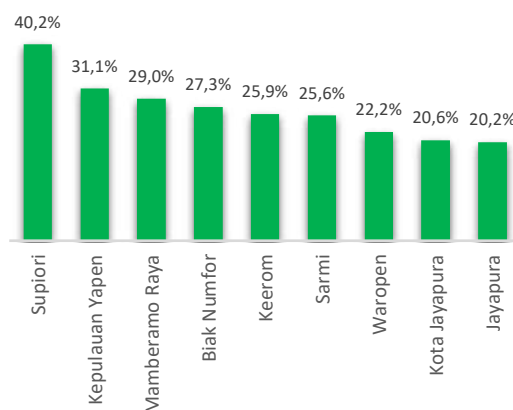
3.2.9. Prevalensi Stunting

Stunting adalah keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek berdasarkan tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga berusia 2 tahun, atau disebut 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi balita stunting di 9 kabupaten di Provinsi Papua rata-rata sebesar 26,9%. Tidak tersedia angka prevalensi untuk Provinsi Papua pasca pembentukan DOB, sebab survey dilakukan sebelum pemekaran provinsi. Berdasarkan kabupaten, prevalensi tertinggi

balita stunting terdapat di Kabupaten Supiori yakni 40,2%, dan terendah di Kabupaten Jayapura sebesar 20,2%. Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, hanya Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura yang angka balita stuntingnya di bawah angka nasional, 21,6%. Tujuh kabupaten lainnya menunjukkan prevalensi di atas angka nasional.

Gambar 3.26 Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2022



3.3. ASPEK PELAYANAN UMUM (APU)

3.3.1. Pendidikan

3.3.1.1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Papua sepanjang tahun 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi. Angka Partisipasi Kasar SD Provinsi Papua mengalami peningkatan sejak tahun 2021 sebesar 93,07% menjadi 94,26% ditahun 2022. Sementara pada tingkat SMP dimana pada tahun 2019 sebesar 78,11% menjadi 83,51% di tahun 2022. Sementara pada tingkat SMA pada tahun 2019 sebesar 76,33% mengalami peningkatan menjadi 77,06% pada tahun 2022.

Tabel 3.23. Angka Partisipasi Kasar Provinsi Papua Tahun 2019-2023

APK	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI/Paket A	91,94	91,27	93,07	94,26	91,10
SMP/MTs/Paket B	78,11	81,24	81,68	83,51	81,91
SMA/SMK/MA/Paket C	76,33	76,55	75,05	77,06	73,90
Tingkat Perguruan Tinggi	30,28	30,85	31,19	31,16	31,45

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

3.3.1.2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua sepanjang tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Murni SD Provinsi Papua mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sebesar 79,19% menjadi 80,67% ditahun 2023. Begitu juga pada tingkat SMP dimana pada tahun 2019 sebesar 57,19% menjadi 60,23% di tahun 2023. Sementara pada tingkat SMA ditahun 2019 sebesar 44,32% mengalami peningkatan menjadi 48,32% pada tahun 2023.

Tabel 3.24. Angka Partisipasi Murni Provinsi Papua Tahun 2019-2023

APM	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI/Paket A	79,19	79,34	80,38	81,66	80,67
SMP/MTs/ Paket B	57,19	57,95	57,93	59,14	60,23
SMA/SMK/MA/ Paket C	44,32	44,73	44,41	47,63	48,32

Sumber: BPS RI, 2023

3.3.1.3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua sepanjang tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun di Provinsi Papua mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sebesar 82,67% menjadi 83,61% ditahun 2023. Begitu juga pada usia 13-15 tahun, dimana pada tahun 2019 sebesar 80,13% menjadi 80,91% di tahun 2023. Sementara pada usia 16-18 pada tahun 2019 sebesar 63,50% mengalami peningkatan menjadi 64,15% pada tahun 2023 Sementara pada usia 19-24 tahun angka partisipasi sekolah sebesar 22,91% di tahun 2019 meningkat menjadi 23,89%.

Tabel 3.25 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2019-2023

APS	2019	2020	2021	2022	2023
07-12	82,67	82,99	83,43	84,35	83,61
13-15	80,13	80,48	80,02	81,66	80,91
16-18	63,50	64,83	63,98	65,93	64,15
19-24	22,91	23,23	22,90	23,58	23,89

Sumber: BPS RI, 2023

3.3.1.4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2021 cenderung

mengalami kenaikan. Angka Putus Sekolah usia 07-12 tahun di Provinsi Papua mengalami kenaikan sejak tahun 2017 sebesar 0,59% menjadi 2,48% ditahun 2021. Begitu juga pada usia 13-15 tahun dimana pada tahun 2017 sebesar 0,71% menjadi 3,87% di tahun 2021. Sementara pada Usia 16-18 pada tahun 2017 sebesar 0,75% mengalami mengalami peningkatan menjadi 0,77% pada tahun 2021, artinya secara rata-rata dari 100 penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 1 orang yang putus sekolah. Dan rata-rata dari 100 penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat sekitar 3 orang yang putus sekolah.

Bila Dilihat sepanjang tahun 2017-2021 angka putus sekolah usia 07-12 tahun secara rata-rata terdapat sekitar 1 orang dari 100 penduduk berusia 7-12 tahun yang putus sekolah. Sementara usia 13-15 tahun secara rata-rata terdapat sekitar 2 orang dari 100 penduduk berusia 13-15 tahun yang putus sekolah. Dan usia 16-18 tahun secara rata-rata terdapat sekitar 1 orang dari 100 penduduk berusia 16-18 tahun yang putus sekolah.

Tabel 3.26. Angka Putus Sekolah Provinsi Papua Tahun 2017-2021

APS	2017	2018	2019	2020	2021
07-12	0,59	0,62	0,81	0,99	2,48
13-15	0,71	1,27	1,44	1,66	3,87
16-18	0,75	0,86	0,83	1,8	0,77

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2022)

3.3.1.5. Angka Mengulang

Secara keseluruhan angka mengulang dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup tinggi untuk masing-masing jenjang pendidikan. Tercatat Angka Mengulang di Provinsi Papua tahun 2016 pada tingkat SD sebesar 3,37%, meningkat cukup pesat pada tahun 2019 menjadi 4,13% dan menurun kembali di tahun 2020 menjadi 3,50%. Kemudian pada jenjang SMP angka mengulang di tahun 2016 sebesar 1,23%, sempat menurun ditahun 2017 menjadi 0,80% dan meningkat kembali ditahun berikutnya hingga di tahun 2020

menjadi 2,24%. Sementara pada jenjang SMA angka mengulang di tahun 2016 mencapai 0,70% dan terlihat meningkat hingga tahun 2020 menjadi 1,68%.

Tabel 3.27. Angka Mengulang Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Angka Mengulang	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A	3,37	3,03	4,02	4,13	3,50
SMP/MTs/Paket B	1,23	0,80	1,48	2,13	2,24
SMA/SMK/MA/Paket C	0,70	0,74	0,70	1,64	1,68

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

3.3.1.6. Angka Kelulusan

Secara keseluruhan masih terdapat siswa/i pada setiap jenjang Pendidikan di Provinsi Papua yang tidak lulus. Selain itu, tingkat kelulusan Pendidikan per jenjang Pendidikan di Papua memiliki trend yang fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan khususnya pada jenjang Pendidikan. Angka Kelulusan di Provinsi Papua pada tahun 2016 ditingkat SD sebesar 98,60% menurun menjadi 79,44% pada tahun 2020. Sehingga dapat di katakan pada tahun 2020 masih terdapat 20,56% siswa/i yang tidak lulus dan melanjutkan Pendidikan pada jenjang SMP.

Tabel 3.28. Angka Kelulusan Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Angka Kelulusan	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI/Paket A	98,60	97,88	98,18	81,61	79,44
SMP/MTs/Paket B	94,38	98,25	96,47	91,89	94,98
SMA/SMK/MA/Paket C	98,12	98,20	98,44	95,78	95,80

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

3.3.1.7. Perkembangan Guru dan Murid

Secara keseluruhan jumlah guru di Provinsi Papua baik Pendidikan SD, SMP, SMA adalah sebanyak 35.536 orang pada tahun 2021. Dengan semakin tingginya kebutuhan terhadap Pendidikan di Papua, juga diikuti dengan perkembangan jumlah guru di Papua terlihat cukup pesat dan bahkan pada setiap jenjang Pendidikan terus mengalami peningkatan. Pendidikan sekolah dasar memiliki jumlah guru sampai dengan tahun 2021 mencapai 19.004

orang, kemudian untuk SMP mencapai 9.073 orang, pendidikan SMA sebesar 7.486 orang yang mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 10.387 orang.

Tabel 3.29. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/PaketA	16.054	18.037	18.827	19.200	45.447
SMP/MTs/PaketB	7.752	8.315	8.875	9.634	10.452
SMA/SMK/MA/PaketC	7.138	7.316	10.387	7.780	8.292
Jumlah	30.944	33.668	38.089	36.614	64.191

Sumber: BPS RI, 2022

Peningkatan rata-rata siswa paling terlihat pada pertumbuhan rata-rata jenjang pendidikan SMP dan SMA masing-masing sebesar 3,39% dan 5,22%. Sedangkan tingkat pendidikan SD hanya sebesar 0,88% pada tahun 2021. Meskipun Rata-rata jumlah siswa SD mencapai 0,88%, namun dari sisi jumlah siswa pendidikan SD paling dominan mencapai 463.838 siswa pada tahun 2021. Kemudian disusul SMP sebanyak 143.899 orang, untuk SMA sebanyak 108.319 siswa.

Tabel 3.30. Jumlah Murid di Provinsi Papua Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/ Paket A	447.968	442.845	439.345	463.838	945.104
SMP/MTs/PaketB	125.678	131.812	129.930	143.899	154.287
SMA/SMK/MA/Paket C	96.392	104.498	133.759	108.319	108.081

Sumber: BPS RI, 2022

Secara keseluruhan rasio guru layak di Provinsi Papua belum baik. Pada jenjang pendidikan sekolah dasar, proporsi guru layak sebesar 77,55%. Di tingkat sekolah menengah pertama mencapai 89,22 % dan Pada tingkat sekolah menengah atas sebesar 99,96%. Secara keseluruhan, distribusi guru terlatih pendidikan tinggi di pendidikan dasar dan menengah masih perlu ditingkatkan.

Tabel 3.31. Rasio Guru Layak (pendidik dengan ijazah D4/S1 atau lebih) Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Papua Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Guru	Guru Layak	Rasio
Sekolah Dasar	19.004	14.737	77,55
Sekolah Menengah Pertama	9.073	8.095	89,22

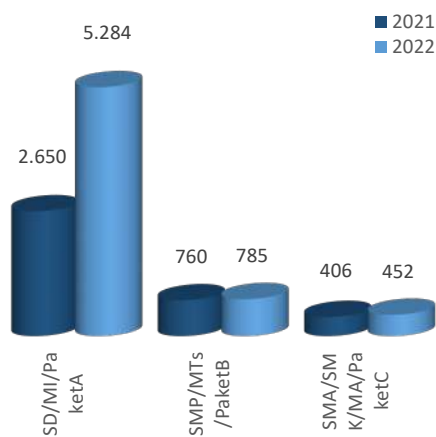
Jenjang Pendidikan	Guru	Guru Layak	Rasio
Sekolah Menengah Atas	7.486	7.483	99,96

Sumber: BPS RI, 2022

3.3.1.8. Fasilitas Pendidikan

Jumlah sekolah di Provinsi Papua yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta di Bawah Kementerian Agama dan di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, terlihat sebanyak 2.650 sekolah dasar pada tahun 2021 meningkat menjadi 5.284 unit pada tahun 2022, dan 760 sekolah menengah pertama pada tahun 2021 meningkat menjadi 785 unit pada tahun 2022, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 267 sekolah menengah atas meningkat menjadi 452 pada tahun 2022.

Gambar 3.27. Jumlah Sekolah Provinsi Papua Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

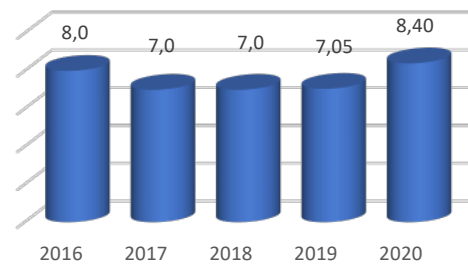
3.3.2. Kesehatan

3.3.2.1. Angka Kematian Bayi

Di Provinsi Papua, kasus kematian bayi terus terjadi antara tahun 2016 hingga 2020; bahkan pada tahun tersebut, AKB relatif tinggi. Provinsi Papua dilaporkan memiliki jumlah kasus AKB yang relatif tinggi, meskipun kasus tersebut cenderung fluktuatif hingga tahun 2020. Terdapat 29 kabupaten/kota kasus AKB di Provinsi Papua yang terbagi dalam 5 wilayah adat. Kasus AKB tercatat memuncak pada tahun 2016 sebesar 8 per 1000 kelahiran hidup, kemudian terus menurun menjadi 7 kasus per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Namun, AKB di Provinsi Papua meningkat menjadi 8

kejadian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020.

Gambar 3.28. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020

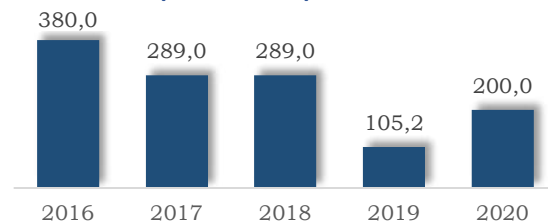


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

3.3.2.2. Angka Kematian Ibu

Selama ini, Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Papua per 100.000 penduduk relatif tinggi dan berfluktuasi selama lima tahun terakhir, jumlah wanita yang meninggal selama kehamilan atau dalam 42 hari setelah terminasi, tanpa memandang lama atau tempat persalinan, disebabkan oleh kehamilan atau penanganannya dan bukan oleh sebab lain.

Gambar 3.29. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (data diolah, 2021)

Yang dimaksud dengan kematian ibu adalah kematian seorang wanita selama masa kehamilan atau kematian dalam waktu 42 hari sejak berakhirnya kehamilan tanpa mengalami masa kehamilan atau tempat persalinan, yaitu kematian yang disebabkan oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan karena ke sebab lain seperti kecelakaan jatuh, dan sebagainya.

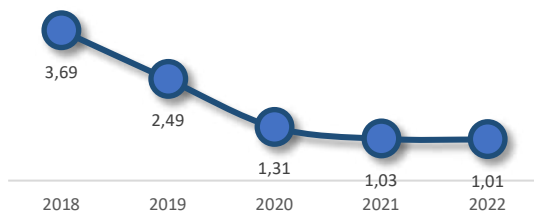
Kasus AKI mencapai 380 kasus per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016, kemudian menurun menjadi 105 kasus per 100.000 kelahiran hidup hingga tahun 2020 meningkat menjadi 200 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Ini harus menjadi prioritas pemerintah dalam

menurunkan kasus AKI di Provinsi Papua selama bertahun-tahun

3.3.2.3. Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Dari tahun 2018 hingga 2022, rasio puskesmas per 10.000 penduduk di provinsi Papua adalah 3-4 puskesmas yang melayani 10.000 orang. Namun, rasio puskesmas per 10.000 penduduk mengalami penurunan hingga tahun 2022. hal tersebut terindikasi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin tinggi sehingga pelayanan puskesmas juga semakin meningkat.

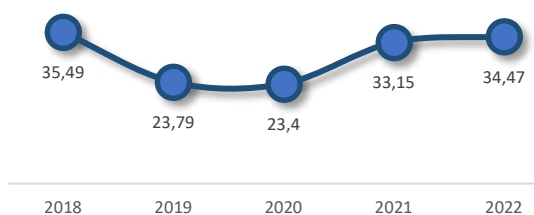
Gambar 3.30. Rasio Puskesmas Per 10.000 penduduk Provinsi Papua Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

Rasio dokter per 100.000 penduduk di Provinsi Papua sepanjang tahun 2018-2022 terlihat mengalami perubahan. Pada tahun 2018, Provinsi Papua mengungkapkan bahwa 35-36 dokter dapat melayani 100.000 orang, dan mengalami penurunan menjadi 23 dokter pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 35 dokter per 100.000 penduduk

Gambar 3.31. Rasio Dokter Per 100 Ribu Penduduk Provinsi Papua Tahun 2018-2022

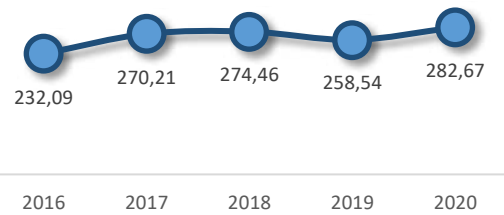


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2023)

Selama tahun 2016-2020, ketersediaan tenaga medis di Provinsi Papua tidak mengalami perubahan yang signifikan. Terdapat 232 tenaga medis yang melayani 100 ribu penduduk pada tahun 2016, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi sebanyak 274 tenaga medis yang melayani 100 ribu penduduk. Selanjutnya, hingga tahun 2020, terdapat 282-283 tenaga

medis per 100 ribu penduduk, masih lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 258 pada tahun 2019.

Gambar 3.32. Rasio Tenaga Medis Per 100 Ribu Penduduk Provinsi Papua Tahun 2016-2020

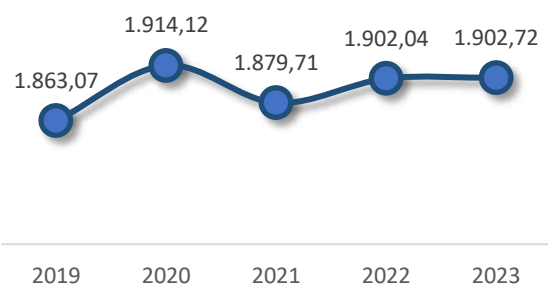


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

3.3.2.4. Asupan Kalori dan Protein

Asupan kalori Provinsi Papua dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi dan cenderung meningkat hingga tahun 2023. Konsumsi kalori atau protein adalah jumlah kalori atau protein yang dikonsumsi per orang per hari. Rata-rata wanita membutuhkan 2000 kalori setiap hari, sedangkan rata-rata pria membutuhkan 2500 kalori setiap hari. Pada tahun 2019 asupan kalori mencapai 2.021 kkal/kapita/hari dan terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 1.914 kkal/kapita/hari, namun terjadi penurunan pada tahun 2021. menjadi 1.879 kkal/kapita/hari dan pada tahun 2023 terlihat meningkat lagi menjadi 1.903 kkal/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa asupan kalori di Provinsi Papua belum memenuhi standar yang ditentukan

Gambar 3.33. Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari Provinsi Papua Tahun 2019-2023

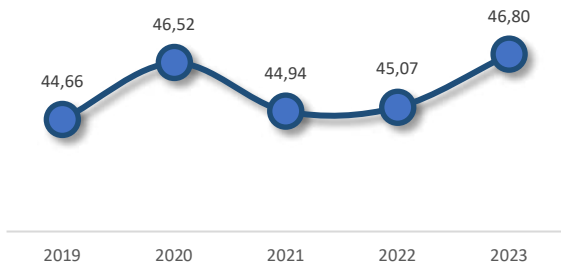


Sumber: BPS RI, 2023

Rata-rata konsumsi protein per kapita/hari di Provinsi Papua selama tahun 2019-2023 terlihat berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, konsumsi protein tercatat sebesar 44,66 per kapita/hari, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020

menjadi 46,52 per kapita/hari. Pada kondisi terakhir tahun 2023 mencapai 46,80 per kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata hampir dari separuh keluarga di Provinsi Papua mengonsumsi protein per hari

Gambar 3.34. Rata-Rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari Provinsi Papua Tahun 2019-2023

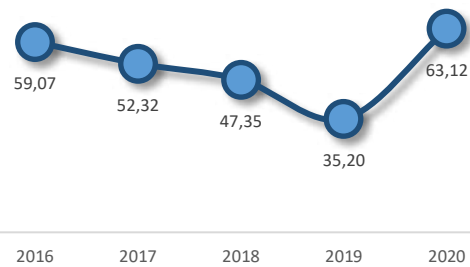


Sumber: BPS RI, 2022

3.3.2.5. Perkembangan Penanganan Penyakit Malaria

Penyakit malaria di Provinsi Papua relatif tinggi bahkan tercatat tertinggi di tingkat nasional. Selain itu, penyakit malaria di Provinsi Papua cenderung meningkat sepanjang tahun 2016-2020. Malaria merupakan penyakit endemis di Provinsi Papua, meskipun gejalanya tidak terlalu signifikan di seluruh wilayah di 29 kabupaten/kota di Papua.

Gambar 3.35. Angka Penderita Malaria per 1.000 Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2016-2020

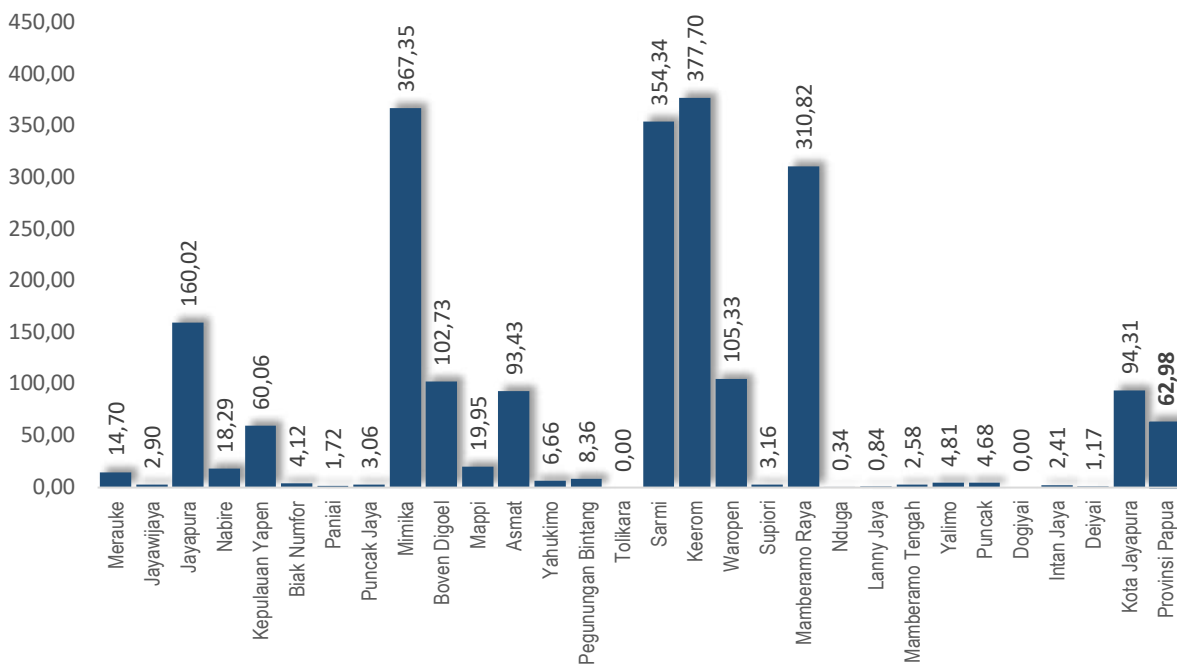


Sumber: Profil Kesehatan Indonesia 2021, (data diolah)

Keterangan: Annual Parasite Incidence (API) atau angka penderita malaria per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2016 terdapat 59 kasus penderita malaria per 1.000 penduduk, menurun hingga tahun 2019 menjadi 35 kasus per 1.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2020, jumlah penderita malaria terlihat kembali meningkat menjadi 63 kasus per 1.000 penduduk. Jumlah Penderita Malaria di Papua tahun 2019 terbanyak ditemukan di beberapa daerah seperti Keerom, Mimika, Sarmi, Mamberamo Raya, Kabupaten Jayapura, Waropen, Boven Digoel, Kota Jayapura, Jayapura, Asmat dengan kisaran 93,43-404,65%. Sedangkan daerah dengan jumlah penderita malaria terendah adalah Tolikara, Dogiyai, Nduga, dan Lanny Jaya dengan kisaran API 0 hingga 0,84%.

Gambar 3.36. Angka Penderita Malaria DI Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

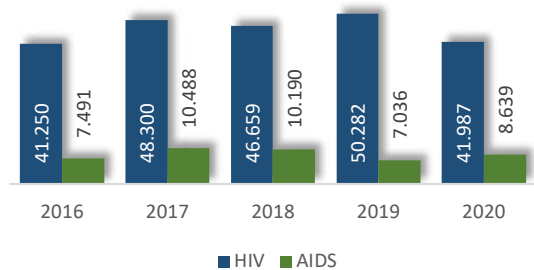
3.3.2.6. Perkembangan Penanganan Penyakit HIV/ AIDS

Perkembangan HIV/AIDS di Provinsi Papua terus mengalami peningkatan jumlah penderita HIV, AIDS, bahkan kasus kematian. Hingga tahun 2020, terdapat 41.987 kasus pengidap HIV dan 8.639 pengidap AIDS.

Secara keseluruhan, cakupan orang yang berisiko terinfeksi HIV tersebar di 29 kabupaten/kota dengan jumlah yang bervariasi. Kisaran penduduk yang berisiko terinfeksi HIV meliputi kabupaten Merauke, Paniai, Jayapura, Jayawijaya, Mimika, dan Kota Jayapura, dengan kisaran 45,60%-96,20%. Kemudian cakupan masyarakat dengan risiko tertular HIV

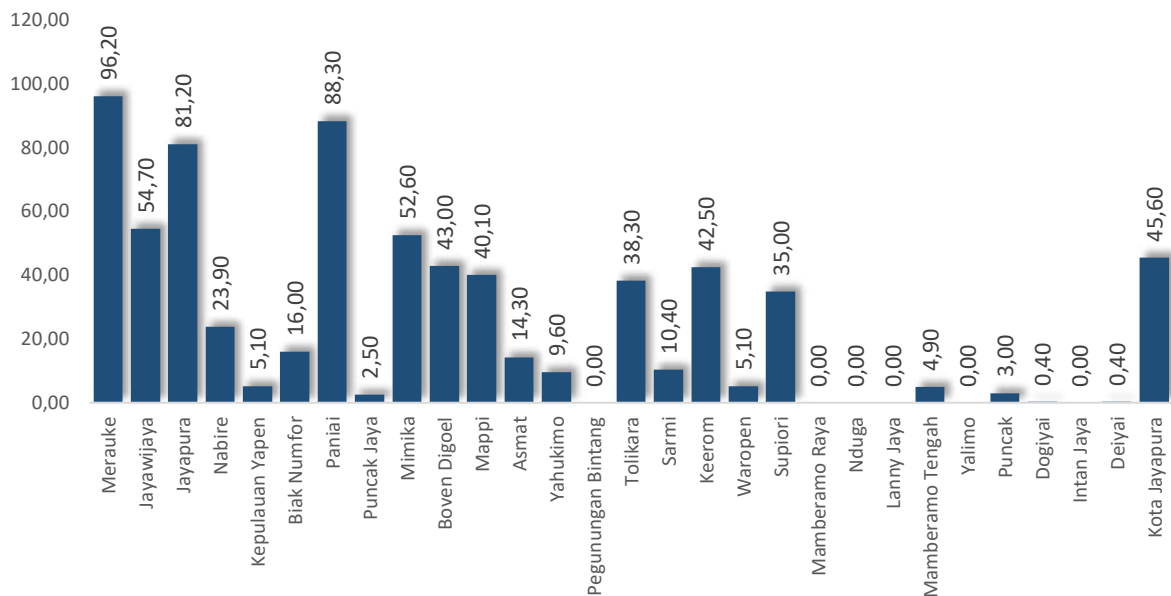
mendapatkan pelayanan pada kisaran 0 - 2,50% meliputi Kecamatan Gunung Bintang, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Yalimo, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai dan Puncak Jaya.

Gambar 3.37. HIV/AIDS di Provinsi Papua (orang) Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021

Gambar 3.38. Cakupan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Di Provinsi Papua Tahun 2020 (persen)

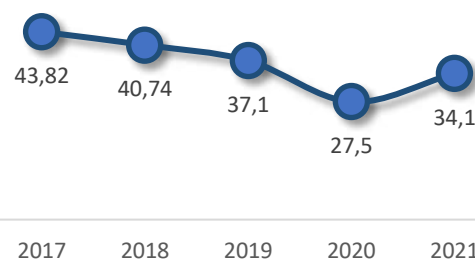


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

3.3.2.7. Perkembangan Penanganan Ibu Hamil dan Bayi

Cakupan kunjungan K4 merupakan indikator penting yang dapat menggambarkan tingkat pemeriksaan yang diperoleh ibu selama kehamilan. Secara umum cakupan kunjungan K4 di Provinsi Papua mengalami penurunan pada tahun 2016-2020. Meskipun demikian, cakupan kunjungan K4 mengalami peningkatan yaitu 38,07% pada tahun 2016 menjadi 43,82% pada tahun 2017. Sedangkan dari tahun berikutnya hingga tahun 2020 cakupan kunjungan K4 tercatat menurun menjadi 27,50%.

Gambar 3.39. Cakupan Kunjungan K4 di Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (Persen)



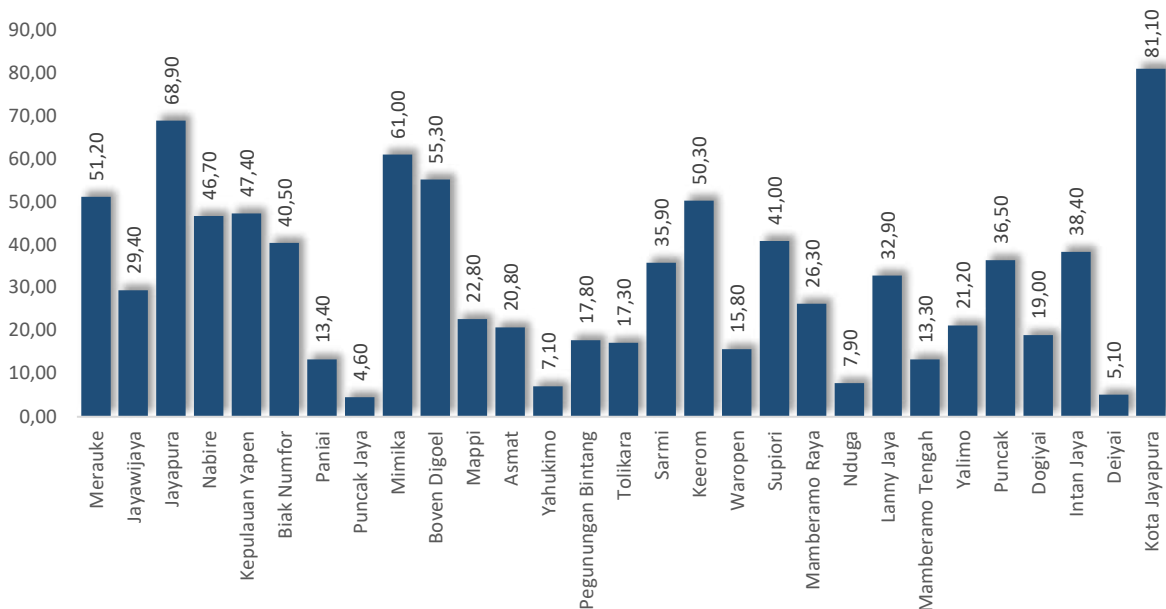
Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022

Selain itu, terdapat beberapa daerah dengan rata-rata cakupan K4 di bawah rata-rata

provinsi. Meski begitu, sebaran hasil Kunjungan K4 tidak merata. Kota Jayapura memiliki capaian kunjungan K4 tertinggi, dengan proporsi mencapai 81,10% pada akhir tahun 2019. Persentase ini delapan belas kali lebih tinggi dibandingkan proporsi kunjungan K4 di

Kabupaten Puncak Jaya yang terendah. Di Provinsi Papua, proporsi anak balita yang terkena campak bervariasi, dengan kecenderungan meningkat. Persentase rata-rata balita yang mendapat layanan imunisasi adalah 67,9%.

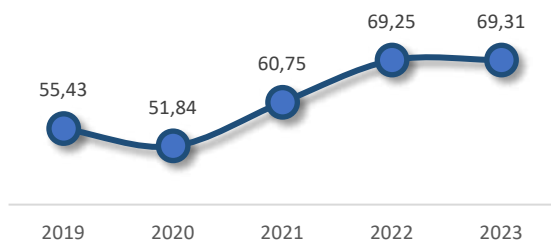
Gambar 3.40. Cakupan Kunjungan K4 Kabupaten Kota di Provinsi Papua Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2021

Balita yang pernah mendapat campak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebesar 63,5% dan meningkat menjadi 73,6% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 58,90% balita yang mengalami pubertas campak, dan tahun berikutnya hingga tahun 2020, balita yang mendapat pelatihan campak di Provinsi Papua meningkat menjadi 73,40%. Perlu dilakukan pendekatan kepada keluarga balita untuk melakukan gerakan campak pada balita.

Gambar 3.41. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Campak (Persen)

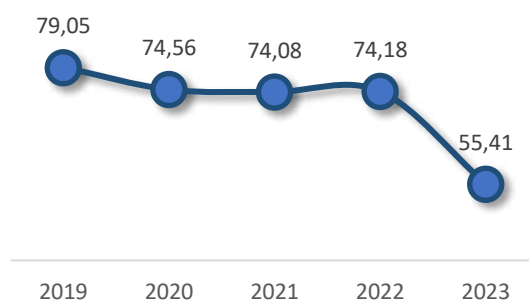


Sumber: BPS Republik Indonesia, 2023

Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat asi eksklusif di Provinsi Papua terlihat mengalami peningkatan sepanjang 2017-2021.

Pada tahun 2017 terlihat sebesar 57,25% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 53,11% dan terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 66,71 persen bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat asi eksklusif.

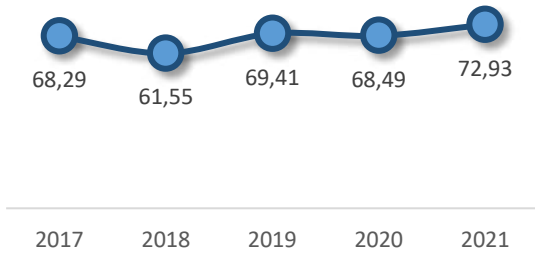
Gambar 3.42. Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan Asi Eksklusif Menurut Provinsi (Persen)



Sumber: BPS RI, 2023

Di Provinsi Papua Persentase Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan sepanjang tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat.

Gambar 3.43. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (Persen)



Sumber: BPS RI, 2022

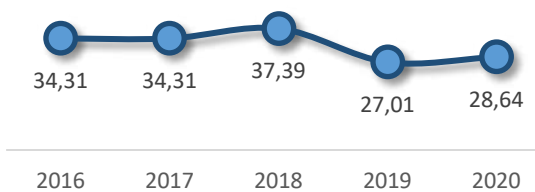
Pada tahun 2017 sebesar 68,29% Perempuan Pernah Kawin Berusia 15-49 Tahun Yang Proses Kelahiran Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 61,55% yang kemudian terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 72,93%.

3.3.3. Pekerjaan Umum

3.3.3.1. Jaringan Jalan

Sampai dengan tahun 2020, kondisi jalan di Provinsi Papua cukup memprihatinkan. Berdasarkan persentase jaringan jalan provinsi Papua dalam kondisi sangat baik pada tahun 2016 sebesar 34,31%; pada tahun 2018 meningkat signifikan menjadi 37,39%. Namun pada tahun 2019 persentase jalan dalam kondisi baik turun menjadi 27,01% kemudian naik menjadi 28,64%, artinya 71,36% jalan masih dalam kondisi buruk.

Gambar 3.44. Proporsi Jaringan Jalan dalam kondisi baik Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (persen)



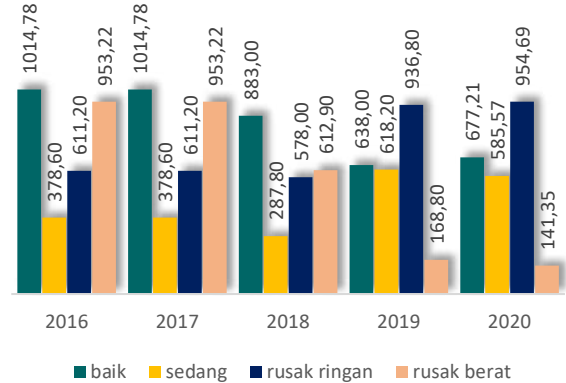
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Kondisi jalan di Provinsi Papua cenderung memburuk dalam lima tahun terakhir. Jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.014 km pada tahun 2016, sementara kondisi baik hanya 677 km pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, terlihat jumlah kilometer jalan dalam kondisi rusak ringan bertambah menjadi

955 kilometer. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi rusak berat tertinggi pada tahun 2016 sepanjang 953 km dan terus menurun menjadi 141 km pada tahun 2020.

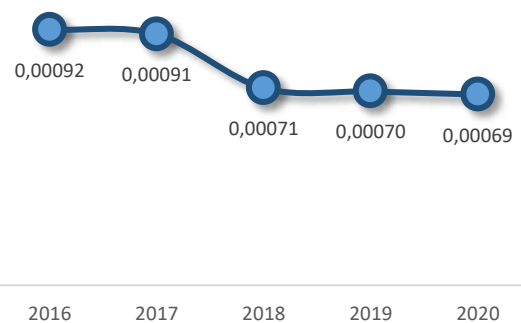
Gambar 3.45. Kondisi Jalan Dalam Menurut Kondisi di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan selama ini belum mampu menaikkan rasio mobilitas penduduk secara maksimal di Provinsi Papua. Peningkatan jalan dari tahun 2016-2020 tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk, sehingga tidak serta merta dapat menaikkan rasio mobilitas. Rasio mobilitas tahun 2016 sebesar 0,00092 Km/jiwa. Selanjutnya pada hingga tahun 2020 mobilitas penduduk secara perlahan-lahan mengalami penurunan menjadi 0,00069 Km/jiwa

Gambar 3.46. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk Provinsi Papua 2016-2020 (km/jiwa)

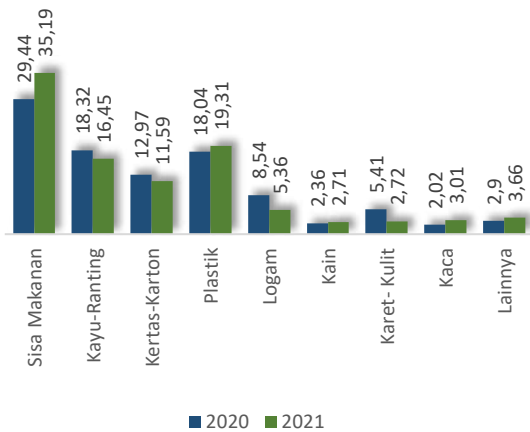


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

3.3.3.2. Persampahan

Rendahnya penerapan 3R (Reuse, Recycle, dan Reduce) terhadap sumber sampah, baik di sumber maupun di tempat pengumpulan sampah, menunjukkan pengelolaan sampah yang buruk.

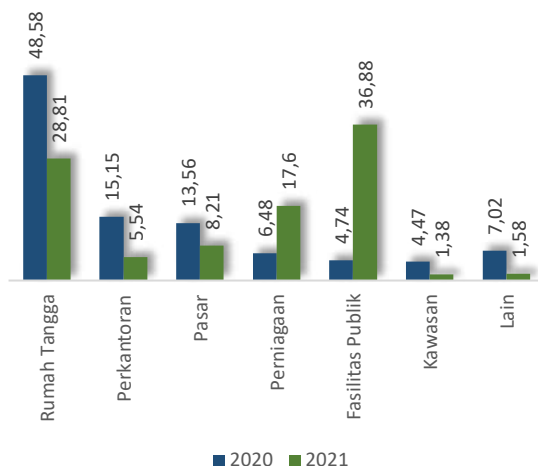
Gambar 3.47. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Provinsi Papua 2020-2021 (%)



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2022

Selain itu, fasilitas persampahan yang terbatas di setiap kecamatan menjadi kendala yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, komposisi sampah tertinggi di Provinsi Papua yaitu sampah jenis Sisa makanan mencapai 35,19% juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk sampah jenis plastik mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 19,31%. Sedangkan berdasarkan sumber sampah, pada tahun 2021 sebanyak 36,88% sampah berasal dari sampah Fasilitas Publik semigkat dari tahun 2020 yang hanya sebesar 4,74%.

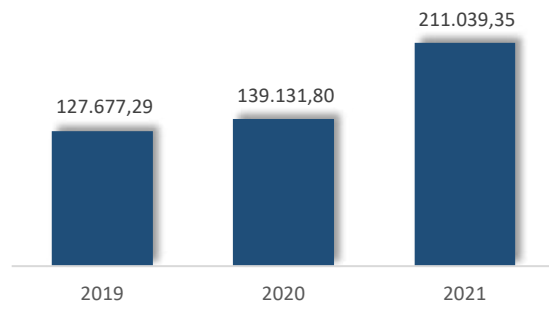
Gambar 3.48. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah di Provinsi Papua 2020-2021 (%)



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2022

Selanjutnya, 28,81% berasal dari sampah Rumah Tangga, diikuti sampah Perniagaan sebesar 17,60%. Sampah Pasar 8,21%, sampah Perkantoran 5,54%, dan sisanya dibawah 2%.

Gambar 3.49. Jumlah Timbunan Sampah Tahunan di Provinsi Papua, 2019-2021 (ton)



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2022

Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Provinsi Papua menghasilkan timbunan sampah yang terus meningkat dari 2018 sampai dengan tahun 2021. Dimana sekitar 127 juta ton sampah pada 2018. Seperti terlihat pada grafik terlampir, jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai 211 juta toh. sampah per tahun.

3.3.3.3. Tempat Ibadah

Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk di Provinsi Papua sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2018 sebanyak 21 tempat ibadah melayani 10.000 penduduk, dan meningkat di tahun 2020 sebanyak 25 tempat ibadah melayani 10.000 penduduk.

Tabel 3.32. Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Provinsi Papua	20,63	20,28	24,83
MAMTA			
Jayapura	40,52	39,53	56,34
Sarmi	43,9	42,7	43,12
Keerom	52,33	51,14	68,56
Mamberamo Raya	26,13	25,74	22,20
Kota Jayapura	18,1	17,96	18,01
LA PAGO			
Jayawijaya	25,72	25,38	27,55
Puncak Jaya	19,35	18,87	27,97
Yahukimo	14,28	14,14	29,75
Pegunungan Bintang	9,81	9,63	27,42
Tolikara	24,91	24,66	24,43
Nduga	0,51	0,51	14,03
Lanny Jaya	15,25	15,14	15,81
Mamberamo Tengah	14,35	14,32	13,52
Yalimo	20,29	19,81	20,38
Puncak	1,89	1,86	22,37
MEE PAGO			
Nabire	28,33	27,88	38,74
Paniai	14,07	13,75	10,53
Mimika	12,85	12,61	18,51
Dogiyai	14,7	14,5	9,37
Intan Jaya	1,64	1,62	10,87

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
Deiyai	11,86	11,75	8,18
SAERERI			
Kepulauan Yapen	35,72	34,39	34,85
Biak Numfor	20,15	19,62	21,41
Waropen	37,89	36,81	42,68
Supiori	33,97	32,83	19,35
ANIM HA			
Merauke	22,91	22,73	27,55
Boven Digoel	40,61	39,73	29,12
Mappi	25,2	24,3	11,02
Asmat	25,42	24,93	26,39

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

Bila dilihat menurut kabupaten, Rasio Rasio Tempat Ibadah per 10.000 penduduk paling tinggi pada kabupaten Keerom sebesar 68,56 di tahun 2021 dan yang terendah pada kabupaten Dogiyai sebesar 9,37 dan Deiyai sebesar 8,18,

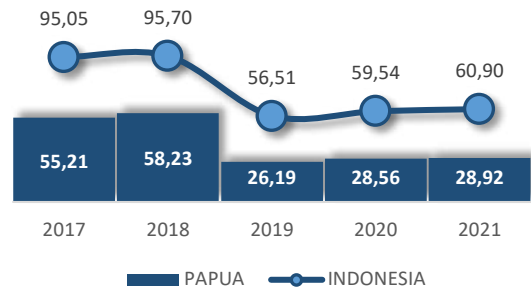
3.3.4. Perumahan Rakyat

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, di Provinsi Papua persentase rumah tangga dengan akses perumahan yang layak dan terjangkau cenderung menurun antara tahun 2017 hingga 2021. Dari 55,21% pada tahun 2017 menjadi 28,92% pada tahun 2021. Meskipun pemerintah hingga saat ini telah berupaya untuk menetapkan program perumahan bagi daerah miskin, namun ketersediaan inisiatif tersebut belum mampu memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni dan fasilitas perumahan murah.

Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri di Provinsi Papua menunjukkan kenaikan dari tahun 2017 sebesar 81,00% menjadi 81,20% di tahun 2021. Dikatakan Milik sendiri, jika tempat tinggal/rumah yang ditempati oleh rumah tangga tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau

salah seorang ART. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri.

Gambar 3.50. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak Dan Terjangkau (Persen), 2017-2021



Sumber: BPS RI, 2022

Sementara Proporsi rumah tangga dengan rumah yang ditempati dengan adalah status kontrak/sewa di Provinsi Papua sejak tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan, dimana padatahun 2017 sebesar 9,02% turun menjadi 7,87% di tahun 2021. Dikatakan Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/ART dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayarannya biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru. Dan dikatakan Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau salah seorang ART dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

Tabel 3.33. Proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik dan sewa (Persen) Tahun 2017-2021

Uraian	Milik Sendiri					Kontrak / Sewa				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
PAPUA	81,00	81,36	82,12	83,05	83,20	9,02	9,18	8,85	8,47	7,87
INDONESIA	79,61	80,02	80,07	80,10	81,08	9,52	9,35	9,64	9,27	8,66

Sumber: BPS RI, 2022

Selanjutnya, bila dilihat persentase rumah tangga yang sumber penerangannya menggunakan listrik PLN di Provinsi Papua tahun

2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dimana pada tahun 2017 sebesar 41,61% meningkat hingga tahun

2019 menjadi 44,51% dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 43,14 persen, kemudian kembali meningkat sebesar 0,78% menjadi 43,92% di tahun 2021. Dengan kata lain masih sebanyak 56,08% penduduk di Provinsi Papua yang sumber penerangannya tidak menggunakan sumber penerangan Listrik PLN.

Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar pada Akses pada layanan air minum, Akses pada layanan sanitasi dasar dan Indeks pada fasilitas kesehatan dasar

Tabel 3.35. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Persen) Tahun 2019-2021

Uraian	Akses pada layanan air minum			Akses pada layanan sanitasi dasar			Indeks pada fasilitas kesehatan dasar		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
PAPUA	24,64	25,37	30,07	38,27	40,31	40,81	35,55	36,44	36,97
INDONESIA	42,84	42,31	43,81	77,39	79,53	80,29	76,07	78,30	79,59

Sumber: BPS RI,2022

Gambar 3.51. Persentase Rumah Tangga dengan Atap Terluas Bukan Ijuk/Lainnya (Persen) Tahun 2017-2021



Sumber: BPS RI,2022

Persentase Rumah Tangga dengan Atap Terluas Bukan Ijuk/Lainnya di Propinsi Papua terlihat sepanjang tahun 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2017 sebanyak 68,64% meningkat di tahun 2021 menjadi 73,14 % Rumah Tangga dengan Atap Terluas Bukan Ijuk/Lainnya

3.3.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di

di Provinsi Papua pada tahun 2019-2021 terlihat mengalami peningkatan. Namun rata-rata masih dibawah 50%.

Tabel 3.34. Persentase Rumah Tangga dengan Sumber enerangan Listrik PLN (Persen) Tahun 2017-2021

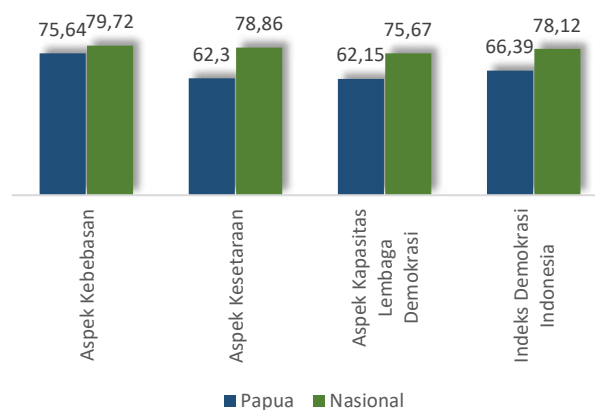
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PAPUA	41,61	43,51	44,49	43,14	43,92
INDONESIA	95,99	96,52	96,73	96,95	97,26

Sumber: BPS RI,2022

Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat provinsi, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di suatu provinsi. Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

Bila dilihat tingkat perkembangan demokrasi di Provinsi papua pada tahun 2021 sebesar 66,39. Dengan aspek kebebasan sebesar 75,64, aspek kesetaraan sebesar 62,30 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 62,15.

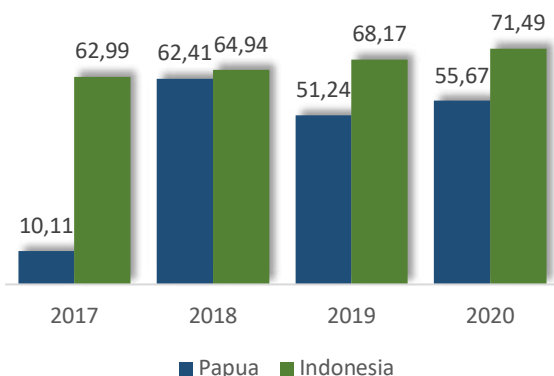
Gambar 3.52. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2021



Sumber: BPS RI,2022

Persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Papua terlihat mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dimana pada tahun 2017 hanya sebesar 10,11% tindak pidana yang terselesaikan, meningkat di tahun 2018 menjadi 62,41% dan pada tahun 2019 turun menjadi 51,24% kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 55,67% penyelesaian tindak pidana di Provinsi Papua.

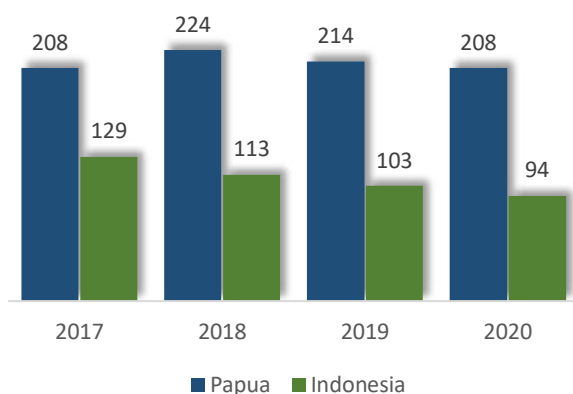
Gambar 3.53. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)



Sumber: BPS RI,2022

Jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (crime rate) setiap 100.000 penduduk terlihat mengalami fluktuasi, sepanjang tahun 2017-2020 dimana menunjukkan angka yang sama. Semakin tinggi Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.

Gambar 3.54. Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (Per 100.000 Penduduk)



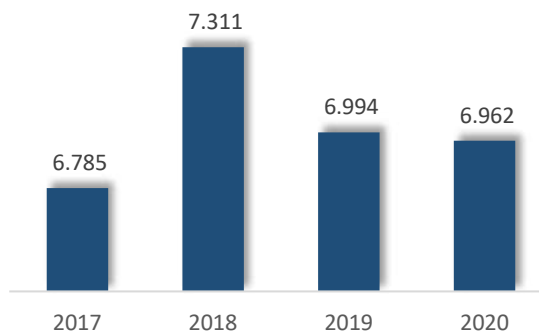
Sumber: BPS RI,2022

Tindak kejahatan penduduk di Provinsi Papua sebanyak 208 orang pada tahun 2017 yang kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 224 orang dan turun ditahun 2019 menjadi 214

kemudian kembali turun menjadi 208 di tahun 2020 dimana angka tersebut sama dengan di tahun 2017.

Sementara jumlah tindak pidana pertahun menurut kepolisian daerah Provinsi Papua cenderung meningkat dari tahun 2017. Pada tahun 2017 sebanyak 6.785 kasus tindak pidana, meningkat pada tahun 2018 sebanyak 7.311 kasus dan menurun hingga tahun 2020 menjadi 6.962 kasus.

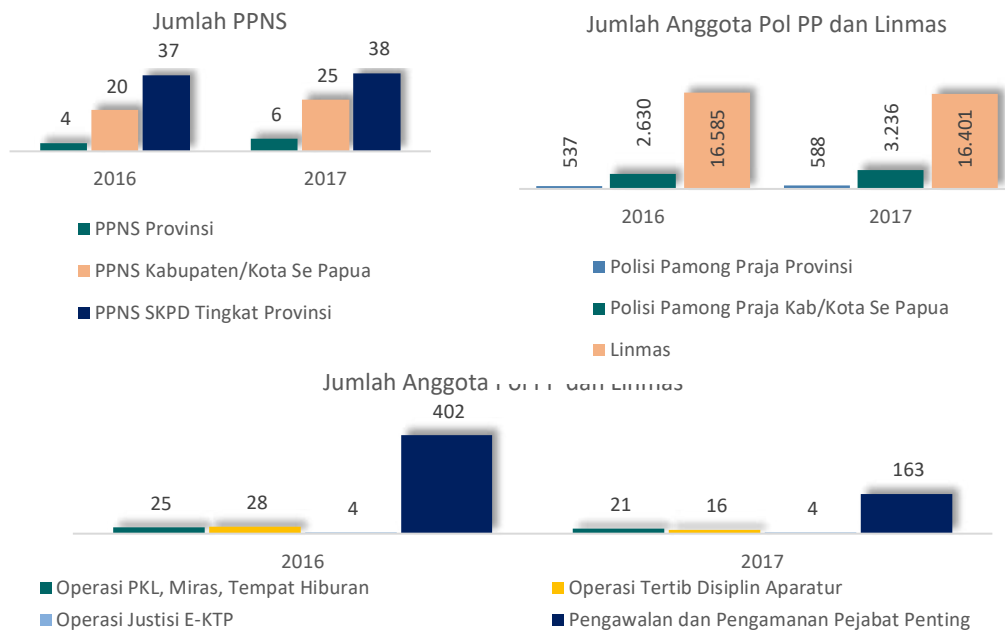
Gambar 3.55. Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah (kasus)



Sumber: BPS RI,2022

Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat selama tahun 2016-2017 terus ditingkatkan. Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penanganan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan gambar di bawah diketahui bahwa terdapat peningkatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Provinsi Papua pada rentang tahun 2016-2017. Hal ini terindikasi berdasarkan peningkatan jumlah PPNS, peningkatan anggota Polisi Pamong Praja, peningkatan jumlah operasi trantibum, serta peningkatan pengamanan pejabat penting.

Gambar 3.56. Kondisi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2016-2017



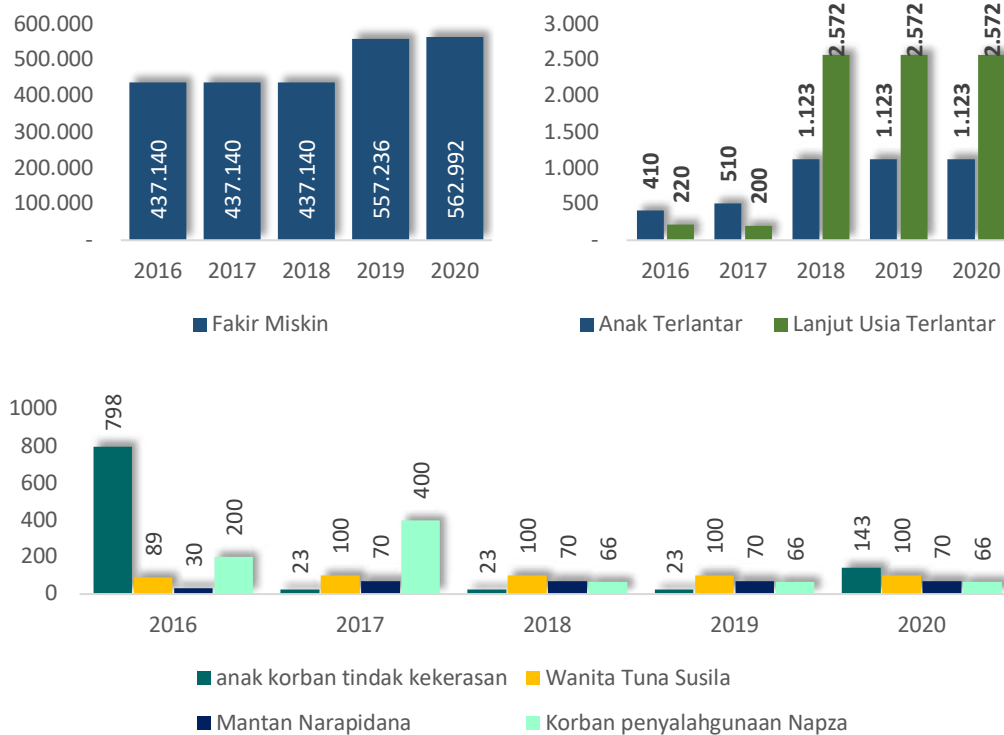
Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

3.3.6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya

penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua.

Gambar 3.57. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (orang)



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

Hal ini terindikasi melalui tingginya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, anak korban tindak kekerasan, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan korban penyalahgunaan napza pada rentang tahun 2016-2020. Meskipun demikian, penyandang fakir miskin di Provinsi Papua cenderung meningkat, tercatat jumlah fakir miskin di tahun 2020 mencapai 562.992 orang

Selama lima tahun terakhir, jumlah anak terlantar mengalami peningkatan dari 410 anak (tahun 2016) menjadi 1.123 anak (tahun 2020). Trend yang meningkat juga terjadi pada lanjut usia terlantar, yaitu 220 orang (tahun 2016) menjadi 2.572 orang (tahun 2020). Kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat terjadi pada anak korban kekerasan, wanita tuna susila, mantan narapidana, dan korban penyalahgunaan napza. Jumlah wanita tuna susila pada tahun 2016 sebanyak 89 orang dan bertambah menjadi 100 orang pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah mantan narapidana di Provinsi Papua pada tahun 2016 tercatat sebanyak 30 orang dan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 70 orang. Adapun jumlah anak korban kekerasan yang teridentifikasi pada tahun 2016 sebanyak 798 anak, kemudian pada tahun 2020 turun menjadi 143 anak. Sementara korban penyalahgunaan napza tahun 2016 mencapai 200 orang dan meningkat di tahun 2017 menjadi 400 orang, namun hingga tahun 2020 tercatat menurun menjadi 100 orang. Kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan penyalahgunaan

Napza di Papua karena masih banyak para pecandu narkoba yang belum teridentifikasi.

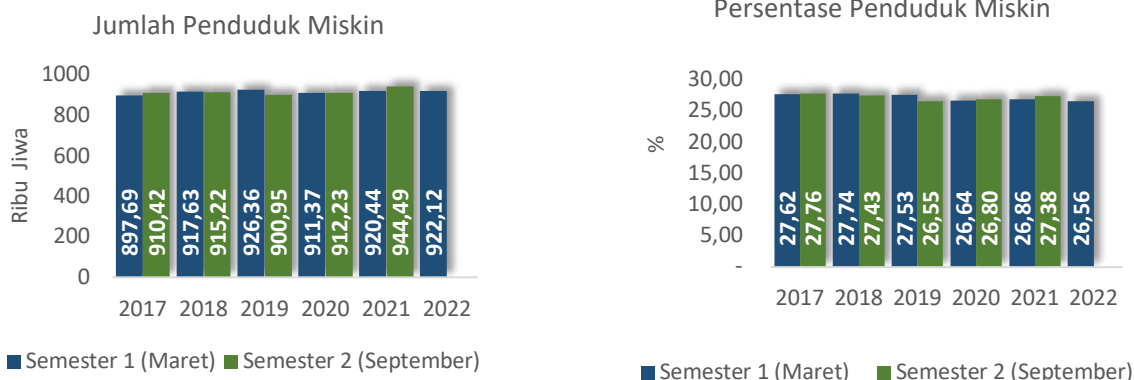
Tabel 3.36. Jumlah Organisasi Sosial Dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Papua Tahun 2017-2020 (Lembaga/Organisasi)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Organisasi Sosial	100	100	100	100	100
Lembaga Swadaya Masyarakat	286	286	286	286	286

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

Jumlah organisasi sosial di Provinsi Papua tidak banyak mengalami penambahan selama lima tahun terakhir. Tercatat selama tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah organisasi sosial sebanyak 286 dan tidak mengalami penambahan. Hal yang sama terjadi pada lembaga swadaya masyarakat yang tidak mengalami perubahan. Adapun terdapat sebanyak 100 lembaga organisasi masyarakat selama kurun waktu 2017-2021. Kondisi kemiskinan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2017 semester 1 sebanyak 897,69 ribu penduduk miskin atau sebesar 27,62% meningkat pada semester 2 sebanyak 910,42 ribu atau sebesar 27,76% dan pada tahun 2021 meningkat pada semester pertama terlihat sebanyak 920,44 ribu penduduk miskin atau sebesar 26,86% dan meningkat lagi di semester 2 menjadi 944,49 ribu penduduk miskin atau sebesar 27,38%.

Gambar 3.58. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2017-2022



Sumber: BPS RI, 2022

3.3.7. Tenaga Kerja

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut

jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi Papua mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar 3,65 meningkat menjadi 4,28 ditahun 2020 dan kembali menurun menjadi 3,33 ditahun 2021. Bila dilihat menurut kabupaten/kota dengan TPT tertinggi di tahun 2021 adalah Kota Jayapura sebesar 11,67 dan yang terendah adalah kabupaten Mamberamo Tengah sebesar 0,90.

Tabel 3.37 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (persen) Tahun 2019–2021

Kabupaten/Kota	TPT			TPAK		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Merauke	2,61	3,43	2,19	68,05	70,12	70,69
Jayawijaya	2,39	2,51	1,62	85,42	81,98	84,14
Jayapura	9,68	10,33	7,87	66,02	63,68	67,97
Nabire	6,31	6,65	3,05	69,75	74,15	73,09
Kepulauan Yapen	5,78	5,30	2,47	70,87	60,29	63,94
Biak Numfor	10,42	10,38	9,49	59,69	63,79	69,47
Paniai	0,66	–	NA	87,92	58,41	89,26
Puncak Jaya	1,78	1,5	1,74	77,34	84,81	91,39
Mimika	7,51	7,8	5,37	64,93	63,46	64,77
Boven Digoel	3,08	8,09	6,73	74,90	75,48	79,72
Mappi	4,51	5,77	4,11	68,56	64,09	61,60
Asmat	1,06	2,38	NA	83,35	81,78	81,16
Yahukimo	2,01	3,88	2,25	82,16	85,77	85,47
Pegunungan Bintang	1,63	4,12	4,43	90,4	86,47	87,88
Tolikara	1,3	1,07	1,12	91,98	92,94	90,61
Sarmi	5,26	4,83	3,50	64,27	67,17	68,57
Keerom	2,9	2,56	1,41	76,39	76,84	76,91
Waropen	3,32	4,76	8,56	59,76	60,41	56,39
Supiori	4,68	4,12	2,66	68,67	69,32	68,56
Mamberamo Raya	3	2,55	1,91	70,71	61,46	66,84
Nduga	1,03	–	NA	95,21	96,25	97,93
Lanny Jaya	0,12	–	NA	92,50	36,65	95,66
Mamberamo Tengah	0,71	–	0,9	93,45	80,03	95,84
Yalimo	0,64	–	NA	89,43	89,01	93,68
Puncak	0	–	0,94	79,47	85,95	89,43
Dogiyai	0,11	–	5,68	90,12	82,45	78,20
Intan Jaya	0	1,22	NA	82,10	69,21	75,75
Deiyai	0,22	–	NA	92,65	89,65	85,01
Kota Jayapura	12,37	11,62	11,67	63,73	63,09	63,75
Papua	3,65	4,28	3,33	76,92	72,16	78,29

Sumber: BPS Papua, 2021

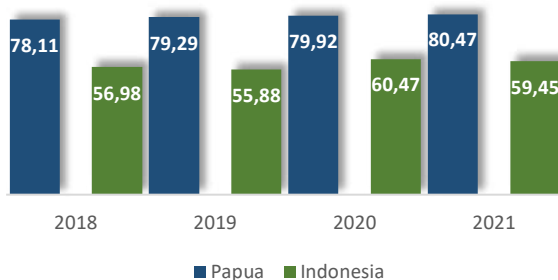
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di provinsi Papua mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebesar 76,92 turun menjadi 72,16 ditahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 78,29 ditahun 2021. Bila dilihat menurut kabupaten/kota dengan TPAK tertinggi di tahun 2021 adalah Kabupaten Nduga sebesar

97,93 dan yang terendah adalah kabupaten Waropen sebesar 56,39.

Proporsi Lapangan Kerja Informal menggambarkan kondisi pasar kerja secara lebih komprehensif, sebagai pelengkap indikator tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat memberikan tinjauan (assessment) atas kualitas lapangan kerja yang tersedia di suatu negara. Kondisi lapangan kerja informal memberikan gambaran untuk menetapkan kebijakan perlindungan pekerja, yaitu peningkatan kondisi kerja, upah, dan perlindungan sosial. Selain itu, kondisi ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi informal, merencanakan pengembangan keahlian dan pelatihan, serta menetapkan kerangka regulasi, reformasi kelembagaan, dan kebijakan pengembangan wilayah.

Gambar 3.59. Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Provinsi Tahun 2018-2021



Sumber: BPS RI, 2022

Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa ekonomi yang didukung oleh tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah telah mampu menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif dengan perlindungan yang memadai.

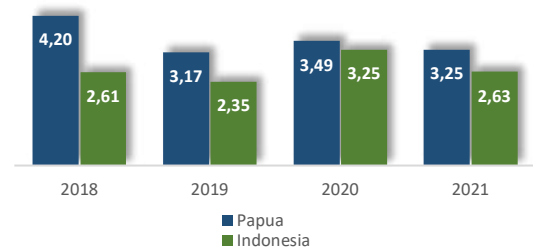
Proporsi Lapangan Kerja Informal di Provinsi Papua sepanjang tahun 2018-2021 mengalami peningkatan yang positif. Dimana pada tahun 2018 sebesar 78,11% terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 80,47%.

Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja memberikan gambaran tentang kondisi anak-anak yang bekerja di luar ketentuan peraturan

perundang-undangan dan merupakan proksi untuk menggambarkan kondisi pekerja anak. Anak-anak yang terpaksa bekerja biasanya berasal dari rumah tangga miskin, sehingga mereka terancam gagal memperbaiki masa depannya dan pada akhirnya tidak mampu mengangkat dirinya atau keluarganya untuk keluar dari kemiskinan. Indikator ini dapat memberikan sinyal dalam pengambilan kebijakan dan intervensi untuk menarik pekerja anak (terutama mereka yang berada di bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak), mengembalikan mereka ke sekolah atau membekali dengan keterampilan sesuai minat, menyediakan bantuan sosial bagi keluarganya, dan melindungi kondisi kerja.

Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan sepanjang tahun 2018-2021. Dimana pada tahun 2018 sebesar 4,20% terus menurun menjadi 3,25% di tahun 2021.

Gambar 3.60. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja Tahun 2018-2021 (Persen)

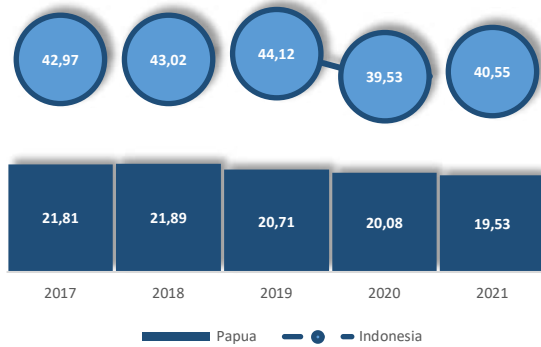


Sumber: BPS RI, 2022

Persentase Tenaga Kerja Formal mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan pada sektor non-pertanian.

Persentase Tenaga Kerja Formal di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2017 sebesar 21,81% terus menurun menjadi 19,53% di tahun 2021.

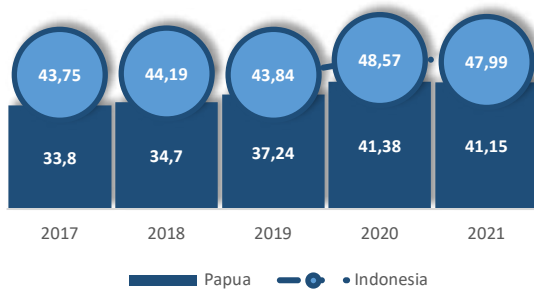
Gambar 3.61. Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Provinsi Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber: BPS RI, 2022

Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian mendorong kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja yang baik, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap layanan pendanaan/permodalan.

Gambar 3.62. Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber: BPS RI, 2022

Semakin menurunnya indikator ini menunjukkan bahwa terjadi pembentukan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu menampung dan menyediakan lapangan kerja yang lebih terlindungi

Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian di Provinsi Papua mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2017 sebesar 33,80 terus meningkat menjadi 41,15% di tahun 2021.

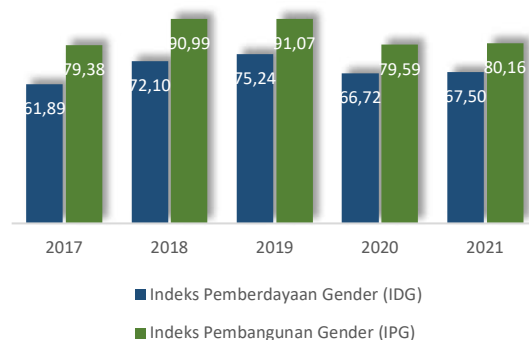
3.3.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan gender (IPG) yang dihitung dengan menggunakan harapan hidup, harapan

pendidikan dan indeks distribusi pendapatan merupakan indeks kemampuan pencapaian dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Hal tersebut terindikasi bahwa kualitas dalam pembangunan gender semakin menunjukkan hal yang positif di Provinsi Papua.

Indeks pemberdayaan gender tercatat memiliki nilai cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua kembali menurun menjadi 66,72% bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 75,24%. Selanjutnya, pada indeks pembangunan gender juga terlihat cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Tahun 2017 IPG Papua mencapai 79,38% dan meningkat hingga tahun 2019 menjadi 91,07%, namun di tahun 2021 IPG kembali menurun pada angka 80,16%.

Gambar 3.63. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Tahun 2017-2021



Sumber: BPS RI, 2022

Adapun capaian tertinggi indeks pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) pada kabupaten/kota di Provinsi Papua tahun 2021 di dominasi oleh Kota Jayapura dengan nilai IDG mencapai 80,25% meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 81,05%. Dan IPG mencapai di tahun 2021 meningkat menjadi 94,65% untuk Kota Jayapura. Sementara capaian terendah IDG yaitu

Kabupaten Dogiyai dengan IDG sebesar 35,22% dan Kabupaten Asmat merupakan wilayah dengan capaian IPG terendah yaitu 53,72%.

Tabel 3.38. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2020-2021

Uraian	IPG		IDG	
	2020	2021	2020	2021
Merauke	87,84	88,04	55,59	58,12
Jayawijaya	83,50	84,09	58,90	61,50
Jayapura	90,92	91,19	68,77	70,20
Nabire	90,37	90,51	65,17	66,55
Kepulauan Yapen	89,00	89,15	68,95	67,73
Biak Numfor	90,15	90,25	69,95	68,87
Paniai	67,88	68,25	52,39	57,36
Puncak Jaya	65,20	65,69	48,90	51,94
Mimika	77,03	76,88	52,79	53,86
Boven Digoel	79,18	79,06	53,87	52,17
Mappi	83,48	83,78	55,98	58,91
Asmat	53,59	53,72	77,13	78,37
Yahukimo	72,28	73,02	41,30	37,95
Pegunungan Bintang	80,01	80,49	51,35	51,95
Tolikara	59,58	60,18	52,51	47,91
Sarmi	82,35	82,56	74,19	72,92
Keerom	86,23	86,32	59,31	59,83
Waropen	70,13	70,35	50,82	50,39
Supiori	76,38	76,78	64,07	62,65
Mamberamo Raya	81,56	82,11	53,80	59,29
Nduga	84,09	86,01	58,21	47,61
Lanny Jaya	92,40	92,89	44,03	37,08
Mamberamo Tengah	86,79	87,80	40,66	46,96
Yalimo	82,60	83,65	42,26	37,80
Puncak	82,17	83,27	45,43	40,83
Dogiyai	80,82	80,48	40,57	35,22
Intan Jaya	70,40	71,62	39,88	37,14
Deiyai	70,17	70,15	40,07	40,17

Uraian	IPG		IDG	
	2020	2021	2020	2021
Kota Jayapura	94,35	94,65	81,05	80,25

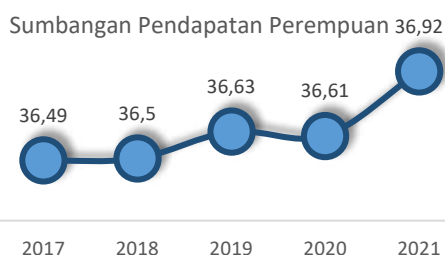
Sumber: BPS RI, 2022

Membangun daerah tidak terlepas dari tiga pilar utama yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Strategi pembangunan selama ini sudah diarahkan dalam memberdayakan masyarakat secara umum dan peningkatan peran swasta terhadap urusan-urusan masyarakat yang belum optimal dilakukan pemerintah daerah. Peran lembaga swasta dalam menyerap lapangan tenaga kerja perempuan di Provinsi Papua selama ini terbilang cukup tinggi.

Meskipun peningkatannya belum begitu signifikan, namun terlihat partisipasi perempuan terlihat sudah tinggi. Sampai dengan tahun 2021 partisipasi perempuan tenaga profesional mencapai 37,36%.

Keterlibatan Perempuan di perlemen selama tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan dari 10,61% di tahun 2017 menjadi 14,55% di tahun 2021. Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja juga cenderung perlahan meningkat dari 36,49% di tahun 2017 menjadi 36,92% di tahun 2021.

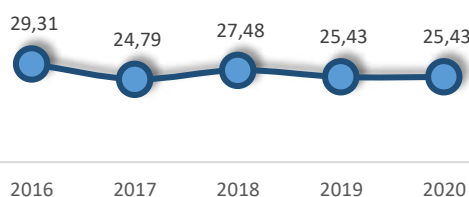
Gambar 3.64. Partisipasi Perempuan dan Sumbangan Pendapatan Perempuan di Provinsi Papua Tahun 2017-2021



Sumber: BPS RI, 2022



Gambar 3.65. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Tahun 2016-2020



Sumber: BPS RI, 2022

3.3.9. Pangan

Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 Kkal/Kapita/Hari tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 sebesar 29,3, turun menjadi 24,79 di tahun 2017. Kemudian meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 27,48 selanjutnya kembali menurun hingga tahun 2020 menjadi 25,43.

Untuk konsumsi kedelai atau setara kedelai pada tahun 2020 sebesar 2,23 kg/kapita/tahun untuk Tahu, sementara konsumsi tempe sebesar 1,65 kg/kapita/tahun dan untuk kecap sebesar 0,34 kg/kapita/tahun.

Tabel 3.39. Konsumsi kedelai yang terdapat pada tahu, tempe dan kecap di Provinsi Papua Tahun 2020

Uraian	Konsumsi setara kedelai (kg/kapita/tahun)			
	Tahu	Tempe	Kecap	Total
Papua	2,23	1,65	0,34	4,22
Indonesia	2,78	3,64	0,74	7,17

Sumber: BPS RI,2022

Selanjutnya bila dilihat pertahunnya mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 3,42 kg/kapita/tahun, meningkat menjadi 3,66 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,22 kg/kapita/tahun, dengan laju pertumbuhan sebesar 11,09 per tahun.

Tabel 3.40. Konsumsi total setara kedelai (tahu, tempe dan kecap) per Provinsi Tahun 2018 – 2020

Uraian	Konsumsi setara kedelai (kg/kapita/tahun)			Pertumbuhan
	2018	2019	2020	
Papua	3,42	3,66	4,22	11,09
Indonesia	7,51	7,14	7,17	-2,29

Sumber: BPS RI,2022

Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan di Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Dimana angka tertinggi pada tahun 2018 sebesar 15,12 dan yang terendah pada tahun 2021 sebesar 7,58.

Tabel 3.41. Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan Tahun 2017-2021 (Persen)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	9,85	15,12	10,98	8,68	7,58
Indonesia	8,66	6,86	5,42	5,12	4,79

Sumber: BPS RI,2022

Selanjutnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di provinsi papua sepanjang tahun 2017-2020 juga mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2017 sebesar 34,27 meningkat menjadi 37,37 di tahun 2021, meskipun pada tahun 2018 sempat mencapai 38,35.

Tabel 3.42. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021 (Persen)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	34,27	38,35	38,21	31,49	37,37
Indonesia	8,23	7,92	7,63	8,34	8,49

Sumber: BPS RI,2022

3.3.10. Pertanian

Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebanyak 7.057 ha yang dialihkan turun menjadi 5.887 ha yang dialihkan pada tahun 2017, dimana peralihan tanah paling banyak adalah jual-beli sebanyak 6.208 ha ditahun 2016 dan 5.211 ha ditahun 2017.

Tabel 3.43. Peralihan Tanah di Provinsi Papua Tahun 2016-2017 (ha)

Tahun	2016	2017
Jual-beli	6208	5211
Pewarisan	559	451
Hibah	254	197
Tukar menukar	6	3
Lelang	30	25
Total	7057	5887

Sumber: BPS RI,2022

3.3.11. Lingkungan Hidup

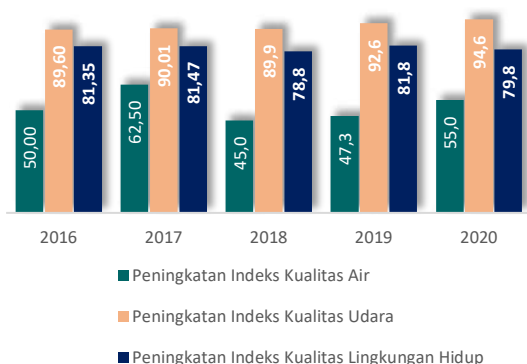
Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu isu penting di Provinsi Papua ditengah meningkatnya tekanan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan jumlah penduduk. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Papua, yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Dalam gambar di bawah ini diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Papua memiliki trend dengan pertumbuhan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 81,36 menjadi 79,80 di tahun 2020.

Adapun Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki trend yang cenderung meningkat yaitu dari 89,60 poin menjadi 94,6 poin di tahun 2020. Selanjutnya kontribusi IKA yaitu 50 poin di tahun

2016 dan meningkat menjadi 79,8 poin di tahun 2020.

Gambar 3.66. Indeks Kualitas Air, Udara dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2016-2020

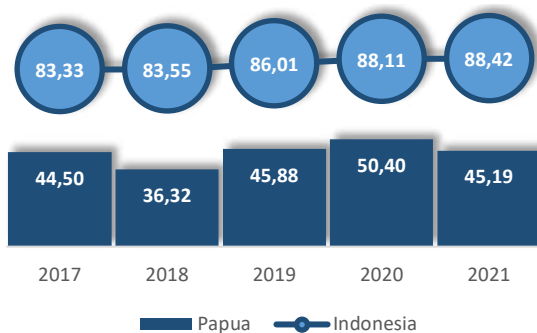


Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (data diolah, 2021)

3.3.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Persentase anak yang memiliki akte kelahiran di Provinsi Papua sepanjang tahun 2017-2021 masih rendah. Dimana persentase anak yang memiliki akte kelahiran masih dibawah 50% pertahunnya.

Gambar 3.67. Persentase Anak yang Memiliki Akte Kelahiran Tahun 2017-2021



Sumber: BPS RI, 2022

Selain kepemilikan terhadap akte kelahiran, persentase penduduk berbasis NIK di beberapa kabupaten juga terlihat masih rendah di Papua. Sampai dengan tahun 2020, tercatat persentase penduduk yang memiliki KTP adalah sebesar 67,72%, yang artinya masih terdapat 32,28% penduduk belum memiliki KTP. Sampai dengan tahun 2020 juga tercatat beberapa daerah dengan kepemilikan KTP terbilang sangat rendah yaitu kurang dari 20% di antaranya adalah kabupaten Yahukimo, Dogiyai, Nduga dan Puncak Jaya.

Tabel 3.44. Persentase Penduduk dan Anak yang Memiliki KTP Berbasis NIK Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Persentase Kepemilikan NIK		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Merauke	91,47	90,92	91,20
Jayawijaya	92,19	89,23	90,75
Jayapura	86,98	86,68	86,84
Nabire	87,16	87,75	87,43
Kepulauan Yapen	84,86	83,41	84,16
Biak Numfor	89,47	88,69	89,09
Paniai	34,25	32,88	33,59
Puncak Jaya	19,94	19,42	19,72
Mimika	81,26	80,51	80,94
Boven Digoel	95,84	96,43	96,10
Mappi	91,72	90,53	91,15
Asmat	80,29	77,1	78,69
Yahukimo	8,22	7,16	7,71
Pegunungan Bintang	42,54	41,06	41,85
Tolikara	56,05	53,73	54,98
Sarmi	88,47	88,75	88,59
Keerom	82,25	84,46	83,24
Waropen	87,94	87,69	87,82
Supiori	99,42	98,84	99,15
Mamberamo Raya	39,72	41,12	40,36
Nduga	20,29	2,52	12,03
Lanny Jaya	98,49	99	98,74
Mamberamo Tengah	93,42	92,78	93,11
Yalimo	62,65	54,36	58,77
Puncak	36,58	37,62	37,09
Dogiyai	10,96	9,7	10,33
Intan Jaya	21,76	26,07	23,89
Deiyai	n.a	n.a	n.a
Kota Jayapura	94,95	95,6	95,24
Provinsi Papua	68,52	66,82	67,72

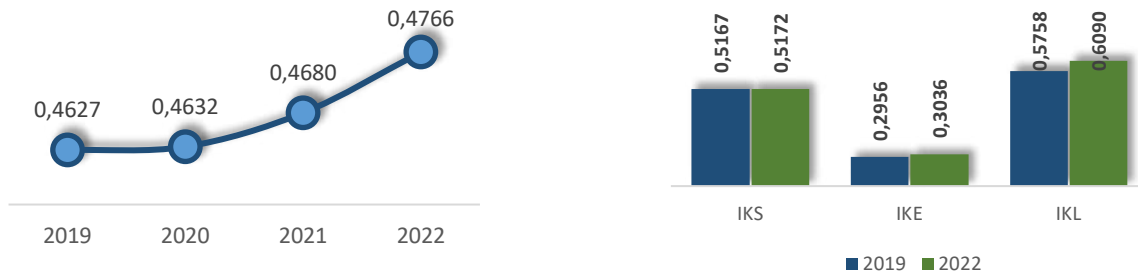
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

3.3.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Papua menjadi provinsi yang memiliki status desa sangat tertinggal terbanyak pada 2022. Hal itu tecermin dari rata-rata indeks desa membangun (IDM) di Papua nilainya paling rendah di antara provinsi yang lain, yakni 0,4766.

Angka tersebut meningkat 0,01% dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata IDM sebesar 0,4680. Hingga 2022, sebanyak 2.930 atau 64,62% desa di Papua berstatus sebagai desa sangat tertinggal dari total 4.534 desa yang terdata di wilayah tersebut. Sisanya sebanyak 1.112 atau 24,53% merupakan desa tertinggal, 450 desa atau 9,93% berstatus berkembang, 40 desa atau 0,88% berstatus maju, dan hanya 2 desa atau 0,04% berstatus sebagai desa mandiri.

Gambar 3.68. Indeks Desa Membangun Provinsi Papua



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, (data diolah, 2022)

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap. Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya. Sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan Desa tahun sebelumnya.

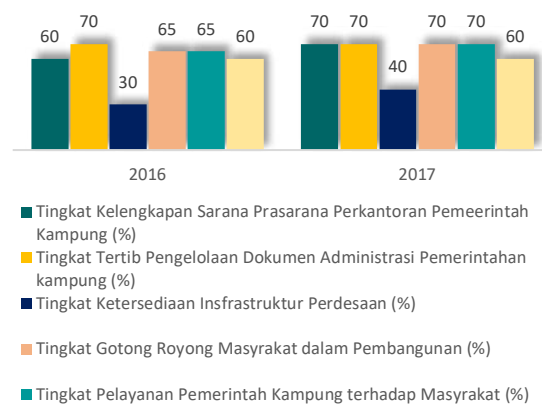
Tabel 3.45. Alokasi Dana Desa di Provinsi Papua (Rp. Triliun)

Tahun	Uraian	Dana Desa	TOTAL TKDD	% DD Terhadap TKDD
2019	Anggaran	5.238	47.782	10,96
	Realisasi	5.233	47.003	11,13
	Realisasi Capaian	99,92	98,37	101,57
2020	Anggaran	5.350	43.090	12,42
	Realisasi	5.350	42.617	12,55
	Realisasi Capaian	100	98,9	101,11
2021	Anggaran	5.434	43.181	12,58
	Realisasi	5.430	44.806	12,12
	Realisasi Capaian	99,92	103,76	96,3

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI, 2021

Pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua tidak luput dari peran Dana Desa sebagai wujud komitmen Pemerintah Pusat. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memandatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran APBN ke Desa sebesar 10% (on top) dari dana transfer daerah secara bertahap.

Gambar 3.69. Kondisi Pemerintahan Kampung



Sumber: Bappeda Papua 2018

Alokasi anggaran tersebut kemudian diberi nama Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN -yang telah diubah dua kali, terakhir PP Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN-, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk disalurkan kembali ke Rekening Kas Desa (RKD). Untuk mendapatkan penyaluran tersebut Desa harus telah menetapkan dokumen APBD dan laporan realisasi keuangan sebelumnya. Sedangkan daerah telah melaporkan konsolidasi laporan realisasi keuangan Desa tahun sebelumnya.

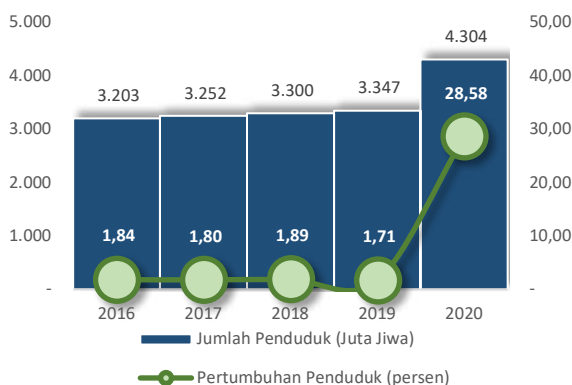
Secara keseluruhan kondisi pemberdayaan masyarakat dan kampung terjadi peningkatan. Semangat masyarakat membantu pemerintah dalam pembangunan perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Hal tersebut kiranya dapat memacu pemerintah untuk bekerja lebih giat lagi dalam pembangunan, sehingga seluruh masyarakat yang berada dipelosok dapat menikmati pembangunan yang sama

3.3.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3.3.14.1. Pengendalian Penduduk

Jumlah penduduk Papua selama periode 2016-2020 berkembang sangat pesat dan berada pada tingkat pertumbuhan yang sangat terkendali dan relatif meningkat. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Papua sebesar 3.203 juta jiwa, kemudian meningkat cukup tinggi sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 4.304 juta jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 7,16%. Pada periode 2019-2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk sangat tinggi dengan pertumbuhan mencapai 28,58 persen. Yang artinya ada penambahan sekitar 957 ribu jiwa pada 2 tahun terakhir. Adapun indikasi Jumlah ini merupakan indikasi bahwa penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya dan sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tertera di KK/KTP lagi cukup banyak.

Gambar 3.70. Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



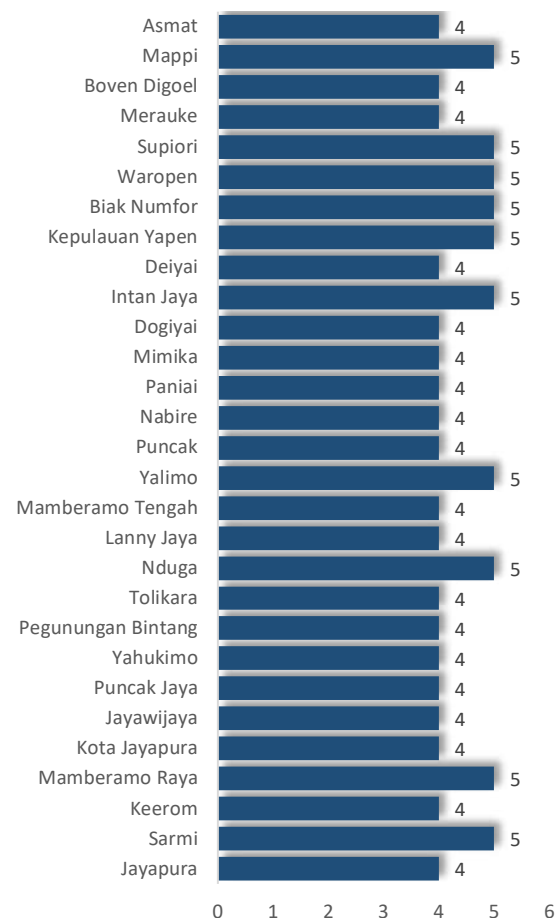
Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

Secara demografis, tujuan berencana adalah untuk menurunkan angka kelahiran sehingga

dapat menekan pertumbuhan jumlah penduduk, dengan jumlah anak yang dianjurkan pemerintah sebanyak 2 (dua) orang sehingga anggota keluarga sebanyak 4 (empat) orang. Secara filosofis adalah untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Secara keseluruhan, rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Papua juga tidak memiliki perubahan yang cukup pesat. Rata-rata jumlah anggota keluarga adalah sebesar 4 (empat) orang dalam setiap rumah tangga.

Gambar 3.71. Rata-rata Jumlah Anggota Keluarga



Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

Berdasarkan kabupaten/kota di Papua, terdapat 10 daerah yang memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga di atas rata-rata provinsi di antaranya ialah Kabupaten Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Mappi, Sarmi, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Nduga, Yalimo dan Intan Jaya yaitu rata-rata 5 (lima) orang. Sedangkan daerah lainnya memiliki rata-rata jumlah anggota keluarga di bawah rata-rata provinsi.

3.3.14.2. Keluarga Berencana

Tercatat rasio akseptor KB di Provinsi Papua menunjukkan kondisi yang cenderung semakin meningkat. Secara keseluruhan di Provinsi Papua terdapat 18 daerah yang menunjukkan rasio akseptor KB cenderung semakin meningkat. Sedangkan 11 daerah lainnya terlihat memiliki nilai yang cenderung mengalami penurunan. Adanya peningkatan rasio akseptor KB Provinsi Papua menandakan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan wilayah, terdapat 6 kabupaten dengan rasio akseptor di atas 10% setiap tahunnya selama 2016-2020. Adapun kabupaten yang dimaksud adalah Yahukimo, Lanny Jaya, Yalimo, Dogiyai, Waropen dan Supiori. Sedangkan terdapat juga daerah dengan kategori memiliki rasio akseptor sangat rendah dalam periode 2016-2020, di antaranya adalah Mamberamo Raya, Jayawijaya, Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Paniai, Mimika, Merauke, Mappi dan Asmat.

Tabel 3.46. Rasio Akseptor KB Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (%)

Wilayah Adat	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Mamta	Jayapura	37,55	86,33	0	62,18	68,77
	Sarmi	51,51	20,96	448,95	50,95	64,78
	Keerom	31,68	100	73,75	70,13	42,16
	Mamberamo Raya	100	100	0	57,06	80,12
	Kota Jayapura	85,35	98,34	0	60,32	100
La Pago	Jayawijaya	92,02	84,34	0	39,43	75,61
	Puncak Jaya	72,71	42,86	71,15	41,61	60,31
	Yahukimo	15,46	7,55	21,38	58,21	58,21
	Pegunungan Bintang	45,03	37,81	0	53,04	53,04
	Tolikara	100	100	16,11	50,56	50,56
	Nduga	100	100	0	82,61	86,32
	Lanny Jaya	9,78	68,14	16,63	51,34	51,34
	Mamberamo Tengah	55,42	100	4,39	53,03	79,8
	Yalimo	38,4	58,99	53,68	60	81,48
	Puncak	41,87	86,11	16,42	52	52
Mee Pago	Nabire	41,35	100	56,62	53,67	59,41
	Paniai	62,15	100	109,09	51,75	51,75
	Mimika	75,09	100	0	82,78	66,77
	Dogiyai	20,88	100	67,18	46,11	70,5
	Intan Jaya	27,14	100	38,3	58,27	58,27
	Deiyai	14,53	100	40,13	50,17	50,17
	Kepulauan Yapen	68,97	65,21	0	52,64	92,37
Saereri	Biak Numfor	63,13	53,92	0	50,03	71,04
	Waropen	44,93	50,7	54,14	57,52	100
	Supiori	22,33	82,24	33,57	33,09	100
Anim Ha	Merauke	54,6	61,56	82,43	40,76	50,41
	Boven Digoel	32,91	38,63	112,92	52,31	60,71
	Mappi	100	100	95,35	50,09	58,44
	Asmat	82,03	65,52	0	52,17	52,17
Papua		55,32	79,37	166,38	53,7	90,5

Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

3.3.15. Perhubungan

3.3.15.1. Transportasi Darat

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Provinsi Papua pada tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 rata-rata perbandingan Panjang jalan dengan kendaraan bermotor adalah 1 km/467 unit kendaraan, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2020 sebesar 1

km/309 unit kendaraan bermotor. Dalam pelayanan transportasi darat di Provinsi Papua, terdapat 5 terminal tipe C, yaitu:

- Entrop di Kota Jayapura;
- Wamena di Kabupaten Jayawijaya;
- Oyehe di Kabupaten Paniai;
- Merauke di Kabupaten Merauke; dan
- Biak di Kabupaten Biak Numfor.

Gambar 3.72. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (km/unit)

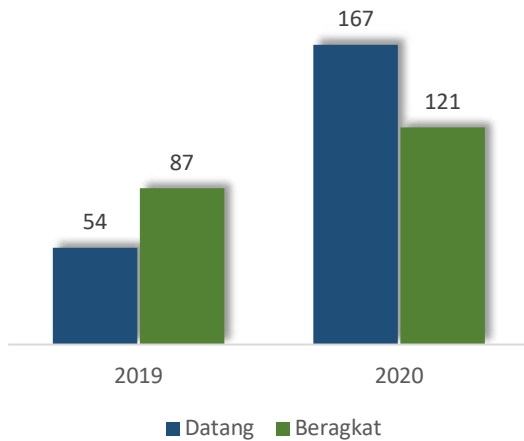


Sumber: BPS Provinsi Papua, (data diolah, 2021)

3.3.15.2. Transportasi Udara

Jumlah penumpang internasional berdasarkan moda transportasi pesawat terbang di Provinsi Papua mengalami lonjakan dari tahun 2019 sebanyak 54 penumpang meningkat di tahun 2020 menjadi 167 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 87 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 121 penumpang yang berangkat.

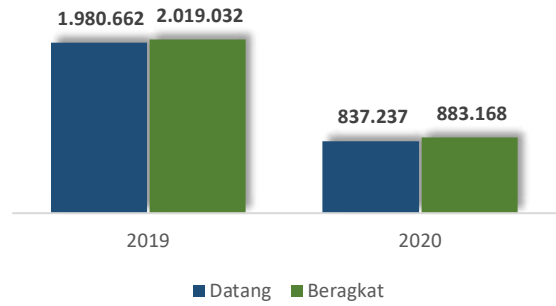
Gambar 3.73. Jumlah Penumpang Internasional berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (Orang)



Sumber: BPS RI, 2022

Berbeda dengan jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi pesawat terbang di Provinsi Papua yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 1.980,66 penumpang turun di tahun 2020 menjadi 837,23 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 2.019,03 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 883,16 penumpang yang berangkat.

Gambar 3.74. Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang (Orang)

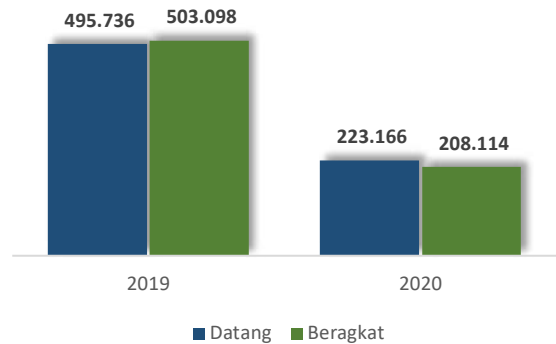


Sumber: BPS RI, 2022

3.3.15.3. Transportasi Laut

Jumlah penumpang domestik berdasarkan moda transportasi kapal di Provinsi Papua mengalami penurunan dari tahun 2019 sebanyak 495,73 penumpang turun di tahun 2020 menjadi 223,16 penumpang datang, dan pada tahun 2019 sebanyak 503,09 penumpang yang berangkat meningkat menjadi 208,114 penumpang yang berangkat menggunakan kapal laut.

Gambar 3.75. Jumlah Penumpang Domestik berdasarkan Moda Transportasi Kapal (Orang)



Sumber: BPS RI, 2022

3.3.16. Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan akses terhadap internet saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat digambarkan pada periode 2017-2021 tercatat pengguna internet dan HP mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Persentase penduduk yang dapat mengakses HP tahun 2017 adalah sebesar 36,31%, kemudian meningkat menjadi 38,94% sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut mengindikasikan kebutuhan akan telekomunikasi cukup tinggi di Papua.

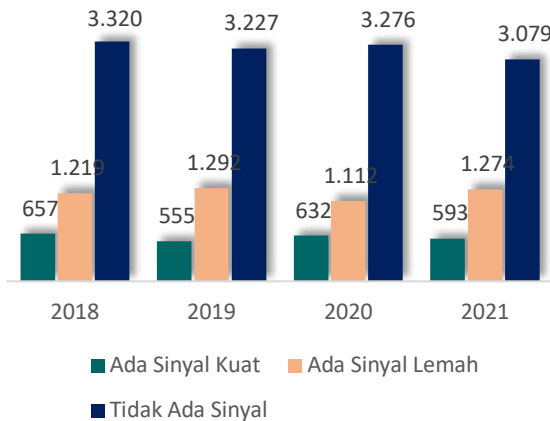
Gambar 3.76. Persentase Penduduk dan Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler



Sumber: BPS RI, 2022

Sementara persentase rumahtangga yang memiliki/menguasai telepon seluler juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 50,37% meningkat ditahun 2021 menjadi 55,59%.

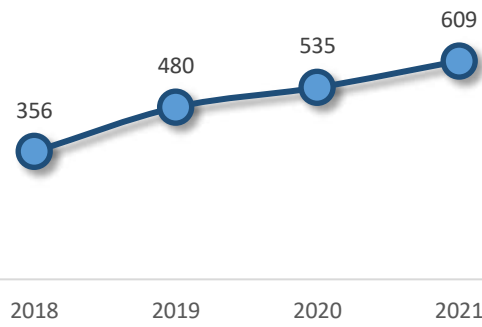
Gambar 3.77. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Menara BTS Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Selular (Desa)



Sumber: BPS RI, 2022

Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Menara BTS Menurut Penerimaan Sinyal Telepon Selular cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 657 desa yang memiliki sinyal kuat, mengalami penurunan di tahun 201 menjadi 593 desa. Selanjutnya banyaknya desa/kelurahan yang memiliki menara Base Transceiver Station (BTS) di desa mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021, dimana pada tahun 2018 sebanyak 356 desa yang memiliki BTS mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 609 desa yang memiliki BTS.

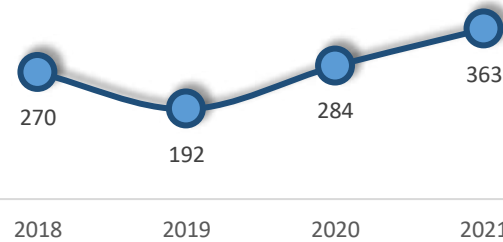
Gambar 3.78. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Menara Base Transceiver Station (BTS) (Desa)



Sumber: BPS RI, 2022

Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet di kantor desa mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 270 desa meningkat menjadi 363 desa di tahun 2021.

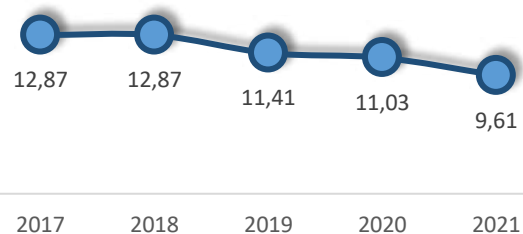
Gambar 3.79. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Internet di Kantor Desa/Lurah (Desa)



Sumber: BPS RI, 2022

Persentase rumah tangga yang memiliki/menguasai komputer di Provinsi Papua mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 12,87% turun menjadi 9,61% di tahun 2021.

Gambar 3.80. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Komputer

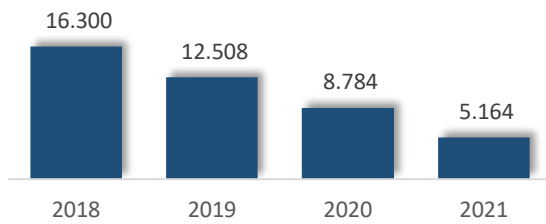


Sumber: BPS RI, 2022

Jumlah Keluarga yang Berlangganan Telepon Tetap Kabel di provinsi Papua mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebanyak 16,300 keluarga turun menjadi 5.164 keluarga yang

berlangganan telepon kabel. Hal tersebut terjadi diakibatkan adanya peralihan penggunaan telepon kabel ke telepon seluler.

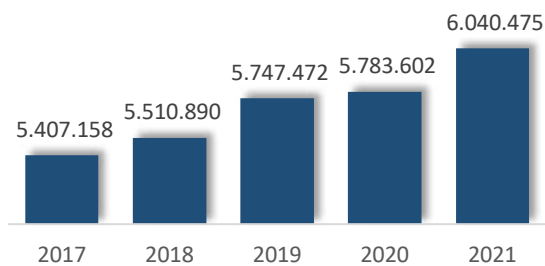
Gambar 3.81. Jumlah Keluarga yang Berlangganan Telepon Tetap Kabel (Keluarga)



Sumber: BPS RI, 2022

Rata-rata konsumsi rumah tangga yang memiliki pengeluaran telekomunikasi di Provinsi Papua mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 5,4 juta rupiah meningkat menjadi 6,04 juta rupiah per tahun.

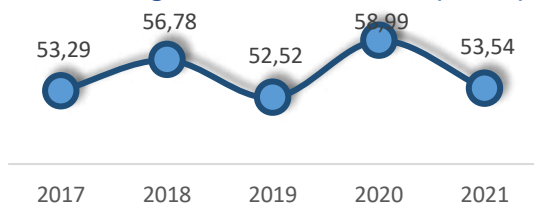
Gambar 3.82. Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga yang Memiliki Pengeluaran Telekomunikasi (Rupiah)



Sumber: BPS RI, 2022

Persentase rumah tangga yang memiliki pengeluaran telekomunikasi di Provinsi Papua mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2017 sebanyak 53,29% meningkat menjadi 53,54% di tahun 2021

Gambar 3.83. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Pengeluaran Telekomunikasi (Persen)

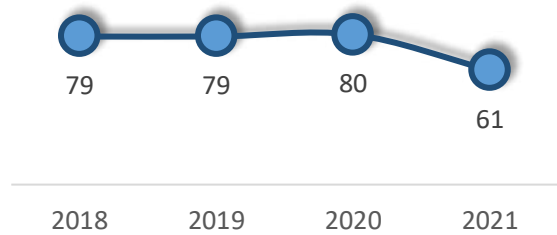


Sumber: BPS RI, 2022

Perkembangan kantor pos di Provinsi Papua mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018-2019 sebanyak 79 unit meningkat menjadi

80 unit, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 61 unit.

Gambar 3.84. Jumlah Kantor Pos Provinsi Papua Tahun 2017-2021

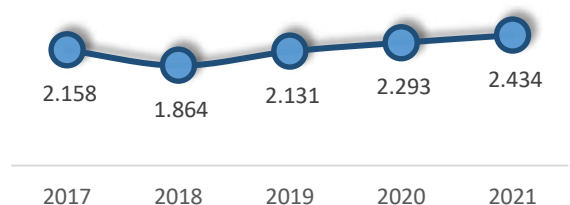


Sumber: BPS Papua, 2022

3.3.17. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Berdasarkan data statistik koperasi yang diperoleh di Provinsi Papua tercatat sampai dengan tahun 2021 koperasi yang aktif adalah berjumlah 2.434 unit koperasi. Tercatat kopeasi aktif tahun 2017 adalah sebesar 2.158 unit koperasi, kemudian terjadi peningkatan terus menerus hingga tahun 2021. adanya peningkatan jumlah koperasi aktif ini juga sangat dipengaruhi oleh Administrasi koperasi yang cukup tertata dengan baik. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi kinerja koperasi di Provinsi Papua adalah faktor modal, kemudian kapasitas SDM koperasi yang sudah cukup memadai. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi manajemen koperasi dapat berjalan optimal.

Gambar 3.85. Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2016-2020 (unit)

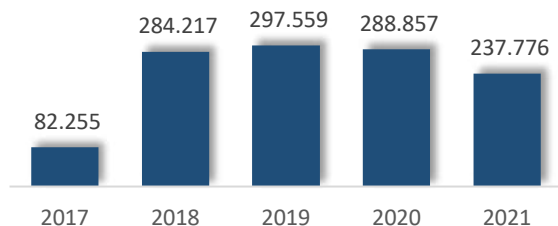


Sumber: BPS RI, 2022

Selanjutnya, jumlah usaha dalam bentuk koperasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah usaha berbadan koperasi Provinsi Papua tahun 2017 adalah sebanyak 82 miliar rupiah, kemudian meningkat cukup tinggi sampai tahun 2020 adalah sebanyak 288 miliar rupiah. Selanjutnya mengalami

penurunan menjadi 237 miliar rupiah di tahun 2021.

Gambar 3.86. Volume Usaha Koperasi (Juta Rupiah)



Sumber: BPS RI, 2022

Tabel 3.47. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Tahun 2017-2021 (Unit) (Juta US\$)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (Juta US\$)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	135	102	127	184	95	1.924	1.132	941	568	1.489
Indonesia	26.257	21.972	30.354	56.726	27.271	32.240	29.308	28.209	28.666	31.093

Sumber: BPS RI, 2022

Selanjutnya realisasi penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dimana sampai dengan tahun 2021

3.3.18. Penanaman Modal

Provinsi Papua masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sepanjang tahun 2017-2021 jumlah investor PMA di Provinsi Papua mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2021 jumlah investor PMA adalah sebanyak 95 proyek. Selain itu, realisasi investasi PMA dinilai sangat tinggi. Realisasi investasi PMA adalah sebesar 1,49 miliar US\$.

sebanyak 1.218 unit proyek dengan nilai investasi mencapai 911 miliar rupiah.

Tabel 3.48. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2017-2021 (Unit) (Milyar Rupiah)

Uraian	Proyek (Unit)					Investasi (juta Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Papua	33	23	68	323	473	1.218	105	568	2.722,2	911
Indonesia	8.838	10.815	30.451	96.623	106.002	262.351	328.605	386.498	413.536	447.064

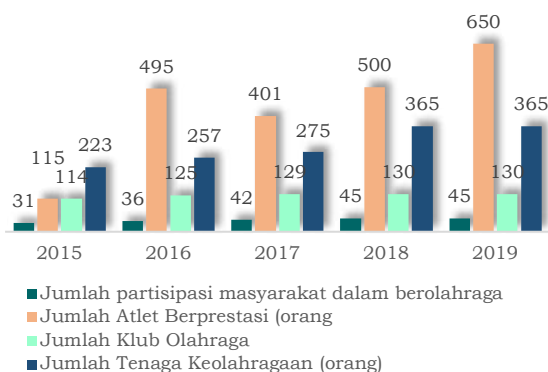
Sumber: BPS RI, 2022

3.3.19. Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.19.1. Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan

Dengan semakin banyaknya event olahraga baik pada tingkat kabupaten, nasional maupun internasional dalam beberapa tahun terakhir tercatat klub olahraga di Provinsi Papua juga kian bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan klub-klub olahraga berbagai cabang olahraga sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata bertumbuh sebesar 3,41% per tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 secara keseluruhan tercatat klub olahraga di Provinsi Papua ada 130 klub dengan berbagai macam cabang. Jumlah tenaga dan keolahragaan yang berkualitas Provinsi Papua secara konsisten juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 223 orang tenaga keolahragaan dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 365 orang.

Gambar 3.87. Pemberdayaan Organisasi Keolahragaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Tahun 2015-2019



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

Bertambahnya klub-klub olahraga tersebut diikuti dengan semakin bertambahnya atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga baik pada ajang kabupaten, nasional maupun internasional dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2015 tercatat ada sebanyak 223 orang tenaga keolahragaan dan terus meningkat sampai dengan tahun 2019

yaitu sebanyak 365 orang. Bertambahnya klub-klub olahraga tersebut diikuti dengan semakin bertambahnya atlet-atlet yang berprestasi di bidang olahraga baik pada ajang kabupaten, nasional maupun internasional dalam waktu beberapa tahun terakhir ini.

3.3.19.2. Organisasi Kepemudaan

Dari 4 (empat) indikator di atas 3 (tiga) indikator pemberdayaan pemuda mengalami peningkatan yang positif diantaranya adalah Jumlah Organisasi Olahraga, Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina dan Jumlah Organisasi Pemuda. Sedangkan pelatifa kewirausahaan terjadi penurunan dalam lima tahun terakhir. Tercatat organisasi pemuda di Provinsi Papua terus bertambah dari tahun-ke tahun, sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 52 organisasi pemuda yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah juga konsisten melakukan pembinaan maupun kegiatan pelatihan lainnya terhadap lembaga maupun organisasi kepemudaan, pada tahun 2019 sudah ada 33 lembaga/oraganisasi yang terbina

Tabel 3.49. Pemberdayaan Pemuda Provinsi Papua tahun 2016-2019 (unit)

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah Organisasi Olahraga	47	47	52	52
Jumlah Lembaga dan Organisasi Kepemudaan Terbina	30	33	33	33
Jumlah Organisasi Pemuda	32	32	32	32
Jumlah Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok Pemuda	30	115	35	35

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

3.3.19.3. Sarana dan Prasarana Olahraga

Dalam menunjang capaian olahraga yang terus konsisten, perlu juga didukung dengan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Provinsi Papua saat ini memiliki sarana dan prasarana olahraga terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019. Tercatat sarana olahraga masyarakat dan ruang publik bermutu sampai dengan tahun 2019 ada sebanyak 186 unit, kemudian gedung olaraga 34 unit dan sarana

olahraga untuk pusat pertandingan sebanyak 190 unit.

Tabel 3.50. Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi Papua tahun 2016-2019 (Unit)

Uraian	2016	2017	2018	2019
Jumlah sarana olahraga masyarakat, olahraga, pendidikan dan ruang publik bermutu	186	186	186	186
Jumlah Gedung olahraga	15	15	16	34
Jumlah sarana olahraga untuk pusat pertandingan	175	176	177	190

Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

3.3.20. Statistik

Kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Di Provinsi Papua selain didukung dengan adanya instansi BPS, Provinsi Papua juga saat ini memiliki pusat data pembangunan yang merupakan salah satu unit di bawah Bappeda yaitu Pusat Data Dan Analisis Pembangunan Provinsi Papua, yang disingkat PUSDALISBANG.

PUSDALIBANG Provinsi Papua adalah Wadah yang berfungsi sebagai pengelola data dan informasi pembangunan daerah. Selain itu Pusat Data dan Analisa Pembangunan berfungsi untuk : (1) menjembatani jaringan-jaringan dengan pemangku kepentingan pembangunan, (2) mendukung dipergunakannya data dan informasi tersebut oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, (3) mendorong pengembangan kapasitas dan secara proaktif menyebarkan data dan informasi (terutama dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada publik dan pemerintah.

Muatan utama dari produk PUSDALISBANG adalah statistik hasil-hasil pembangunan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua, penyediaan data SIPD, analisis data statistik kinerja pembangunan, dan penyajian data

statistik secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Selama tahun 2016-2018, PUSDALISBANG Provinsi Papua telah menghasilkan beberapa dokumen statistik dan analisis pembangunan, antara lain : (1) Infografis Potret Capaian Pembangunan Papua, (2) Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (3) Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Papua, (4) Pencapaian Indikator Makro Provinsi Papua, (5) Analisis Pembangunan Manusia Provinsi Papua. Dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan, PUSDALISBANG Provinsi Papua juga telah mengembangkan e-Government yang dapat diakses melalui website: https://pusdalisbang.papua.go.id/pusdalisbang_devel.

3.3.21. Kebudayaan

Untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Papua, saat ini telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seni dan budaya berupa museum dan gedung-gedung kesenian. Dimana museum yang terbesar ada 2 (dua) gedung yang berlokasi di Kota Jayapura yaitu Museum Negeri Papua yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan Museum Loka Budaya yang dikelola oleh Universitas Cenderawasih.

Koleksi seni budaya Papua pada Museum Negeri Papua kurang lebih sebanyak 3.447 koleksi yang

meliputi benda geologi, biologi, etnografi, arkeologi, sejarah, numismatik, fisiologi, keramik, seni rupa, profil manusia, peta, dan diorama. Museum ini dilengkapi fasilitas sebagai berikut, ruang Pameran Tetap, ruang Pameran Temporer, ruang Auditorium, ruang Perpustakaan, ruang laboratorium, ruang Penyimpanan Koleksi, ruang Bengkel/ Preparasi, dan ruang Administrasi. Sedangkan koleksi utama dari Museum Loka Budaya adalah benda-benda etnografi yang berasal dari 270-an suku di Papua yang terdiri atas: peralatan dapur; peralatan yang berhubungan dengan mata pencaharian hidup seperti peralatan bercocok tanam, berburu dan menangkap ikan; busana dan perhiasan tubuh; peralatan perang; peralatan membayar harta (mas kawin, denda,dll); benda-benda sakral; alat transportasi dan alat-alat musik.

Dalam Dokumen Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tercatat sudah ada 17 Karya Budaya yang merupakan warisan suku-suku asli Papua. Mulai dari Yosim Pancar, Ukiran Asmat, hingga Pokem yang merupakan salah satu kemahiran dan kerajinan tradisional Papua. Selengkapnya perkembangan WBTB Papua dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.51. Perkembangan Warisan Budaya Tak Benda Papua

Tahun	No	Nama Karya Budaya	Asal Daerah	Kategori
2016	141	Wor Biak	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-perayaan
2016	142	Elha	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	143	Aker	Papua	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta
2016	144	Honai	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	145	Khombow	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2016	146	Terfo	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
2017	142	Ndambu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	143	Yu	Papua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus dan Perayaan-perayaan
2017	144	Pokem	Papua	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2018

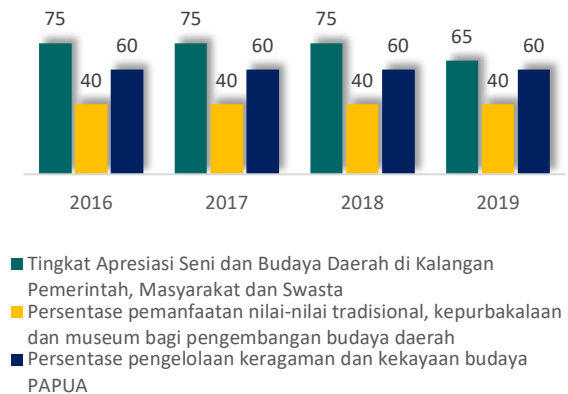
Salah satu keberhasilan pemerintah provinsi dalam mempromosikan dan menjaga kelestarian budaya Papua adalah mempatenkan Noken sebagai salah satu warisan dunia. Dimana pada tahun 2011 Noken Papua telah dinobatkan oleh

UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda dari Indonesia yang membutuhkan perlindungan mendesak. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradat. Walaupun Noken berbentuk

seperti halnya tas yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan berbagai macam benda dan peralatan, namun masyarakat Papua sendiri tidak menyebut noken sebagai tas. Bagi masyarakat Papua, Noken memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan tas yang diproduksi pabrik, baik secara bahan, jenis, model maupun bentuk Noken. Tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya daerah di Provinsi Papua dinilai cukup tinggi yaitu rata-rata sebesar 65 persen dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang seni dan budaya daerah Papua yang sudah mulai berkurang. Meskipun capaian tersebut hingga tahun 2019 terlihat menurun dari tahun sebelumnya. Tercatat pada

tahun 2016 tingkat apresiasi terhadap seni dan budaya adalah sebesar 75 persen, namun mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 65 persen.

Gambar 3. 88. Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

Gambar 3. 89. Capaian Urusan Kebudayaan Provinsi Papua Tahun 2016-2019



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

3.3.22. Perpustakaan

Secara keseluruhan jumlah perpustakaan di Provinsi Papua yang tersebar 29 kabupaten kota adalah sebesar 321 unit. Sampai dengan tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan provinsi adalah sebesar 75.146 kali dikunjungi. Kemudian, koleksi buku perpustakaan daerah adalah sebanyak 73.297 buku. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya perpustakaan di Provinsi Papua dapat memberikan ruang kepada siapa saja untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Sampai dengan tahun 2020 jumlah tamu adalah sebanyak 550.392 orang. Dikeluarkannya berbagai kebijakan pencegahan pandemik Covid-19 yang berdampak terhadap

penyelenggaraan transportasi udara dan laut menyebabkan banyak masyarakat yang enggan untuk bepergian menggunakan kapal laut dan pesawat udara.

Gambar 3.90. Kondisi Perpustakaan di Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

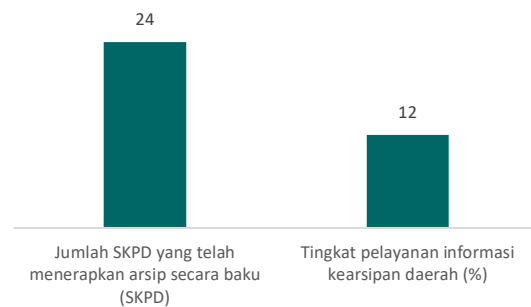
Kondisi ini akhirnya menyebabkan jumlah perjalanan wisatawan ke/dari Provinsi Papua turun dengan sangat drastis, yaitu dari 4.551.276 orang pada tahun 2019 menjadi 550.329 orang di tahun 2020, atau turun - 87,91%. Sudah tentu dengan berkurangnya jumlah wisatawan mengakibatkan jumlah dan lama menginap para tamu hotel yang ada juga ikut menurun di tahun 2020. Secara keseluruhan rata-rata lama menginap tamu hotel paling lama 2 hari.

3.3.23. Kearsipan

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Perangkat daerah (PD) yang menerapkan arsip secara baku merupakan perangkat yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan per kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, filling cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, kartu kendali masuk dan

keluar. Diketahui bahwa perangkat daerah (PD) yang telah menerapkan arsip secara baku baru mencapai 24 PD, dengan kata lain masih terdapat beberapa OPD yang belum menerapkan arsip masing-masing PD secara baku.

Gambar 3.92. Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip secara Baku di Provinsi Papua Tahun 2016

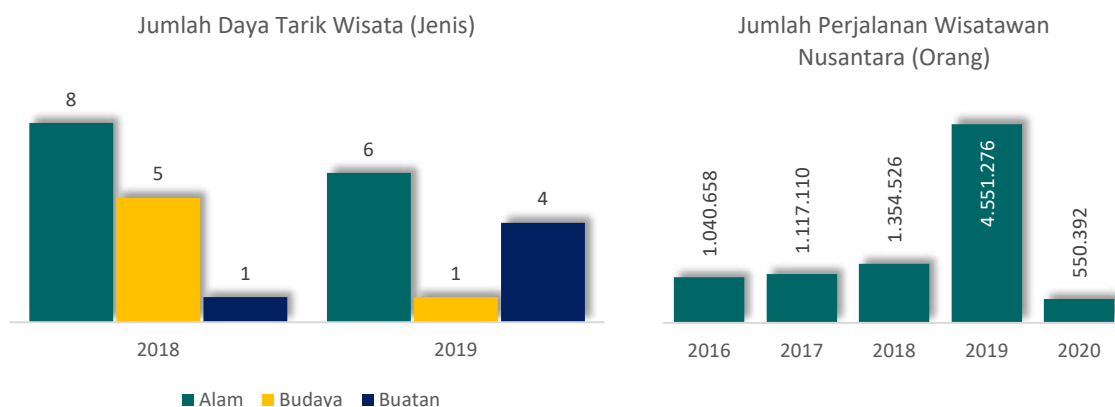


Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

3.3.24. Pariwisata

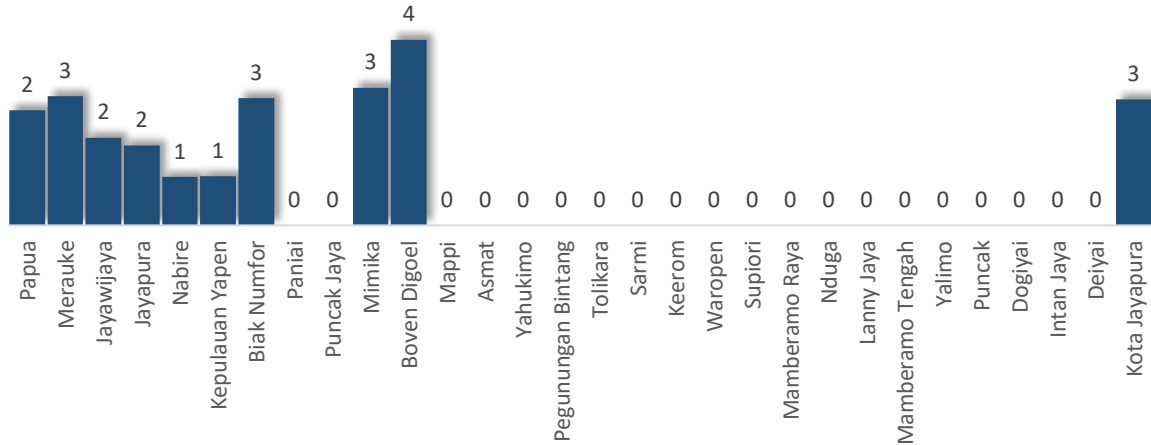
Potensi pariwisata di Provinsi Papua sangat beragam jenisnya yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Objek wisata di Papua terbagi atas dua kelompok yaitu wisata alam dan wisata buatan. Tercatat objek wisata alam di Provinsi Papua terdiri dari 6 objek, wisata budaya sebanyak 1 objek, dan objek wisata buatan sebanyak 4 objek. Tercatat pada tahun 2016-2019 terjadi peningkatan jumlah tamu baik WNA dan WNI sangat pesat yaitu sebesar 64,73 persen, kemudian menurun pada tahun 2020 cukup signifikan.

Gambar 3.93. Jumlah Daya Tarik Wisata dan Perjalanan Wisatawan di Provinsi Papua



Sumber: BPS RI, 2021

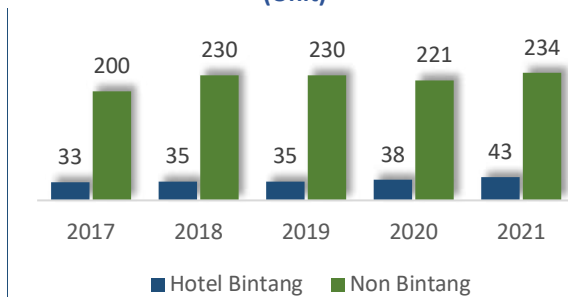
Gambar 3.94. Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Provinsi Papua Tahun 2020 (hari)



Sumber: BPS Papua, 2022

Perkembangan hotel bintang dan non bintang di Provinsi Papua mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebanyak 33 unit meningkat menjadi 43 unit, begitu pula dengan hotel non bintang yang di tahun 2017 sebanyak 200 unit meningkat menjadi 234 unit di tahun 2021.

Gambar 3.95. Perkembangan Hotel Bintang dan Non Bintang di Provinsi Papua Tahun 2017-2021 (Unit)



Sumber: BPS Papua, 2022

3.3.25. Pertanian

Perkembangan pertanian di Provinsi Papua dapat dilihat dari kontribusi sub kategori pertanian terhadap perekonomian Papua dan produktifitas serta hasil produksi pertanian di Papua. Diketahui bahwa rata-rata produktifitas pertanian secara keseluruhan terus mengalami peningkatan, meskipun terdapat dua komoditi terjadi penurunan yaitu padi sawah. Hal tersebut terlihat pada produktifitas total di Papua terus meningkat dari 6,45 ton/ha di tahun 2016 menjadi 41,44 ton/ha di tahun 2020. Rata-rata setiap tahunnya produktifitas meningkat hingga mencapai 6,99 ton/ha.

Tabel 3.52. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Komoditas Utama Pertanian Di Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Luas Panen (Hektar)						
Padi	51.730	55.004	52.412	54.132	52.728	53.201
Jagung	3.342	3.464	4.642	2.983	4.929	3.872
Kacang Kedelai	5.723	6.282	331	153	188	2.535
Kacang Tanah	2.902	3.187	1.073	571	1.217	1.790
Ubi Kayu	3.463	3.559	2.076	686	2.035	2.364
Ubi Jalar	35.863	37.656	12.813	1.145	1.969	17.889
Produksi (Ton)						
Padi Sawah	394.342	414.736	223.119	235.340	166.002	286.708
Jagung	8.143	8.550	26.430	14.141	16.767	14.806
Kacang Kedelai	7.964	9.082	477	221	295	3.608
Kacang Tanah	3.308	3.729	1.543	607	1.374	2.112
Ubi Kayu	45.059	47.112	42.209	12.609	46.654	38.729
Ubi Jalar	469.441	492.913	179.218	13.119	20.243	234.987
Produktifitas (Ton/Hektar)						

Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Padi Sawah	7,62	7,54	4,26	4,35	3,15	5,38
Jagung	2,44	2,47	56,74	47,4	45,37	30,88
Kacang Kedelai	1,39	1,45	14,4	14,47	14,47	9,24
Kacang Tanah	1,14	1,17	14,38	10,63	11,29	7,72
Ubi Kayu	13,01	13,24	203,3	183,74	160,92	114,84
Ubi Jalar	13,09	13,09	139,88	114,62	122,22	80,58
Rata-Rata	6,45	6,49	72,16	62,54	59,57	41,44

Sumber: BPS RI, 2021

Secara keseluruhan terdapat lima komoditi dengan produktifitas mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu jagung, kacang kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan rata-rata produktifitas padi sawah sepanjang tahun 2016-2020 mengalami penurunan hingga mencapai 0,45 to/ha setiap tahunnya. Namun secara nilai produksi terlihat bahwa hanya padi sawah dan kacang ang meningkat dari sisi produksi.

Dalam bidang perkebunan, secara keseluruhan luas panen untuk 5 (lima) komoditi utama perkebunan di Provinsi Papua tercatat pada tahun 2016 sebesar 229,00 ribu ha dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2020 sebesar 237,10 ribu ha.

Tabel 3.53. Luas Areal Tanam dan Produksi Komoditas Utama Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2017-2020

Komoditi	2017	2018	2019	2020
Luas Areal Tanam (Ribu Hektar)				
Kakao	10,9	34,5	34	34,1

Tabel 3.54. Produksi Tanaman Sayuran Di Provinsi Papua Tahun 2017-20201 (Ton)

Komoditi	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Bawang Merah	487	720	578	209	304	460
Bawang Putih	-	-	19	-	-	6
Bawang Daun	973	663	732	475	1.021	773
Kentang	41	28	71	2	2	29
Kubis	3.507	3.910	4.151	3.001	3.740	3.662
Kembang Kol	122	309	632	52	289	281
Petsai/Sawi	5.329	5.591	6.909	3.333	6.073	5.447
Wortel	60	62	90	10	18	48
Lobak	-	-	15	14	-	10
Kacang Merah	20	44	75	2	-	35
Kacang Panjang	7.259	7.159	5.677	3.990	6.813	6.180
Cabai Besar	2.453	3.412	3.033	1.993	3.016	2.781
Cabai Rawit	6.425	6.944	4.388	3.436	5.054	5.249
Tomat	12.314	8.220	9.850	6.804	8.569	9.151
Terung	5.625	4.837	4.501	4.501	3.846	4.662
Buncis	3.157	2.803	2.786	1.994	2.550	2.658
Ketimun	6.779	5.075	4.766	2.551	3.118	4.458
Labu Siam	645	637	2.245	461	559	909
Kangkung	7.097	6.225	6.370	4.508	8.027	6.445

Komoditi	2017	2018	2019	2020
Kopi	10,9	11,6	12,3	12,5
Kelapa	25,2	25,5	25,5	25,6
Karet	3,9	4	4,8	5,2
Sawit	178,1	157,2	173,7	159,7
Produksi (Ribu Hektar)				
Kakao	9,6	10,8	10,4	10,4
Kopi	2,5	2,7	2,8	2,8
Kelapa	13,9	15	15,2	14,8
Karet	4,1	4,1	4,1	3,7
Sawit	158,9	345,1	437,7	557,6
Produktifitas (ton/ha)				
Kakao	880,73	313,04	305,88	304,99
Kopi	229,36	232,76	227,64	224
Kelapa	551,59	588,24	596,08	578,13
Karet	1.051,28	1.025,00	854,17	711,54
Sawit	892,2	2.195,29	2.519,86	3.491,55

Sumber: BPS RI, 2021

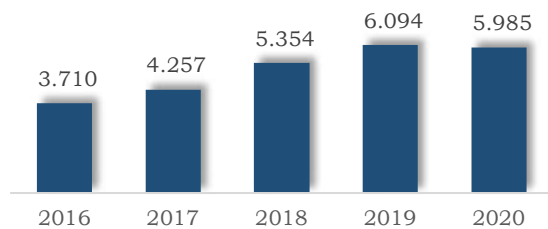
Secara keseluruhan terdapat sebelas jenis sayuran yang memiliki produksi diatas 1000 ton yaitu Kubis, Petsai/Sawi, Kacang Panjang, Cabai Besar, Cabai Rawit, Tomat, Terung, Buncis, Ketimun, Kangkung, Bayam, dimana jenis sayuran lainnya masih dibawah 1000 ton untuk produksinya.

Komoditi	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Bayam	3.165	3.031	3.353	1.176	2.711	2.687
Melinjo	4	209	253	742	73	256
Paprika	9	-	8	-	1	5
Petai	13	86	15	15	68	39
Jengkol	1	11	11	6	10	8

Sumber: BPS RI, 2022

Secara keseluruhan kelompok tani yang terdata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 terdapat 3.710 kelompok, meningkat sebesar 61,99% menjadi 5.985 kelompok di tahun 2020, atau dengan kata lain terdapat 2.275 kelompok tani baru terbentuk rentang 5 tahun terakhir.

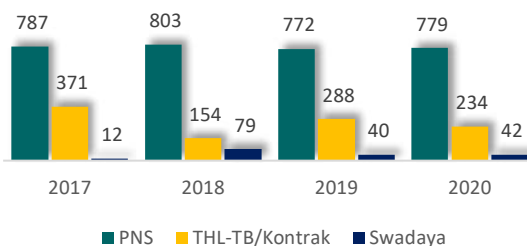
Gambar 3.96. Jumlah Kelompok Tani di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (Kelompok)



Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, (data diolah, 2021)

Meningkatnya kelompok tani pertanian tidak diimbangi dengan tenaga penyuluh pertanian di masing-masing kabupaten/kota di Papua. Total penyuluh di Provinsi Papua pada tahun 2017 mencapai 1.170 tenaga penyuluh, kemudian berkurang hingga tahun 2020 sebesar 115 orang menjadi 1.055 orang.

Gambar 3.97. Jumlah Penyuluh Pertanian di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (Orang)



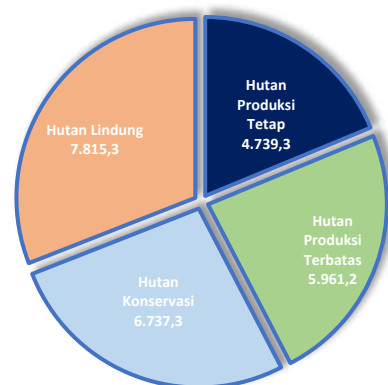
Sumber: Kementerian Pertanian Republik Indonesia, (data diolah, 2021)

3.3.26. Kehutanan

Aktivitas pengundulan hutan atau deforestasi di Provinsi Papua cenderung mengalami penurunan dan membaik, meskipun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi. Sampai

dengan tahun 2020 deforestasi hutan tetap tercatat sebesar 1.266,70 juta Ha, angka tersebut menurun dari tahun sebelumnya sebesar 22,24%. Kemudian pada hutan produksi yang dapat dikonversi juga terlihat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 60,08%. Sedangkan pada area penggunaan lain memiliki trend positive, artinya terjadi peningkatan deforestasi pada area tersebut.

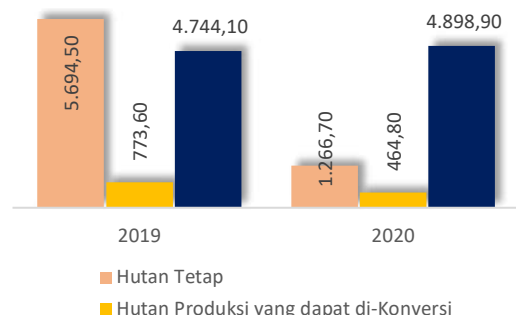
Gambar 3.98. Luas Penutupan Lahan di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tahun 2020 (ribu ha)



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Dengan luas kawasan hutan yang cukup besar, di dalamnya terdapat beberapa potensi hasil hutan yang cukup banyak di antaranya ialah produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu kapis dan verner dengan jumlah produksi yang berbeda-beda setiap jenisnya.

Gambar 3.99. Angka Deforestasi di Provinsi Papua Tahun 2019-2020 (ha)



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

Produksi kayu bulat dan kayu gergajian dalam pada periode 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Selain itu, produksi kayu dan verner mengalami peningkatan jumlah produksi hingga di tahun 2020.

Tabel 3.55. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenisnya di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (m3)

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu Lapis	Verner
2016	525.314	112.064	238.624	9.450
2017	439.120	109.854	217.145	-
2018	474.279	106.268	206.580	-
2019	456.631	126.163	199.680	-
2020	463.470	140.674	149.461	65.928

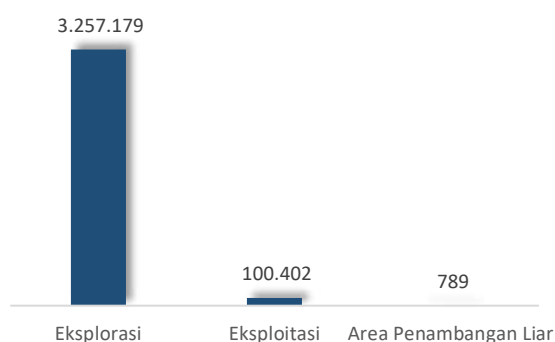
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

3.3.27. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.3.27.1. Luas Areal Pertambangan

Luas lahan pertambangan secara keseluruhan tercatat adalah sebesar 3,35 juta ha yang terdiri atas kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan penambangan liar. Luas areal pertambangan di Provinsi Papua didominasi oleh kegiatan eksplorasi yang meningkat pesat. Tercatat 96,99% dari luas areal pertambangan merupakan areal yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi, kemudian 2,99% adalah areal eksploitasi, dan 0,02% adalah penambangan liar.

Gambar 3.100. Luas Areal Penggunaan Lahan Pertambangan Provinsi Papua (ha)



Sumber: Bappeda Provinsi Papua, 2021

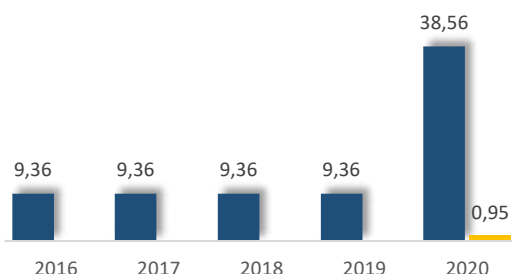
3.3.27.2. Potensi Sumber Daya Mineral

Jumlah sumberdaya berubara yang terdata di Provinsi Papua pada tahun 2016 mencapai 9,36 juta ton meningkat menjadi 38,56 juta ton. Sedangkan, jumlah cadangan batubara sampai dengan tahun 2020 mencapai 950 ribu ton.

Peningkatan tersebut disebabkan karena bertambahnya daerah yang ditemukan potensi

sumber daya batubara di wilayah Papua. Perlu adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Papua untuk mengeksplorasi sumber daya batubara yang ada sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Gambar 3.101. Potensi Mineral Batubara di Provinsi Papua (juta ton)

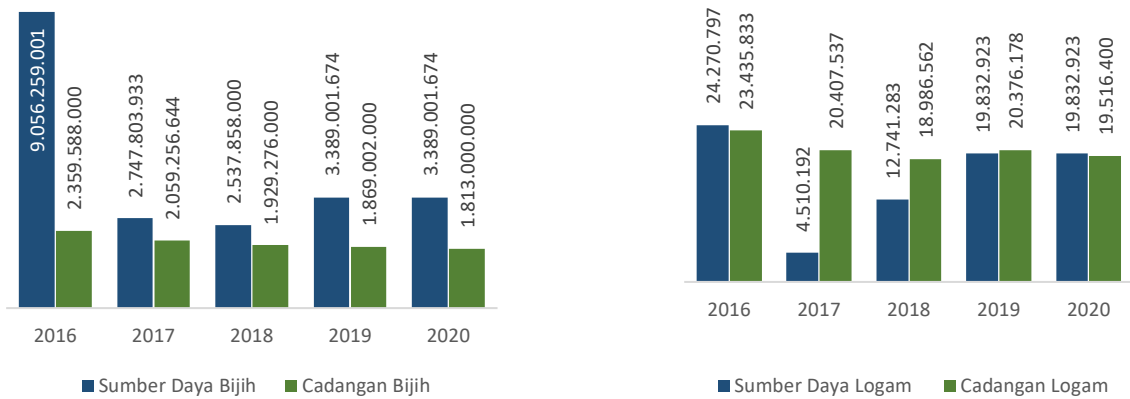


■ Jumlah Sumber Daya Batubara ■ Jumlah Cadangan Batubara

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021

Selanjutnya, jumlah cadangan biji dan logam tembaga dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Tercatat potensi sumber daya tembaga mencapai 9,06 miliar bijih ton tembaga dengan cadangan sebesar 2,36 miliar bijih ton tembaga pada tahun 2016, kemudian angka tersebut menurun di tahun 2020 sebesar 3,37 miliar bijih ton tembaga dengan cadangan sebesar 1,81 miliar ton bijih tembaga. Begitupun dengan cadangan logam tembaga pada tahun 2016 adalah sebesar 23,44 juta ton, turun menjadi 19,52 juta ton. Hal yang sama juga terjadi pada sumberdaya tembaga yang juga mengalami penurunan setiap tahunnya.

Gambar 3.102. Potensi Mineral Tembaga di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton)

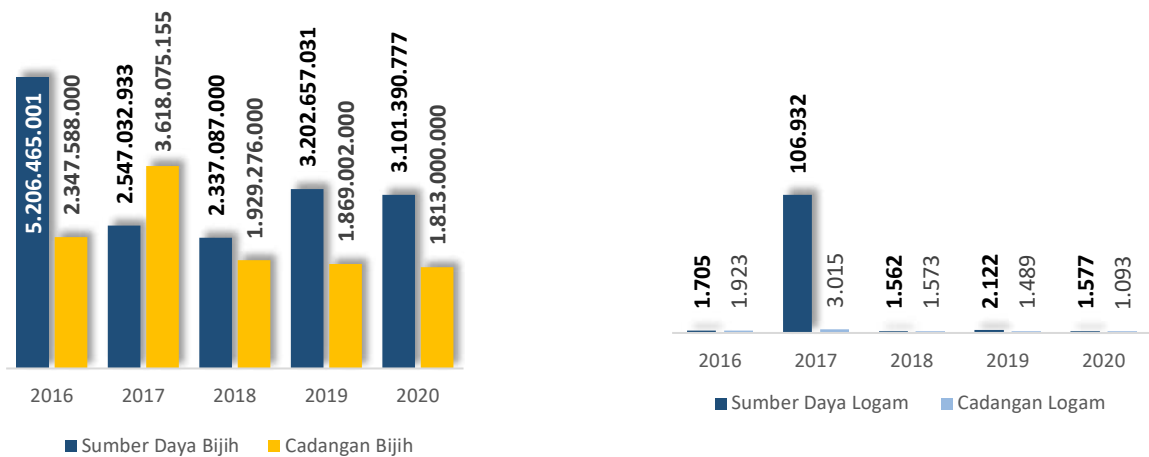


Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021

Selanjutnya, hal yang sama juga terjadi sumber daya dan cadangan emas primer yang terus mengalami penurunan hingga lima tahun terakhir. tercatat potensi sumber daya biji emas yang terdapat di Papua adalah sebesar 5,20

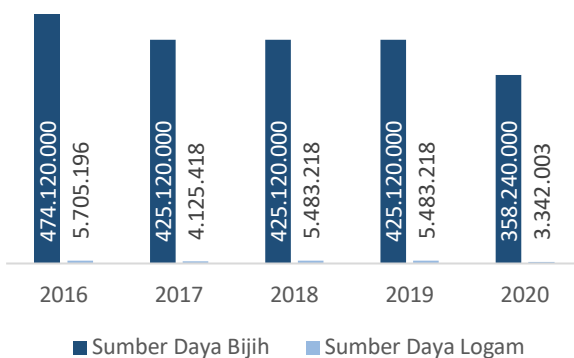
miliar bijih ton dengan cadangan 2,36 miliar bijih ton. Kondisi ini terus menurun hingga tahun 2020 sebesar 3,37 miliar bijih ton sumber daya yang tersedia dengan cadangan mencapai 1,81 miliar bijih ton.

Gambar 3.103. Potensi Mineral Emas Primer di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton)



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021

Gambar 3.104. Potensi Mineral Nikel di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton)



Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021

Selanjutnya, potensi sumber daya nikel di Provinsi Papua tahun 2016-2020 cenderung juga mengalami penurunan. Tercatat sumber daya nikel tahun 2020 adalah sebesar 358 juta ton dengan cadangan mencapai 3,34 juta ton bijih nikel.

3.3.27.3. Ketersediaan dan Sumber Penerangan

Persentase rumah tangga di Provinsi Papua yang telah menggunakan listrik (PLN dan non PLN) terlihat fluktuatif dan cenderung menurun selama lima. Tahun terakhir. Pada tahun 2016

rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan Non PLN baru mencapai 50,9% kemudian turun menjadi 43,14% pada tahun 2020. Dari data BPS terlihat rumah tangga menurut sumber penerangan yang paling rendah pada tahun 2020 tersebar paling banyak pada wilayah adat

La Pago diantaranya ialah Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lanny Jaya dan Mamberamo Tengah. sedangkan pada daerah lain seperti Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Mappi dan Asmat juga masuk dalam kategori sangat rendah.

Tabel 3.56. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik PLN Tahun 2016-2020 (persen)

Kabupaten/ Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
MAMTA										
Jayapura	99,78	0,22	97,07	2,93	97,99	2,01	99,85	0,15	94,75	5,25
Sarmi	79,14	20,86	81,85	18,15	85,22	14,79	90,92	9,08	80,52	19,48
Keerom	92,11	7,89	95,54	4,46	97,54	2,47	94,62	5,37	82,5	17,5
Mamb. Raya	51,74	48,26	43,88	56,12	64,81	35,19	74,01	25,99	27,89	72,11
Kota Jayapura	99,48	0,52	99,88	0,12	99,28	0,72	100	0	99,08	0,93
LA PAGO										
Jayawijaya	48,71	51,29	57,93	42,07	79,15	22,5	73,66	26,34	34,1	65,89
Puncak Jaya	12,16	87,84	14,91	85,09	17,58	82,42	87,19	12,81	0,5	99,5
Yahukimo	5,79	94,21	2,9	97,1	5,49	94,51	15,7	84,3	6,85	93,16
Peg. Bintang	19,01	80,99	34,22	65,78	52,85	47,15	83,91	18,09	2,73	97,27
Tolikara	7,56	92,44	11,07	88,93	74,99	25,01	85,23	14,76	0	100
Nduga	11,18	88,82	6,49	93,51	11,08	88,92	49,87	50,13	0,55	99,45
Lanny Jaya	9,49	90,51	3,09	96,91	44,11	55,89	73,25	26,74	0,02	99,98
Mamb. Tengah	86,93	13,07	38,92	61,08	4,08	95,92	80,56	19,44	0,15	99,85
Yalimo	37,02	62,98	85,83	14,17	74,57	25,43	85,91	14,09	32,74	67,26
Puncak	5,27	94,73	15,15	84,85	0	100	2,79	97,21	0	
MEE PAGO										
Nabire	82,58	17,42	92,65	7,35	89,78	10,22	95,34	4,67	91,15	8,85
Paniai	22,92	77,08	31,97	68,03	44,05	55,96	38,45	61,45	8,89	91,11
Mimika	96,12	3,88	98,14	1,86	99,83	0,18	88,34	11,66	85,28	14,72
Dogiyai	18,58	81,42	3,61	96,39	27,4	72,6	4	95,99	8,29	91,71
Intan Jaya	9,87	90,13	11,06	88,94	30,36	69,64	89,25	10,75	0	100
Deiyai	49,7	50,3	44,65	55,35	94	6	72,93	27,07	27,71	72,29
SAERERI										
Kep. Yapen	65,49	34,51	70,4	29,6	77	23,01	76,48	23,51	67,83	32,17
Biak Numfor	98,65	1,35	98,64	1,36	98,87	1,31	98,96	1,03	99,31	0,69
Waropen	87,72	12,28	93,03	6,97	93,82	6,18	88,31	11,7	72,21	27,79
Supiori	59,91	40,09	74,21	25,79	96,58	3,42	95,96	4,03	73,12	26,88
ANIM HA										
Merauke	93,89	6,11	94,7	5,3	95,54	4,46	94,98	5,01	87,76	12,24
Boven Digoel	69,6	30,4	91,64	8,36	86,04	13,96	86,52	13,48	53,09	46,91
Mappi	23,67	76,33	26,86	73,14	48,95	51,05	43,38	56,62	21,66	78,34
Asmat	18,18	81,82	81,29	18,71	79,82	20,18	64,89	35,11	18,65	81,35
Papua	50,9	49,1	55,82	44,18	64,51	35,56	73,63	26,43	43,14	56,86

Sumber: BPS Papua, 2021

3.3.28. Perdagangan

Volume ekspor menurut negara tujuan pada tahun 2018 mencapai 1.424.134.300 ton dengan jumlah volume ekspor paling tinggi benua wilayah Eropa sebesar 239.750.000 ton. Pada tahun 2020 jumlah ekspor terlihat mengalami penurunan, meskipun meningkat dari tahun

sebelumnya yaitu dari 742.324.122 ton di tahun 2019 menjadi 1.030.324.662 ton di tahun 2020, dengan benua tujuan ekspor terbesar adalah Asia sejumlah 792.739.343 ton. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini

Tabel 3.57. Volume Ekspor dan Impor Menurut Negara Tujuan Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton)

Negara Tujuan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan (Ton)			Volume Impor Menurut Negara Asal (Ton)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
ASIA	4.431.236	613.903.804	792.739.343	279.047.212	229.764.215	166.494.803
Jepang	1.098.615.299	70.000.000	227.000.400	2.983	460	2.409
Singapura	-	-	-	269.460	221.335	133.058.940

Negara Tujuan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Negara Tujuan (Ton)			Volume Impor Menurut Negara Asal (Ton)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Korea Selatan	210.426.682	50.000.000	143.513.900	-	-	-
Filipina	85.150.000	261.060.110	15.000.000	279.086	463.935	255.815
Tiongkok	311.818.282	100.776.998	218.000.800	1.570.997	1.842.140	57.138
India	335.550.000	96.875.000	138.905.842	-	-	-
Malaysia	-	-	-	4.333.319	4.481.918	33.097.474
Asia Lainnya	151.239.100	35.191.696	50.318.401	420.899	1.180.971	23.027
EROPA	239.750.000	40.000.000	169.000.000	625.538	6.237	10.322
Spanyol	84.000.000	30.000.000	42.000.000	-	-	-
Inggris	-	-	-	205	434	699
Jerman	20.000.000	10.000.000	84.000.000	617	2	-
Swiss	-	-	-	10	34	13
Italia	-	-	-	254	179	3
Eropa Lainnya	135.750.000	-	43000000	8011	3920	7147
AMERIKA	26.731.768	45.360.309	56.765.890	5.667.136	335.387	277.163
Amerika Serikat	26.501.408	45.360.309	56.765.890	5.534.606	178.176	210.823
Kanada	-	-	-	132.408	151.840	6.318
Amerika Lainnya	230.360	-	-	122	5371	316
OCEANIA	2.354.305	2.042.104	66.545	50.410.145	30.573.328	24.937.204
Australia	55.806	41.156	66.545	50.234.135	30.353.375	24.859.891
Selandia Baru	-	-	-	855	197	6453
Oseania Lainnya	2.298.499	2.000.948	275.934	175.155	219.756	7.086
TIMUR TENGAH	56.682.928	41.017.905	11.476.950	-	-	-
Saudi Arabia	40.695.485	37.140.855	11.476.950	-	-	-
Uni Emirat Arab	8.200.533	1.529.780	-	-	-	-
Timur Tengah Lainnya	7.786.910	2.347.270	-	-	-	-
Negara Lainnya	-	-	-	0	1700	-
Jumlah	1.424.134.300	742.324.122	1.030.324.662	335.750.031	260.680.867	191.719.492

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Sedangkan volume impor menurut negara asal pada tahun 2018 mencapai 335.750.031 ton dengan jumlah volume impor paling tinggi benua wilayah Asia sebesar 279.047.212 ton. Dan pada

tahun 2020 impor barang terlihat menurun yaitu sebesar 191.719.492 ton, dengan benua tujuan impor terbesar adalah Asia sejumlah 166.494.803 ton.

Tabel 3.58 Volume Ekspor dan Impor Menurut Pelabuhan Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (ton)

Pelabuhan Ekspor	Volume Ekspor Menurut Pelabuhan (Ton)			Volume Impor Menurut Pelabuhan (Ton)		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Frans Kaisepo	-	2.613	-	-	-	-
Jayapura	2.896.929	4.762.209	275.934	209.907	1.712.175	49.942
Serui	49.872.958	99.362.204	97.068.210	513.617	125.072	131.384
Merauke	1.892.532	8.344.477	-	597.553	1.225.803	-
Amamapare	1.307.049.436	527.291.156	900.072.345	328.695.490	252.995.372	187.634.993
Sentani	417	5.888	2.731	2.228.755	2.963.865	3.877.343
Bade	62.422.028	99.493.697	32.905.442	2.724.345	-	-
Kimaam	-	3.060.110	-	-	-	-
Ubrub	-	-	-	39	1	-
Nabire	-	-	-	700.773	1.658.578	25.830
Ilaga	-	-	-	-	1	-
Wamena	-	1.768	-	-	-	-
Numfoor	-	-	-	-	-	-
Wagethe	-	-	-	79.552	-	-
Jumlah	1.424.134.300	742.324.122	1.030.324.662	335.750.031	260.680.867	191.719.492

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Nilai ekspor yang dihasilkan dalam waktu lima tahun terakhir memiliki trend yang negative, hal

tersebut juga dilihat pada volume barang yang diekspor terlihat juga mengalami penurunan.

Nilai ekspor menurut golongan barang yang paling tinggi sepanjang tahun 2018-2020 didominasi oleh golongan barang Bijih Tembaga

dan Konsentrat (HS26). Kemudian diikuti dengan golongan barang Kayu dan Barang dari Kayu (HS44).

Tabel 3.59. Volume dan Nilai Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Digit Provinsi Papua Tahun 2016 – 2020 (ton/US\$)

Golongan Barang	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bijih Tembaga dan Konsentrat (HS26)	Volume (kg)	1.114.400	952.440.410	1.306.650.600	527.250.100	900.005.800
	Nilai (US\$)	1.907.955.250	2.341.210.268	3.758.070.560	1.086.855.063	1.824.511.256
Kayu dan Barang dari Kayu (HS44)	Volume (kg)	144.500	147.458.682	107.346.349	132.802.708	97.069.874
	Nilai (US\$)	96.181.410	100.430.276	90.379.995	88.227.769	74.404.746
Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03)	Volume (kg)	6.314	8.170	557	13.934	2.731
	Nilai (US\$)	59.166	270.868	17.722	206.060	24.786
Lemak Nabati & Hewani (HS15)	Volume (kg)	47.955	211.493	7.659.152	73.745.856	32.922.754
	Nilai (US\$)	79.907	61.197	3.289.522	29.428.818	17.836.232
Lainnya	Volume (kg)	584.338	9.499.657	2.477.642	8.511.524	323.503
	Nilai (US\$)	1.259.538.627	18.813.681	4.704.288	5.027.544	592.071
Jumlah	Volume (kg)	1.259.539	1.109.618.412	1.424.134.300	742.324.122	1.030.324.662
	Nilai (US\$)	2.008.078.061	2.460.786.291	3.856.462.086	1.209.745.254	1.917.369.092

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

Andil ekspor Provinsi Papua terhadap nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 2016-2020 rata-rata sebesar 1,37% setiap tahunnya.

Sedangkan andil nilai impor Papua terhadap Indonesia dalam lima tahun terakhir adalah rata-rata sebesar 0,28% per tahunnya.

Tabel 3.60. Nilai Ekspor-Impor Provinsi Papua dan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2016-2020 (US\$/%)

Tahun	Ekspor			Impor		
	Papua	Indonesia	Andil	Papua	Indonesia	Andil
2016	2.008,10	145.186,20	1,38	721,3	135.652,90	0,53
2017	2.460,79	168.828,20	1,46	446,61	156.985,50	0,28
2018	3.856,46	180.012,70	2,14	520,42	188.711,30	0,28
2019	1.209,75	167.683,00	0,72	355,35	170.727,40	0,21
2020	1.917,40	163.191,80	1,18	199,70	141.568,80	0,14

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021

3.3.29. Perindustrian

Jumlah Perusahaan pada pada Klasifikasi Industri pada Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Papua tahun 2020 sebanyak 15.481 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja mencapai 27.333 orang tenaga kerja. Bila dilihat menurut kabupaten/kota, di kabupaten Merauke Jumlah Perusahaan pada pada Klasifikasi Industri pada Industri Mikro dan Kecil yang paling tinggi, terdapat sebanyak 2.068 perusahaan yang menyerap sebanyak 3.849 tenaga kerja.

Tabel 3.61. Jumlah Perusahaan pada pada Klasifikasi Industri pada Industri Mikro dan Kecil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, 2020

Kabupaten/Kota	Perusahaan	Tenaga Kerja
Merauke	2.068	3.849
Jayawijaya	160	312
Jayapura	1.227	2.011
Nabire	908	1.763
Kepulauan Yapen	1.731	3.403
Biak Numfor	2.542	4.230

Kabupaten/Kota	Perusahaan	Tenaga Kerja
Paniai	22	64
Puncak Jaya	157	622
Mimika	1.150	1.950
Boven Digoel	312	598
Mappi	462	739
Asmat	60	83
Yahukimo	16	60
Pegunungan Bintang		
Tolikara	-	-
Sarmi	96	98
Keerom	179	307
Waropen	455	776
Supiori	1.745	2.414
Mamberamo Raya	89	208
Nduga	56	95
Lanny Jaya	-	-
Mamberamo Tengah	-	-
Yalimo	-	-
Puncak	-	-
Dogiyai	-	-
Intan Jaya	-	-
Deliyai	-	-
ota/Municipality	362	362
Jayapura	1.684	3.389
Papua	15.481	27.333

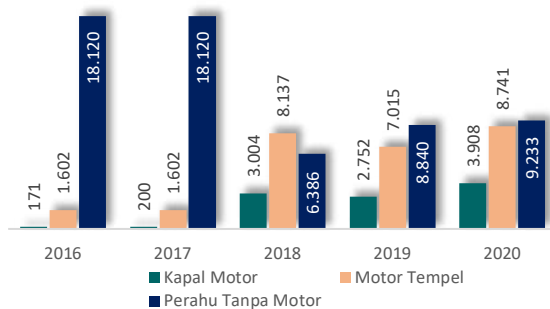
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

3.3.30. Kelautan dan Perikanan

Perahu/Kapal tangkap ikan terbagi 3 yaitu, kapal motor, perahu tak bermotor dan perahu motor tempel. Pada tahun 2016 jumlah perahu/kapal tangkap ikan sebanyak 171, pada tahun 2018 meningkat hingga 3.004 unit, dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 jumlah perahu/kapal tangkap ikan meningkat menjadi 3.908 unit.

Sementara pada jenis unit penangkapan ikan yaitu motor tempel di tahun 2016 mencapai 1.602 unit dan meningkat hingga tahun 2018 menjadi 8.137 unit. dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi 8.741 unit. Kemudian jenis penangkapan ikan yaitu perahu tanpa motor di tahun 2016 mencapai 18.120 unit dan cenderung menurun menjadi 9.233 unit perahu tanpa motor di tahun 2020.

Gambar 3.105. Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020 (Unit)



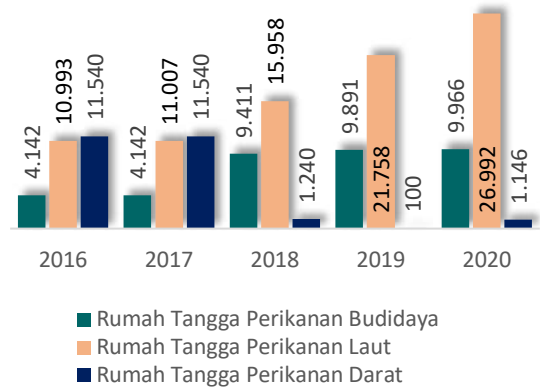
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, (data diolah, 2021)

Jumlah rumah tangga perikanan di Provinsi Papua sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung fluktuatif. Adapun terdapat 3 rumah tangga perikanan di Provinsi Papua, antara lain Rumah tangga perikanan budidaya, perikanan laut dan perikanan darat. Pada tahun 2016 sebanyak 4.142 rumah tangga perikanan

budidaya dan meningkat hingga tahun 2020 menjadi 9.966 rumah tangga perikanan budidaya. Kemudian rumah tangga perikanan laut juga cenderung meningkat dari 10.933 di tahun 2016 menjadi 21.758 rumah tangga perikanan laut di tahun 2019. Berbeda dengan rumah tangga perikanan darat yang cenderung menurun sangat pesat yaitu dari 11.540 rumah tangga perikanan darat di tahun 2016 menjadi 100 rumah tangga perikanan darat di tahun 2020.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, produksi perikanan di Provinsi Papua terlihat terus mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2020, volume produksi perikanan darat mencapai 24.265 ton dengan nilai produksi sebesar 1,1 miliar rupiah. Sementara volume produksi pada perikanan tangkap laut mencapai 245.048 ton dengan nilai produksi sebesar 8,7 miliar rupiah. Sedangkan volume produksi perikanan budidaya mencapai 17.200 ton dengan nilai produksi sebesar 360,7 juta rupiah.

Gambar 3.106. Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Provinsi Papua Tahun 2016-2020



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

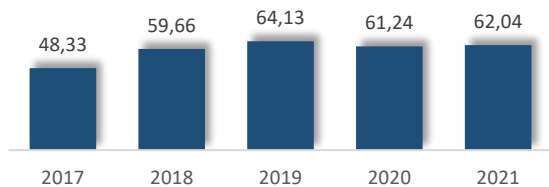
Tabel 3.62. Produksi Perikanan Provinsi Papua Tahun 2016-2020

Tahun	Perikanan Tangkap Darat		Perikanan Tangkap Laut		Perikanan Budidaya	
	Volume Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Volume Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)	Volume Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
2016	6.735	388.001.968	22.528	6.320.663.902	11.039	202.494.670
2017	13.252	311.490.898	175.211	5.772.625.021	10.762	348.605.494
2018	21.131	857.472.587	222.925	7.566.379.821	11.251	75.464.149
2019	23.562	1.138.126.236	220.486	7.520.241.157	696	6.267.843
2020	24.266	1.162.442.664	245.048	8.772.612.331	17.200	360.797.536

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan, angka konsumsi ikan Provinsi Papua tahun 2021 sebesar 62,04 kg/kapita. Angka ini naik 0,8% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 61,24 kg/kapita.

Gambar 3.107. Angka Konsumsi Ikan di Provinsi Papua (kg/kapita) Tahun 2017-2021



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

3.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH (ADSD)

3.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

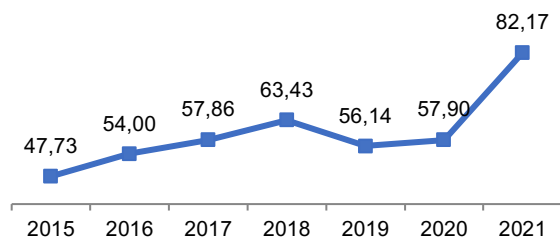
Salah satu aspek daya saing bagi suatu wilayah adalah melalui kemampuan ekonomi. Daya saing ekonomi daerah di Provinsi Papua ditinjau dari pengeluaran per kapita dan pengeluaran konsumsi makan.

3.4.1.1. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan suatu perhitungan untuk melihat tingkat kemakmuran pada suatu

wilayah. PDRB per kapita didapatkan dengan menghitung pendapatan rata-rata penduduk dari hasil pembagian PDRB dengan populasi yang ada pada suatu wilayah. Semakin tinggi pendapatan per kapita artinya semakin tinggi tingkat kemakmuran suatu wilayah.

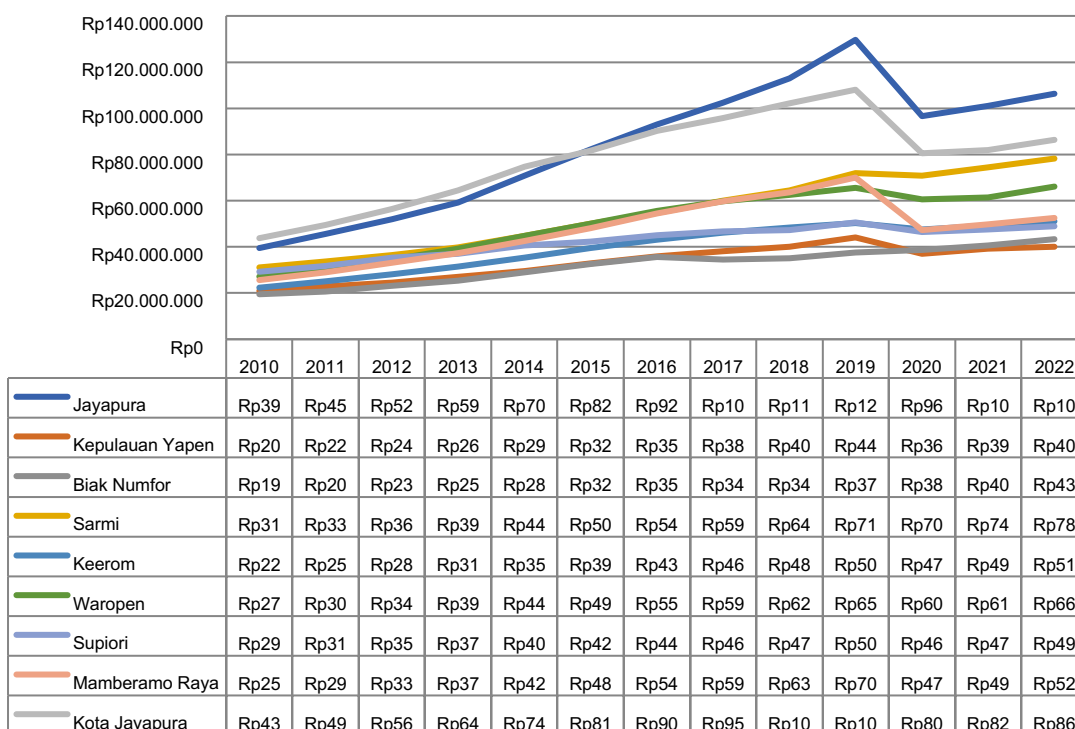
Gambar 3.108 PDRB Per Kapita Harga Berlaku di Provinsi Papua Tahun 2015-2021 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

Provinsi Papua mengalami kecenderungan peningkatan PDRB per kapita meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020, PDRB per kapita harga berlaku mengalami peningkatan yang dapat diartikan bahwa Provinsi Papua semakin mengakselerasikan kemakmuran bagi daerahnya.

Gambar 3.109 PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Dengan Tambang) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010-2022 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Papua (data diolah)

PDRB per kapita harga berlaku semakin meningkat sebelum sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. PDRB per kapita harga berlaku kemudian kembali mengalami peningkatan setelah tahun 2020.

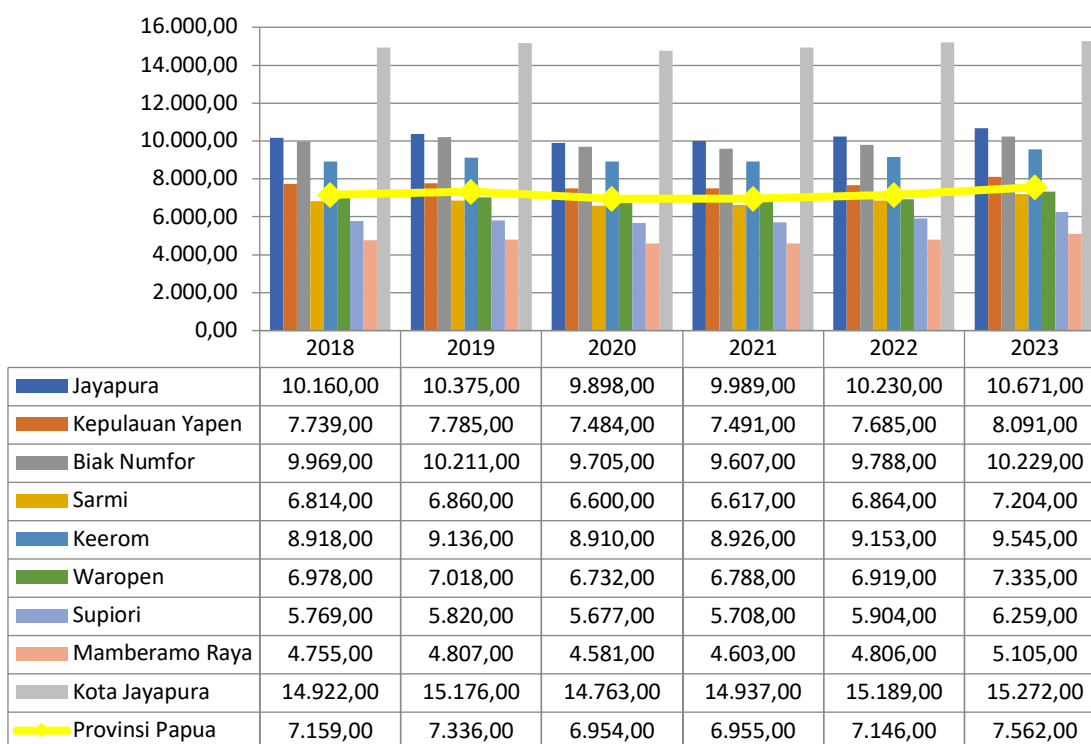
3.4.1.2. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita dapat dilihat melalui pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga menjadi ukuran dalam menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu tahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin

banyak uang yang dikeluarkan tiap anggota rumah tangga setiap bulannya. Perhitungan pengeluaran per kapita sudah dihitung menggunakan metode baru.

Pengeluaran per kapita tertinggi dari tahun 2018-2023 adalah Kota Jayapura dengan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mencapai 15.272 rupiah diikuti oleh Kabupaten Jayapura sebesar 10.671 rupiah dan Kabupaten Biak Numfor sebesar 10.229 rupiah. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar 5.105 rupiah pada tahun 2023.

Gambar 3.110 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2018-2023 (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

3.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia di Provinsi Papua ditinjau berdasarkan kapasitas aparatur negara dengan melihat kuantitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin serta dengan melihat rasio ketergantungan dari tingkat produktivitas penduduk berdasarkan usia.

3.4.2.1. Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Guna mencapai tujuan pembangunan, salah satu hal yang dimuat di dalamnya adalah mengenai aparatur pemerintah. Pemerintah perlu bebas dari intervensi politik, bersih praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, profesional, dapat memberikan pelayanan publik, dan berperan sebagai perekat kesatuan bangsa. Tugas

aparatur sipil negara adalah melaksanakan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembantuan tertentu. Penyiapan ketersediaan sumber daya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kualitas secara proporsional di semua instansi menjadi arahan terkait kebijakan pembangunan kepegawaian di daerah. Salah satu aparatur sipil negara daerah di Provinsi Papua adalah Pegawai Negeri Sipil. Pada tahun 2022, PNS di lingkungan instansi Provinsi Papua berjumlah 26.109 orang berdasarkan hasil pencatatan dari Badan Kepegawaian Negara.

Jumlah PNS didominasi oleh jenis kelamin laki-laki dengan persentase 58,67% dengan jumlah 15.317 orang. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditempuh PNS di Provinsi Papua adalah S1 yaitu sebanyak 12.602 orang.

Tabel 3.63 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2021-2022

Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
SD	109	70	9	8	118	78
SMP	205	171	31	27	236	198

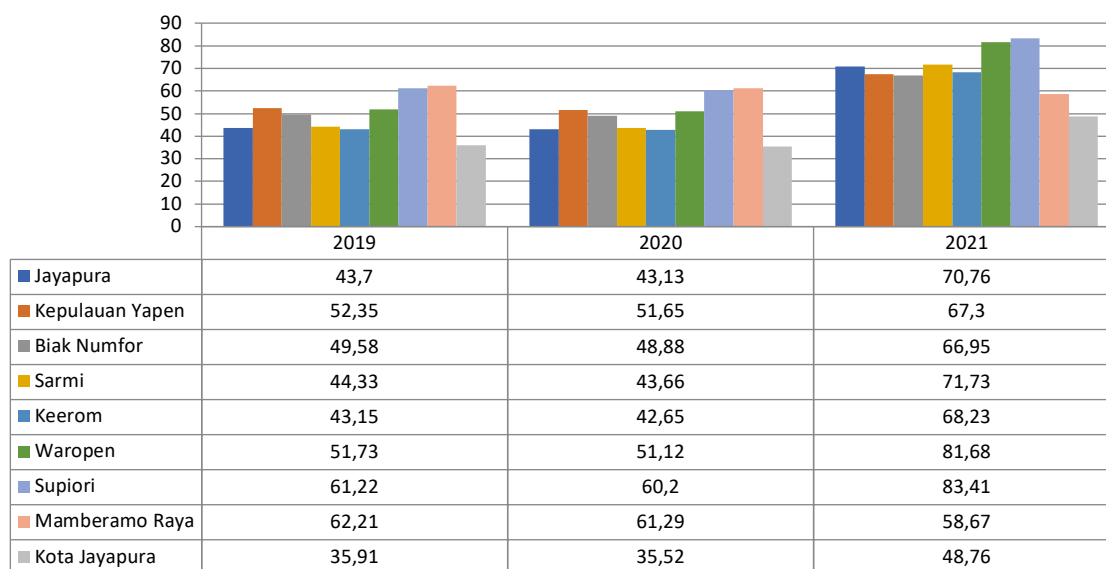
Tingkat Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
SMA	4402	4095	1962	1680	6364	5775
Diploma I/Akta I	208	216	75	86	283	302
Diploma II/Akta II	118	101	37	29	155	130
Diploma III/Akta III	1217	1339	1192	1231	2409	2570
Diploma IV/Akta IV	440	496	256	256	696	752
S1/Sarjana	6809	6591	6178	6011	12987	12602
S2/Pasca Sarjana	2013	2109	1263	1422	3276	3531
S3/Doktor/Ph.D	122	129	38	42	160	171
Jumlah	15643	15317	11041	10792	26684	26109

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022

3.4.2.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan rasio untuk menunjukkan keadaan ekonomi yang digolongkan dalam negara maju atau negara berkembang. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif maupun tidak produktif lagi menjadi semakin tinggi.

Gambar 3.111 Rasio Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Rasio ketergantungan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua meningkat pada tahun 2021. Kabupaten dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura menjadi kota dengan rasio

ketergantungan terendah pada tahun 2021. Rasio ketergantungan yang cenderung meningkat pada tahun 2021 di Provinsi Papua menandakan bahwa semakin banyak penduduk produktif yang harus menanggung sejumlah

penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi.

3.4.3. Daya Saing Iklim Investasi

3.4.3.1. Laju Inflasi Daerah

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua di 3 kota IHK, pada Januari 2023, terjadi inflasi y-o-y sebesar 5,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,76 pada Januari 2022 menjadi 112,35 pada Januari 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar -0,40 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar -0,40 persen. Jika dirinci menurut 3 kota HK dan inflasi mtm, maka pada Januari 2023 di Merauke terjadi inflasi sebesar 0,41 persen, Timika terjadi inflasi -0,60 persen dan Kota Jayapura dengan inflasi sebesar -0,55 persen. Sedangkan untuk inflasi yoy, terjadi inflasi sebesar 4,41 persen di Merauke, sebesar 5,75 persen di Timika dan Kota Jayapura mengalami inflasi 5,26 persen. Secara nasional, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dan terendah di Sorong sebesar 3,23 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy (secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.64).

Tabel 3.64 Tingkat Inflasi Provinsi Papua Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
1	Month to Month (mtm) Januari	-0,27	0,03	-0,40
2	Year to Date (ytd) Januari	-0,27	0,03	-0,40
3	Year on Year (yoy) Januari	0,93	2,10	5,23

Sumber: BPS Provinsi Papua

Beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi year-on-year pada Januari 2023, antara lain: angkutan udara, bensin, beras, biaya akademi/ perguruan tinggi dan angkutan dalam kota. Sementara beberapa komoditas yang dominan memberikan andil deflasi year-on-year antara lain: biaya ponsel, ikan ekor kuning, bawang putih, ikan tongkol, dan kangkung.

3.4.3.2. Kondisi Politik dan Keamanan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat tahun

2016 IDI Papua adalah sebesar 61,02 persen meningkat 3,52 point pada tahun 2020 menjadi 64,54 persen. Hal tersebut juga tidak terlepas dari komponen pembentuk dari setiap aspek diantaranya Aspek Kebebasan Sipil (Persen); Aspek Hak-Hak Politik (Persen); dan Aspek Lembaga Demokrasi (Persen).

Tabel 3.65 Komponen Indeks Demokrasi Indonesia menurut Aspek di Provinsi Papua, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
IDI (Persen)	61,02	61,34	62,20	65,25	64,54
Aspek					
Kebebasan Sipil (Persen)	92,15	89,09	84,36	93,08	89,32
Aspek Hak-Hak Politik (Persen)					
Hak Politik (Persen)	41,13	42,16	47,90	51,16	53,54
Aspek Lembaga Demokrasi (Persen)					
Lembaga Demokrasi (Persen)	53,45	56,91	57,05	52,61	51,83

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2021 (data diolah)

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan aspek pembentuk IDI, persentase hak-hak politik cenderung meningkat meskipun nilainya tergolong cukup rendah. Sedangkan untuk kedua aspek lainnya yaitu kebebasan hak sipil dan Lembaga demokrasi cenderung mengalami penurunan. Meskipun cenderung aspek kebebasan sipil terlihat mengalami penurunan, tetapi capaian rata-rata pertahun tergolong cukup tinggi.

Tingkat kriminalitas di Papua tercatat dalam tiga tahun terakhir mengalami perbaikan. Tercatat terjadi penurunan jumlah kasus kejahatan setiap tahunnya, sama halnya dengan resiko penduduk yang berpotensi ditindakpidanakan. Penyelesaian tindak pidana sampai dengan tahun 2021 sebesar 42,82 persen, menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 45,79 persen. Penyelesaian kasus tindak pidana merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun angkanya tercatat menurun setiap tahunnya.

Tabel 3.66 Tingkat Kriminalitas di Provinsi Papua Tahun 2019-2021

Uraian	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Juta Jiwa)	3.347	4.304	4.355
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (kasus)	8.551	8.005	6.864

Uraian	2019	2020	2021
Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana (per 100.000 Penduduk)	248,7	234,28	199,64
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)	50,18	45,79	42,82
Tingkat Kriminalitas (Persen)	25,55	18,60	15,76

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 (data diolah)

3.4.3.3. Produktivitas Total Daerah

Kontribusi tenaga kerja di Papua selama lima tahun terakhir terhadap produk domestik regional bruto (PDRB ADHB Tanpa Tambang) semakin baik. Jika dilihat berdasarkan trend perkembangan produktivitas total daerah selama 2017-2021 mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan. Ukuran produktivitas daerah dapat memvisualisasikan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah atau PDRB.

Komponen pembentuk produktivitas total pada indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan pada Angkatan kerja terjadi penurunan pada periode 2019-2020. Pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang berdampak kepada pengurangan tenaga kerja khususnya pada sektor swasta. Sehingga meningkatkan angka pengangguran secara keseluruhan di Provinsi Papua. Sampai dengan tahun 2021 produktivitas TK dalam perekonomian dalam perekonomian adalah sebesar Rp.76,12 Juta/TK/tahun yang tercatat menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp.80,64 Juta/TK/tahun.

Tabel 3.67 Produktivitas Total Daerah Provinsi Papua Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB Tanpa tambang (Rp. Juta)	122.457.689	133.409.669	144.899.565	142.683.470	148.652.165
Angkatan Kerja (jiwa/orang)	1.762.841	1.835.963	1.842.203	1.769.403	1.952.777
Produktivitas total daerah (P)	69,47	72,66	78,66	80,64	76,12

Sumber: Papua Dalam Angka Tahun 2022 dan BPS Papua 2022 (data diolah)



BAB IV

Kerangka Pembangunan Sosial Ekonomi Makro & Keuangan Daerah

4.1. KERANGKA PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI MAKRO PROVINSI PAPUA

4.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2023

Salah satu pendekatan yang digunakan BPS untuk menghitung PDRB adalah Pendekatan Pengeluaran. Perhitungan PDRB berdasarkan pendekatan pengeluaran/penggunaan dikelompokkan dalam 6 komponen yaitu : (1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang, dan jasa dikurangi dengan penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan rumah tangga selama setahun; (2) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Data yang dipakai adalah realisasi APBD; (3) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, mencakup pembuatan dan pembelian barang- barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal bekas atau baru dari luar negeri. Metode yang dipakai adalah pendekatan arus barang; (4) Perubahan Inventori. Perubahan stok dihitung dari PDRB hasil penjumlahan nilai tambah bruto sektoral dikurangi komponen permintaan akhir lainnya; (5) Ekspor Barang dan Jasa. Ekspor barang dinilai menurut harga free on board (fob); dan (6) Impor Barang dan Jasa. Impor barang dinilai menurut cost insurance freight (cif). PDRB menurut Pendekatan Pengeluaran ini pada dasarnya merupakan persamaan makroekonomi pengeluaran agregat Keynes yaitu :

$$Y = C + I + G + X - M$$

dimana C (Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga), I (Pembentukan Modal Tetap Bruto), G (Pengeluaran Konsumsi Pemerintah), X (Ekspor Barang dan Jasa), dan M (Impor Barang). Dengan adanya kesamaan ini, maka perhitungan pertumbuhan ekonomi regional suatu daerah lazimnya menggunakan pertumbuhan PDRB yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Papua (PDRB Menurut Pengeluaran), yang selanjutnya dapat didisagregasi juga menurut sektoral (PDRB Menurut Lapangan Usaha).

Publikasi resmi yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Papua, menunjukkan ekonomi Papua triwulan III-2023 dibanding triwulan III-2022 tumbuh sebesar 8,28 persen (y-o-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 8,39 persen, Komponen Pengeluaran dan Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (PK- LNPRT) sebesar 5,80 persen, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,96 persen. Komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi yaitu sebesar -1,71 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa Luar Negeri yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran turun sebesar -18,88 persen.

Tabel 4.1.

Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Papua Pada Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2023

Komponen Pengeluaran	2023			
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.53	4.85	4.96	-
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.82	7.55	5.80	-

Komponen Pengeluaran	2023			
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.70	5.33	8.39	-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.23	3.72	2.40	-
5. Perubahan Inventori	0.00	0.00	0.00	-
6. Ekspor Luar Negeri	-31.15	8.04	-1.71	-
7. Impor Luar Negeri	66.66	7.41	18.88	-
8. Net Ekspor Antar Daerah	0.00	0.00	0.00	-
PDRB Papua	-2.39	3.81	8.28	-

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Berdasarkan lapangan usaha, menurut publikasi dari BPS Papua, dengan telah pulihnya perekonomian dibandingkan periode sebelumnya, menyebabkan terjadi peningkatan pada seluruh kategori lapangan usaha. Perhatikan Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2.

Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha dan Harga Konstan Provinsi Papua Pada Triwulan 1 s/d Triwulan 3 Tahun 2023

Lapangan Usaha 2010	2023				Pert
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.32	2.18	2,15	-	0,01
B. Pertambangan dan Penggalian	-11.03	3.01	2,36	-	6,36
C. Industri Pengolahan	-0.29	-2.83	0,07	-	0,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7.96	5.45	4,47	-	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.48	2.1	0,92	-	0,00
F. Konstruksi	1.69	5.85	3,65	-	0,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.64	4.87	5,71	-	0,56
H. Transportasi dan Pergudangan	10.01	9.85	9,05	-	0,26
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.53	3.86	3,27	-	0,01
J. Informasi dan Komunikasi	2.18	4.92	2,98	-	0,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.7	16.85	13,43	-	0,22
L. Real Estate	3.27	3.27	4,19	-	0,16

Lapangan Usaha 2010	2023				Pert
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
M. Jasa Perusahaan	4.46	7.24	7,19	-	0,10
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.24	3.01	2,46	-	-0,05
O. Jasa Pendidikan	5.1	4.91	3,34	-	0,00
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.66	-0.37	2,97	-	0,04
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.65	2.12	3,34	-	0,06
PDRB Papua Dengan Tambang	-2.39	3.81	8,28	-	8,28
PDRB Papua Tanpa Tambang	1,01	3,32	3,98		

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2022 (data diolah)

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi rata-rata sebesar 12,28 persen per triwulan (y-on-y). Selain Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi lainnya yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,71 persen. Selanjutnya, bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan III-2023 (y-on-y) menurut catatan BPS Papua masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian yang memberikan sumber pertumbuhan terbesar yaitu 6,36 persen. Selanjutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,56 persen, dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,26 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Papua jika dikalkulasi tanpa menyertakan sektor pertambangan dan penggalian, berdasarkan catatan BPS Papua dapat tumbuh sekitar 2,77 persen per triwulan (y-on-y) selama tahun 2023.

4.1.2. Prospek Perekonomian Papua 2024 dan 2025

4.1.2.1. Tantangan Eksternal

Sebagai wilayah yang terbuka, ditandai dengan rasio keterbukaan Provinsi Papua (net ekspor per PDRB) mencapai 12,32% per tahun selama periode 2010-2022, sudah barang tentu persoalan eksternalitas ekonomi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah

Papua sepanjang tahun 2023, serta tahun 2024 dan 2025 mendatang, antara lain : (1) efek kebijakan moneter ketat yang ditandai dengan suku bunga acuan yang tinggi dan berkepanjangan telah memperlemah perekonomian di sejumlah negara; (2) turunnya perekonomian global sebagai dampak dari konflik perang antara Rusia-Ukraina yang belum juga berakhir yang berdampak pada krisis energi dan krisis pangan akibat berkurangnya pasokan pupuk dunia; (3) Pemulihan ekonomi China yang lamban karena restorasi sektor properti yang ambruk membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan; (4) perhatian ekstra kepada negara-negara berpenghasilan rendah (*low income countries*) baik di Afrika, Amerika Latin dan Asia agar resiliensi perekonomian global lebih merata dan terdistribusi; (5) Kebijakan fiskal di berbagai negara diperkirakan masih akan tetap menjalankan peran strategisnya untuk menyerap tekanan sosial dan ekonomi, meskipun rasio defisit fiskal tetap harus menjadi perhatian utama agar tidak melampaui *threshold* atau ambang batas.

Dampak perang Rusia dan Ukraina masih akan terasa di tahun 2024. Akibat tekanan perang, inflasi dan suku bunga yang masih tinggi akan mempengaruhi perekonomian global dan lebih kuat pengaruhnya dibanding tahun 2023. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan bahwa pertumbuhan global akan melamban ke 2,7 persen pada 2024 dari laju sebesar 2,9 persen tahun 2023. Kondisi ini merupakan pertumbuhan tahunan terendah sejak terjadi pandemi pada 2020. Menurut sekjen OECD, meskipun prospek suram di tahun 2024, namun OECD memproyeksikan resesi akan bisa dihindari, tetapi ada risiko inflasi akan tetap tinggi akibat perang Rusia di Ukraina berpengaruh pada harga komoditas seperti minyak dan gandum.

Indonesia sendiri diprediksi akan menghadapi tantangan yang sama akibat Adanya perang Rusia-Ukraina dan juga peningkatan suku bunga FED dan inflasi dunia. Di kutip dari CNBC

Indonesia, World Bank memperkirakan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melaju lebih cepat dibandingkan Amerika Serikat dan China mulai 2024. Bank Dunia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 akan sebesar 4,9%, meski masih jauh lebih rendah dari realisasi pada 2022 sebesar 5,3%. Pada 2024 pun tidak ada perubahan, baru pada 2025 kembali naik ke level 5%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah menjaga ekspektasi inflasi sehingga tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral bisa ditahan saat ini. Padahal, di negara-negara maju seperti AS tren kenaikan suku bunga acuan masih akan tinggi karena tekanan inflasi yang berkepanjangan.

Perkiraan ekonomi dunia di 2024 dengan merujuk kepada sejumlah lembaga internasional dan para pakar maka terbentuk pola pemikiran yang sama bahwa tahun 2023 pertumbuhan ekonomi berkisar 2,7-3,0% dan akan berlanjut di 2024 dengan tendensi melemah pada kisaran 2,5-2,8%, bahkan ada yang menyatakan bahwa perekonomian global berkisar 2,1%. Terdapat beberapa penyebab gambaran perekonomian global di 2024 cenderung melemah dibanding 2023. Perubahan berbagai variabel global yang dinamis dan cepat membuat perkiraan wajah perekonomian dunia tahun depan menjadi beragam: ada yang optimis, ada yang moderat dan bahkan tidak sedikit yang pesimis. Berikut adalah negara tujuan ekspor utama Papua yang tentunya apa yang terjadi di negara tersebut juga akan berpengaruh terhadap permintaan produk Papua.

1) Tiongkok

Ekonomi China diproyeksikan melambat pada 2024 dan akan mengalami soft landing. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan perekonomian China diperkirakan tumbuh 5,4% tahun 2023, setelah mengalami pemulihan yang "kuat" pasca Covid. Tahun 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan akan lebih lambat dikarenakan Adanya pelemahan yang terus berlanjut di sektor properti dan

lemahnya permintaan eksternal dapat membatasi pertumbuhan produk domestik bruto menjadi 4,6% pada tahun 2024. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tingginya angka usia tua, berkurangnya laba atas investasi, dan fragmentasi geo-ekonomi. IMF merekomendasikan reformasi struktural yang berbasis luas dan pro-pasar untuk meningkatkan produktivitas. Dampak Pelemahan Ekonomi China dapat memberikan tekanan bagi Indonesia sebab China merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia dan merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, sehingga pelemahan permintaan impor China yang melambat akan membuat permintaan ekspor dari Indonesia juga melambat. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan bahwa efek perlambatan di China berpotensi menekan kinerja perdagangan Indonesia. Default yang dialami sektor properti memicu pertumbuhan ekonomi China berada di bawah 5% atau diperkirakan sekitar 4,9% pada tahun 2023 ini. Efek penurunan ini, akan membuat warga China mengerem impornya, termasuk impor dari Indonesia. Jika China mengurangi impornya dan fokus pada permintaan dalam negeri, maka ekspor Indonesia ke China akan terus berkurang dan dapat mempengaruhi neraca dagang Indonesia yang saat ini sudah 42 bulan beruntun mengalami surplus. Jika China benar-benar menutup 100% impor dari Indonesia, maka neraca dagang Indonesia akan mengalami defisit dan mematahkan tren surplus neraca dagang. Efek dominonya dapat berdampak pada defisit transaksi berjalan hingga pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Selain dari jalur perdagangan, perlambatan ekonomi China juga dikhawatirkan akan berdampak kepada jumlah investasi yang

masuk ke Indonesia. Padahal, dalam tiga tahun terakhir, China menjadi salah satu investor terbesar di Tanah Air.

2) Jepang

Pemerintah Jepang menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk tahun fiskal 2024 yang akan dimulai pada April mendatang. Saat ini, pertumbuhan diperkirakan akan mencapai 1,3 persen. Pemerintah Jepang menetapkan prospek produk domestik bruto, yang akan menjadi dasar untuk rancangan anggaran tahun fiskal 2024. Perkiraan terbaru untuk PDB naik 0,1 poin dari bulan Juli. Belanja pribadi diperkirakan tumbuh sebesar 1,2 persen, disokong oleh langkah-langkah stimulus ekonomi. Pendapatan perusahaan yang tinggi kemungkinan akan mendorong investasi modal sebesar 3,3 persen. Indeks harga konsumen secara keseluruhan diperkirakan meningkat sekitar 2,5 persen berkat permintaan domestik yang lebih kuat. Sementara itu, Perdana Menteri Kishida Fumio mengatakan paket stimulus ekonomi yang komprehensif, termasuk keringanan pajak, akan dilaksanakan dengan cepat dan sepatutnya. Jepang berharap kenaikan upah yang lebih besar dan pemotongan pajak akan menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah juga akan diambil untuk menaikkan gaji nakes dan pekerja kesejahteraan sosial. Pemerintah memperkirakan bahwa pekerja akan mengalami kenaikan upah sebesar 2,5 persen pada tahun fiskal depan. Dengan memperhitungkan efek paket stimulus, pertumbuhan pendapatan diperkirakan mencapai hampir 4 persen, atau melampaui tingkat inflasi.

3) Spanyol

Aktivitas ekonomi Spanyol diperkirakan akan moderat. Tahun 2023, pertumbuhan PDB riil yang kuat sebesar 2,4%, Namun untuk tahun 2024, aktivitas ekonomi diperkirakan akan melambat menjadi 1,7%.

Inflasi umum diperkirakan akan tetap moderat sepanjang perkiraan, meskipun risiko kenaikan masih ada. Berdasarkan kebijakan yang tidak berubah, defisit pemerintah secara umum diperkirakan akan tetap sedikit di atas 3% PDB pada tahun 2024 meskipun langkah-langkah untuk memitigasi dampak tingginya harga energi telah dihentikan secara bertahap. Secara keseluruhan, aktivitas ekonomi diproyeksikan meningkat sebesar 2,4% pada tahun 2023, juga diuntungkan oleh tingginya *carry over* pada tahun 2022 dan peningkatan signifikan dalam nilai tukar perdagangan. Permintaan domestik akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pada tahun 2024, didukung oleh peningkatan pendapatan riil rumah tangga dan terus berkurangnya tekanan harga. Tahun 2024, PDB diperkirakan akan meningkat sebesar 1,7% dan meningkat sedikit menjadi 2,0% di tahun 2025. Meskipun menurun, Risiko-risiko negatif berkaitan dengan dampak berkepanjangan terhadap permintaan akibat pengetatan kondisi keuangan, terutama mengingat tingkat utang luar negeri, pemerintah dan swasta yang meningkat. Di sisi lain, peningkatan daya beli rumah tangga, serta kondisi keuangan rumah tangga dan korporasi non-keuangan yang sehat berkat rendahnya leverage dan akumulasi likuiditas dalam beberapa tahun terakhir, dapat memitigasi hambatan konsumsi dan investasi.

4) India

India sebagai daerah tujuan ekspor Papua, tentunya perekonomiannya menjadi penting. Perekonomian di Asia yang juga memimpin di sektor jasa, mampu menikmati kuatnya permintaan domestik pasca pandemi Covid-19 melanda hebat negara India dan terhindar dari kendala pasokan, yang tecermin dalam industri perjalanan dan pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan terus solid pada tahun 2024, menjadi yang tertinggi di antara

negara G20. India merupakan penyumbang tiga-perempat output perekonomian kawasan Asia Selatan. IMF memperkirakan India akan dapat tumbuh sebesar 6,1% pada tahun 2023 dan meningkat di tahun 2024. World Bank juga memperkirakan ekonomi India kian menguat ke depan, dengan pertumbuhan di atas 6% untuk tahun 2023 dan 2024. Pemulihan sektor manufaktur India juga terus berlanjut pasca pandemi. Reformasi dan strategi kebijakan India berfokus pada penguatan infrastruktur, investasi, manufaktur, dan teknologi.

5) Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan memprediksi bahwa ekonomi tahun 2024 akan tumbuh 2,2% karena didorong oleh pulihnya ekspor khususnya di bidang semikonduktor. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatatkan 1,4% di tahun 2023, diprediksi akan meningkat 2,2% karena sektor ekspor yang kembali pulih dengan stabilnya perdagangan global dan industri semikonduktor. Prediksi serupa sama dengan perkiraan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan lebih tinggi dari perkiraan Bank Sentral Korea (BOK) sebesar 2,1% yang direvisi pada bulan November tahun 2023. Namun pemerintah memperkirakan bahwa risiko geopolitik, seperti konflik di kawasan Timur Tengah dan perang Ukraina, serta kemerosotan pertumbuhan negara-negara maju akibat suku bunga yang tinggi menjadi faktor risiko potensial.

Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat dengan ketidakpastian yang tinggi, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan terus menunjukkan prospek yang baik di tahun 2025. Gubernur Bank Indonesia, memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4,8-5,6% pada 2025. Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi, yang akan didukung dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemilihan umum (pemilu), serta infrastruktur di ibu kota negara (IKN) baru, selain ekspor dari

hilirisasi. Inflasi diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ persen pada tahun 2024 dan 2025, yang didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan terus kuatnya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, dan digitalisasi juga terus berkembang pesat. Berbagai tantangan global ke depan yang perlu dicermati mencakup perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global, penurunan inflasi yang lambat, suku bunga negara maju yang lebih tinggi dan lebih lama, kuatnya mata uang dollar, serta pelarian modal dalam jumlah besar dari *emerging markets* ke negara maju.

4.1.2.2. Peluang Ekonomi Papua

Pada Januari-September 2023, nilai ekspor Papua tertinggi ke China yakni sebesar US\$4482,51 juta. Angka ini lebih rendah sebesar US\$392,29 juta jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Sedangkan dari sisi impor di Januari-September 2023, Papua mencatat nilai impor dari China tertinggi yakni sebesar US\$119,68 juta atau naik jika dibandingkan tahun 2022 (BPS Papua, 2023). Kinerja perekonomian Papua diperkirakan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2024 dengan angka yang kurang lebih sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,00 persen dan masih ditopang dari sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan perekonomian Papua tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2024 disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas masyarakat pada sector non tambang, terutama berasal dari sector pertanian dan konstruksi dan juga Adanya pemilihan umum. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Papua dari sector pertanian karena adanya peningkatan produktivitas pada sentra pertanian yang disebabkan karena permintaan bahan makanan diperkirakan akan meningkat sejalan dengan tingginya aktivitas masyarakat

terkait kegiatan politik, kampanye sehingga terjadi peningkatan permintaan bahan makanan dan juga mulai aktifnya masyarakat pasca pandemic Covid 19 di wilayah di Papua.

Di sektor Perdagangan juga diperkirakan akan meningkat akibat kegiatan pemilihan umum serentak yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan Pemerintah. Pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor mengalami peningkatan, juga diperkirakan akan mengalami peningkatan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat yang sejalan dengan peningkatan pertumbuhan pada konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Sampai dengan November 2023, produksi biji tembaga dan emas sudah melampaui dari target yang ditetapkan. hal ini seperti disampaikan oleh Presiden Direktur Freeport Indonesia yang menyebutkan bahwa hingga akhir November 2023, produksi tembaga Freeport telah mencapai 1,6 miliar pon atau sudah mencapai target produksi dalam setahun yang ditetapkan sebesar 1,6 miliar pon artinya produksi tembaga masih bisa lebih tinggi lagi di tahun 2024. Untuk produksi emas, ralisasinya sampai dengan November 2023 tercatat sebesar 1,9 ton ons emas yang mana ini lebih tinggi daripada target yang telah ditetapkan yaitu 1,8 ton ons emas.

Ekspor Papua mengalami pertumbuhan positif dikarenakan meningkatnya kinerja pertambangan dengan dibukanya pertambangan bawah tanah sejak tahun 2020 yang semakin meningkatkan produktivitas tambang dengan produksi tembaga dan emas yang berkualitas sehingga diperkirakan produksi dan penjualan akan terus meningkat di tahun 2024 mendatang. Sumber daya tambang Freeport Indonesia saat ini tercatat sebesar 3 miliar ton dan diperkirakan cukup hingga 2050 dengan rata-rata produksi mencapai 220.000 ton per hari atau 3 juta ton konsentrat pertahun dari tambang bawah tanah. Luas area produksi tambang Freeport berada pada lahan seluas 9.946 Ha dengan luas area penunjang sebesar

116.783 Ha di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Dengan kondisi ini maka perekonomian Papua tahun 2024 masih sama dengan kondisi tahun 2023 dengan ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian.

Pada sisi pengeluaran, pertumbuhan perekonomian masih didorong oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Penguatan aktivitas ekonomi masyarakat sejalan dengan perayaan hari besar keagamaan, perayaan HUT RI, pemilihan umum di pusat dan daerah dan berbagai kegiatan bertaraf nasional dan internasional masih akan menjadi faktor pendorong konsumsi. Sehingga dapat memperbaiki output sektor-sektor non tambang. Perbaikan output pada sektor non tambang Papua diperkirakan masih terus berlanjut seperti tahun 2023, terutama sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kemungkinan tumbuh tinggi di tahun 2024. Sejalan dengan pertumbuhan sektor pertambangan, ekspor luar negeri Papua tahun 2024 diperkirakan tumbuh Namun pertumbuhannya lebih lambat dibanding tahun 2023. Dari sisi permintaan, kinerja konsumsi rumah tangga diperkirakan dapat terus tumbuh tinggi didorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat sejalan dengan peningkatan UMP pada tahun 2023. Hal ini juga sejalan dengan indeks kepercayaan konsumen yang diperkirakan juga cenderung meningkat yang menandakan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap perekonomian masa yang akan datang dan kredit konsumen yang terus meningkat di tahun 2024 sejalan dengan peningkatan konsumsi RT.

Selanjutnya dari sisi inflasi, diperkirakan inflasi gabungan 3 kota IHK di Papua tahun 2024 kembali berada pada rentang target inflasi nasional seiring dengan prakiraan pelemahan tekanan harga pada komoditas energi. Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua memprediksikan akan terjadi pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran angka 5

persen hingga akhir tahun. Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) KPw BI Papua mengatakan terjadinya pertumbuhan hingga 5 persen dikarenakan adanya kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serta perekonomian mulai membaik pasca pandemik. Pertumbuhan di atas 5 persen hingga akhir tahun, karena kegiatan bukan hanya pemilu namun kondisi tersebut mulai pemulihan ekonomi *pasca pandemic*. BI juga memprediksikan akan terjadi peningkatan khususnya di konsumsi masyarakat termasuk juga konsumsi pemerintah. Secara sektoral juga diprediksi meningkat karena kegiatan pemilu seperti ada kampanye, serta aktivitas politik lainnya akan berpengaruh pada sektor perdagangan, transportasi serta makanan dan minuman. Ketika ada kampanye di hotel pasti aktivitas perekonomian meningkat, sehingga secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua.

4.1.2.3. Target Dan Proyeksi Perekonomian Papua 2023, 2024 dan 2025

Jika diperhatikan dari sisi pengeluaran, peranan ekspor sangat dominan terhadap PDRB Papua selama periode Triwulan I-2023 hingga Triwulan III-2023, dimana bila dianalisis lebih jauh komoditi utama ekspor yang menjadi andalan Papua adalah dari pertambangan non migas, yang juga tampak mendominasi struktur PDRB Papua menurut lapangan usaha. Sehingga besar kecilnya ekspor pertambangan non migas sangat mempengaruhi variasi naik turunnya pertumbuhan ekonomi Papua baik itu dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Dengan memperhatikan kecenderungan harga acuan tembaga dan emas selama tahun 2023, dan pertumbuhan ekspor yang rata-rata mengalami penurunan -8,27% per triwulan, maka angka pertumbuhan nilai ekspor yang cukup moderat untuk PDRB Papua 2023 adalah 5,43% yang melambat dari tahun 2022.

Selanjutnya untuk konsumsi rumah tangga, berdasarkan kecenderungan per triwulan tahun 2022-2023 diperkirakan dapat tumbuh sekitar 4,03%. Begitu juga dengan investasi yang

direprenstasikan oleh PMTB (Pertambahan Modal Tetap Bruto) secara moderat dimungkinkan PMTB akan meningkat sebesar 3,5% dari tahun 2022. Sementara untuk pengeluaran konsumsi pemerintah, meskipun telah diresmikan beberapa DOB (Daerah Otonom Baru) yang dimekarkan dari provinsi induk Papua di tahun 2022 yaitu : Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah, namun hal tersebut belum berdampak signifikan terhadap target pengeluaran konsumsi pemerintah Papua di tahun 2022 ini, sehingga pada komposisi PDRB Papua diperkirakan tetap akan terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 3% dari tahun 2021. Adapun untuk komponen-komponen PDRB Pengeluaran lainnya ditargetkan dapat naik dalam kisaran 2-4%. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan seluruh komponen PDRB Menurut Pengeluaran ini, maka ditargetkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua (PDRB Dengan Tambang) di tahun 2023 kurang lebih sebesar 7,74% jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang diperkirakan lebih lambat dibandingkan tahun 2022 dimana ekonomi Papua tumbuh sebesar 9,01%.

Adapun untuk pertumbuhan PDRB Tanpa Tambang di tahun 2022, penetapan targetnya dilakukan dengan memperkirakan kenaikan seluruh lapangan usaha yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : (1) pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang kembali ke basisnya dengan peningkatannya diantara 3 - 6%, antara lain sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi, (2) pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang kembali normal selesai pelaksanaan PON Papua 2021, yaitu sektor Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, diperkirakan pertumbuhan ketiganya diantara 3 - 7% di tahun 2023; (3) pertumbuhan

lapangan usaha yang terdampak kenaikan BBM, seperti sektor Industri Pengolahan; dan sektor Transportasi dan Pergudangan, diperkirakan pertumbuhannya sekitar 2-7%. Berdasarkan tiga pengelompokan pertumbuhan lapangan usaha ini, maka ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2023 jika tanpa memperhitungkan sektor pertambangan dan penggalan adalah sebesar 5,27%.

Sinyalemen adanya hambatan pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak dari perang Rusia – Ukraina, inflasi dunia, pengetatan finansial, dipastikan semua ini akan menekan kinerja ekspor Indonesia, yang berarti secara langsung juga memperlambat ekspor non migas Provinsi Papua di tahun 2024. Meskipun ada perkiraan di tahun tersebut terjadi peningkatan harga acuan ekspor tembaga dan emas di pasar dunia, akan tetapi impor negara-negara maju yang menjadi tujuan utama ekspor Papua (seperti Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Spanyol) melemah, sehingga ekspor Papua diproyeksikan di tahun 2024 akan mengalami tekanan yang hanya dapat tumbuh kurang lebih 7,8%, kemudian mulai cepat kembali di tahun 2025 menjadi 10%, dengan asumsi terjadi pemulihan global di tahun tersebut. Selanjutnya untuk komponen konsumsi rumah tangga, selama tahun 2024-2025 diproyeksikan akan kembali tumbuh sesuai dengan basisnya berkisar 4,5-7,0%. Sedangkan untuk Pengeluaran Konsumsi LNPRT, akan mendapatkan berkah kenaikan yang cukup tinggi sekitar 10% baik itu di tahun 2024 maupun 2025, karena adanya pesta demokrasi di tahun tersebut. Kemudian, sama halnya dengan kondisi ekspor di tahun 2024 dan 2025, untuk PMTB karena sebagian besar dikuasai oleh PMA (sektor pertambangan non migas, perkebunan, perikanan dan kehutanan) akhirnya estimasi adanya tekanan global di tahun 2024 dan pemulihannya di tahun 2025 dipastikan berdampak terhadap perolehan PMTB. Oleh karena itu diproyeksikan nilai PMTB Papua di tahun 2024 akan mengalami kontraksi yang hanya tumbuh sekitar 4,5%. Dan

mengalami pemulihan di tahun 2025 yang tumbuh kurang lebih 5%.

Adanya DOB di tahun 2022 akan berdampak signifikan terhadap penurunan angka pertumbuhan pengeluaran pemerintah di tahun 2023 dan 2024, oleh karena terjadi pengurangan ASN akibat dimutasikan ke DOB, dan penurunan belanja transfer ke daerah kabupaten/kota yaitu dari jumlah 29 menjadi 5 kabupaten/kota). Kemudian di tahun 2025 diasumsikan kembali pada basis pertumbuhan sebelumnya. Berdasarkan argumentasi-argumentasi ini akhirnya diproyeksikan pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah di tahun 2024 sekitar 4%, dan tahun 2025 sekitar 3,5%.

Mengacu pada berbagai angka proyeksi di atas, khususnya untuk konsumsi masyarakat, PMTB, dan ekspor, serta dengan asumsi komponen PDRB pengeluaran lainnya tumbuh normal sesuai basisnya, maka secara keseluruhan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Papua diproyeksikan di tahun 2024 adalah sebesar 8,17% dan tahun 2025 sebesar 9,80%. Proyeksi ini merupakan laju pertumbuhan PDRB Dengan Pertambangan.

Sedangkan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB Tanpa Pertambangan dilakukan dengan menganalisis PDRB Menurut Lapangan Usaha. Mengacu pada kondisi perekonomian global tahun 2024 yang telah diproyeksikan oleh semua lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF, OECD dan UNCTAD, bahwa akan terjadi krisis global yang akhirnya berimbas juga pada perekonomian Papua. Di luar lapangan usaha pertambangan dan penggalian, dapat dikatakan terdapat beberapa sektor ekonomi Papua yang akan terdampak oleh krisis global di tahun 2024, paling signifikan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; dan real estate. Diperkirakan ke-4 sektor tersebut mengalami kontraksi diantara 1-5% dari basis pertumbuhannya, akibat menurunnya investasi sebagai dampak dari krisis global. Kemudian, dengan asumsi bahwa di

tahun 2025 terjadi recovery pada ekonomi global, perkembangan 4 sektor tersebut mulai mengalami pemulihan, dengan kisaran pertumbuhan antara 5 - 9% di tahun 2024.

Untuk lapangan usaha lainnya, ada 2 sektor yang diproyeksikan terdampak kebijakan internal pemerintah, yaitu sektor Transportasi dan Pergudangan yang akan merasakan dampak dari kenaikan BBM di akhir tahun 2024, serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang terdampak dari kebijakan pemekaran DOB di Papua pada akhir tahun 2022 juga. Faktor-faktor internal ini diperkirakan akan mengkontraksi pertumbuhan kedua sektor tersebut, dengan peningkatannya yang lambat di tahun 2024 antara 4 - 6% lebih rendah dari basis pertumbuhannya. Akan tetapi, hal ini dimungkinkan hanya berlangsung dalam satu tahun, sehingga di tahun 2025 kembali ke basisnya, dengan proyeksi pertumbuhan diantara 6 - 9%.

Sektor-sektor lainnya seperti Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Keuangan dan Asuransi masing-masing diproyeksikan tetap berjalan pada basis pertumbuhan baik itu di tahun 2024 maupun 2025, dengan kisaran pertumbuhan antara 3 - 7%.

Berdasarkan berbagai proyeksi pertumbuhan lapangan usaha di atas, secara keseluruhan dapat diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Papua jika dianalisis berdasarkan PDRB Lapangan Usaha Tanpa Pertambangan dan Penggalian di tahun 2024 kurang lebih sebesar 4,46% yang mengalami pelambatan dari tahun 2023, dan mulai pulih kembali di tahun 2025 dengan pertumbuhannya sekitar 7,12%.

4.1.2.4. Target dan Proyeksi Sosial Ekonomi Makro Provinsi Papua Tahun 2023, 2024 dan 2025

Mengacu pada angka-angka proyeksi perekonomian di atas, serta merujuk pada kerangka logis adanya dampak simultan dari

variabel-variabel ekonomi terhadap indikator sosial makro lainnya, maka berikut ini disampaikan hasil penargetan dan proyeksi kondisi sosial ekonomi makro Provinsi Papua di tahun 2023, 2024 dan 2025.

Tabel 4.3.

Target Dan Proyeksi Makro Sosial Ekonomi Provinsi Papua 2022 – 2024

Indikator Makro Sosial Ekonomi	2022	Target	Proyeksi	
		2023	2024	2025
Pertumbuhan PDRB DT (%)	9,01	7,74	8,17	9,80
Pertumbuhan PDRB TT (%)	4,21	5,27	4,46	7,12
Laju Inflasi (%)	5,81	5,14	6,04	5,22
Tingkat Kemiskinan (%)	26,56	25,88	24,63	23,97
Gini Ratio (Indeks)	0,406	0,394	0,388	0,382
Rasio penduduk bekerja (%)	97,17	97,38	97,26	97,47
TPT (%)	2,83	2,62	2,74	2,53

Sumber : BPS Provinsi Papua dan Bappeda Provinsi Papua, 2023 (data diolah)

Dalam rangkaian perencanaan dan penganggaran tahun 2023-2024, secara ekonomi ada empat hal penting yang perlu diantisipasi menghadapi tantangan domestik, nasional dan global. **Pertama**, konsumsi rumah tangga harus dijaga bertahan dan terus tumbuh, sebab rata-rata sekitar 40,78% per tahun (periode 2010-2022) ekonomi Papua masih digerakkan oleh sektor konsumsi rumah tangga. **Kedua**, investasi yang menjadi penggerak kedua ekonomi yang menyumbang sebesar 27,93% per tahun (periode 2010-2022) harus ditingkatkan. Melalui investasi diharapkan menambah penciptaan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. *Transaction cost* atau biaya transaksi dalam berinvestasi perlu ditekan agar tidak selalu terjadi *high cost economy*, dimana penurunan biaya transaksi ini lebih diprioritaskan dengan menekan biaya transportasi, biaya administrasi dan biaya lobi (khususnya terkait pelepasan tanah hak ulayat). **Ketiga** adalah netto antara perdagangan keluar dan ke dalam daerah. Ini penting untuk menciptakan surplus perdagangan. Untuk itu selama tahun 2023-2024 mendatang, pemerintah provinsi perlu lebih serius untuk meningkatkan agribisnis pertanian dan perikanan guna memperlambat tekanan dari

luar. **Keempat**, yang berkaitan dengan belanja pemerintah daerah. efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah daerah perlu dioptimalkan, sehingga kontribusi APBD Provinsi Papua tahun 2024-2025 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan lebih tinggi lagi ditengah gelombang krisis global yang akan terjadi di tahun mendatang. Oleh sebab itu, sebagai provinsi yang memiliki SAKIP dengan nilai baik, Setiap aparatur harus mengubah *mindset* dari bermental membagi-bagi dan menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan berdasarkan program-program prioritas.

4.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

4.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dana kemitraan, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Papua yang semuanya

merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Dana Bagi Hasil, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana pendapatan daerah (target dan proyeksi), diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:
 - a. Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
 - b. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan perangkat daerah penghasil;

- c. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kinerja BUMD dan perusahaan daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- e. Meningkatkan pendayagunaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
- f. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- g. Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan dana perimbangan;
- h. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
- i. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- j. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- k. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak;
- l. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- m. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antar lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga

- mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - n. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - o. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/ kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil;
 - c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :

- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri;
- b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

4.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Penyusunan anggaran belanja tahun 2024 dan 2025 harus berpedoman prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip pengelolaan belanja daerah dari *money follow function* diubah menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2024-2025.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Provinsi Papua. Untuk itu kebijakan belanja daerah Tahun 2024-2025 secara umum diupayakan dengan pengaturan pola dan prinsip-prinsip yaitu :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;
2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Tolak ukur dan target kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Optimalisasi belanja langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung

tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

5. Transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Adapun arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2024-2025 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan untuk Provinsi Papua, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan;
2. Dukungan terhadap RPJMN, RKP 2024 dan RKP 2025;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/ BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
9. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
10. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.

Untuk pengelolaan belanja Dana Otsus untuk pemerintah provinsi telah diarahkan alokasi belanjanya sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/ mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;
4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
7. Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).



BAB V

Tujuan, Sasaran & Prioritas Daerah

5.1. TUJUAN, SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Papua, tentu saja tidak lepas dari arahan umum dan panduan utama, sebagaimana tercantum dalam visi rencana pembangunan lima tahunan Provinsi Papua, dimana visi pembangunan Provinsi Papua Tahun 2019-2023 adalah:

PAPUA BANGKIT, MANDIRI & SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Papua tersebut ditetapkan 5 (lima) misi, dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM.
2. Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

4. Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan.
5. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu.

Untuk melaksanakan setiap misi pembangunan di atas, telah dirumuskan dan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka menengah kedepan sebagaimana yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

1) Misi Pertama: Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

- 1.1. Tujuan Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasarannya:
 - a. Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Suksesnya pelaksanaan PON dan prestasi olahraga;
 - d. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
 - e. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan;
 - f. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

2) Misi Kedua: Memantapkan Rasa Aman, Tenang dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

- 2.1. Tujuan meningkatkan keamanan, ketenangan dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan

harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua, dengan sasarannya:

- a. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum;
- b. Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat;
- c. Meningkatnya penegakan HAM.

3) Misi Ketiga: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

3.1. Tujuan meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasarannya:

- a. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua;
- b. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah;
- d. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

4) Misi Keempat: Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural Secara Berkelanjutan

4.1. Tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasarannya:

- a. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- b. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan;

- c. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim;
- d. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan;
- e. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan;
- f. Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- g. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah.

4.2. Tujuan mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar, dengan sasarannya:

- a. Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/ daerah dan akses bagi seluruh wilayah;
- b. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
- c. Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah;
- d. Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;
- e. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan;
- f. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.

5) Misi Kelima: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

5.1. Tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasarannya:

- a. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis kampung;
- b. Meningkatkan efektivitas upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP;
- c. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan;
- d. Meningkatkan pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS;
- e. Meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- f. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak.

5.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasikan dalam tataran sasaran strategik, program dan kegiatan yang mempunyai hubungan dengan tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Untuk menjamin sinergitas antara prioritas pembangunan nasional dan daerah maka prioritas pembangunan Provinsi Papua perlu disusun juga dengan memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah pusat. Dalam hal ini sesuai Rancangan Awal RPJMN Tahun 2020-2024 telah dipaparkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional selama periode 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang

- dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Adapun untuk Provinsi Papua, agenda pembangunan daerah yang akan dilaksanakan 5 tahun kedepan, sebagaimana yang dimuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, dirumuskan dalam *flagship* 10 TEKAD PAPUA yaitu untuk mewujudkan/membangun/ meningkatkan: (1) Generasi Emas (Gemas) Papua; (2) Berdaya Ekomas Papua; (3) Infradas Papua; (4) Perlindungan dan Keberpihakan Adat Papua; (5) Kesenjangan Gender dan Kemitraan Papua; (6) Sukses PON XX Papua; (7) Pembangunan Berkelanjutan Papua;

(8) Kampung Mandiri Papua; (9) Mandiri Pangan Papua; dan (10) Reformasi Birokrasi Papua. Satu per satu dapat dijelaskan singkat sebagai berikut.

(1) Generasi Emas

Generasi emas adalah generasi yang diharapkan menjadi perintis perubahan dalam membentuk kehidupan dan peradaban bangsa yang lebih baik. Generasi emas yang dicita-citakan ini adalah generasi yang bermodalkan kecerdasan komprehensif, yakni produktif, inovatif, interaksi sosial yang baik, dan berperadaban unggul.

(2) Berdaya Ekomas Papua

Berdaya Ekonomi Masyarakat (Ekomas) Papua adalah masyarakat Papua yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sumber daya alam di sekitarnya secara tumbuh dinamis, berkelanjutan dan inklusif sebagai wahana untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat memberikan nilai tambah tinggi untuk pemenuhan kebutuhan sosia ekonomi. Dengan menjadi masyarakat yang berdaya diharapkan bisa menjadi penggerak bagi masyarakat lainnya. Sehingga ada timbal balik yang bisa diberikan kepada pihak lain yang memerlukan bantuan, terutama bagi elemen masyarakat yang paling terkecil yang masih terkungkung dalam ketidakberdayaan ekonomi.

(3) Infradas (Infrastruktur Dasar) Papua

Secara umum pengertian infrastruktur dasar Papua ialah semua struktur dan fasilitas dasar yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar dalam upaya memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Infrastruktur dasar dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah Papua untuk pemerataan kampung/desa tertinggal dan terpencil. Infrastruktur tersebut terbagi dua, yakni (1) pelayanan dasar seperti listrik, air bersih dan sanitasi, serta (2) konektivitas. Diharapkan, pembangunan infrastruktur dasar

ini dapat mengembangkan SDM agar semakin produktif dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pelayanan dasar membaik dan konektivitas terbuka, produktivitaspun akan meningkat.

(4) Perlindungan dan Keberpihakan Adat Papua

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada pasal 43 telah diamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Perlindungan dan keberpihakan terhadap Adat Papua juga dilakukan melalui pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Papua. Pemberdayaan yang dimaksudkan ini adalah memperkuat fungsi dan peran Lembaga Adat sebagai wadah sekaligus fasilitator pengelolaan pembangunan dengan acuan nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal. Sementara pelestarian dimaksudkan untuk menjaga agar nilai, adat-istiadat dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam praksis kultural, tetap lestari dan tidak hilang. Nilai, tradisi, adat istiadat, budaya yang tumbuh pada suatu masyarakat pada dasarnya juga menjadi asset atau modal sosial yang penting dalam rangka memberdayakan masyarakat demi mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Sedangkan pengembangan adat diarahkan guna merevitalisasi nilai, norma, tradisi, budaya dan kearifan lokal agar sejalan dengan perubahan zaman sekaligus kepentingan praktis bagi peningkatan kemajuan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat adat.

(5) Kesetaraan Gender dan Kemitraan Papua

Kesetaraan gender atau keadilan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan,

pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender ini juga terkait dengan pengentasan kemiskinan, pemenuhan hak asasi manusia, ketersediaan kebutuhan dasar, isu marjinalisasi, pendidikan, kesehatan, persoalan tanah (ulayat), degradasi lingkungan hingga persoalan kesulitan penjangkauan wilayah.

Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah dapat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain mulai dari tahapan pengembangan, desain dan pengelolannya. Salah satu konsep kemitraan pembangunan yaitu "*penta-helix*" menjadi model kemitraan yang dianggap tepat pada saat sekarang dan masa mendatang bagi pembangunan daerah Papua. Konsep pembangunan '*pentahelix*', di mana (1) unsur pemerintah, (2) masyarakat atau komunitas, (3) akademisi, (4) pengusaha, dan (5) media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan daerah Papua. Ke-5 unsur ini akan selalu bekerja sama dengan berpedoman pada prinsip-prinsip utama kemitraan yaitu (1) prinsip saling memperkuat; (2) prinsip saling memerlukan; dan (3) prinsip saling menguntungkan, namun bukan pada *profit oriented*.

Unsur pemerintah daerah yang mempunyai *political power*, akan merumuskan sebuah kebijakan melalui keputusan. Sementara masyarakat atau komunitas (seperti Lembaga Keagamaan, Lembaga Adat, Lembaga Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sebagainya) disebut *social power*. Sedangkan akademisi mempunyai *knowledge power* yang dapat mengembangkan IPTEK untuk menghadirkan hidup ini lebih cepat, lebih murah, dan lebih bermanfaat. Para pebisnis yang mempunyai *entrepreneurship power* dapat bermanfaat memperkuat prinsip-prinsip kewirausahaan dalam pembangunan. Dan

terakhir, media yang memiliki *information power* sangat berperan strategis dalam penyebarluasan informasi pembangunan secara baik, transparan dan objektif kepada masyarakat.

(6) Sukses PON XX Papua

Sukses PON XX Provinsi Papua, tidak lepas dari tiga sukses, yakni sukses tuan rumah, sukses prestasi dan sukses administrasi. Sukses tuan rumah PON XX adalah kesuksesan Papua dalam penyelenggaraan PON mulai dari pembukaan, pertandingan hingga penutupan. Termasuk juga sukses dalam menyediakan sarana dan prasarana pertandingan mulai dari wisma atlet, wasit, venue PON, penyebaran informasi, dan sebagainya. Adapun untuk sukses prestasi, maka selayaknya dari seluruh pertandingan dan perlombaan yang diselenggarakan Papua mampu meraih medali sebanyak-banyaknya. Terakhir untuk sukses administrasi, hal ini terkait dengan tata kelola PON yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan pemberdayaan. Sukses lainnya yang penting juga untuk diperhatikan adalah Pasca PON, khususnya upaya mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana PON setelah setelah event dilaksanakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

(7) Pembangunan Berkelanjutan Papua

Desakan penduduk dan pembangunan yang tidak terkendali mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian, lahan terbuka, lahan gambut dan ekologi lainnya serta mengancam kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Papua. Oleh karena itu, pembangunan di Papua, baik itu di perkotaan maupun pedesaan, tidak lagi didasarkan pada pembangunan sosial ekonomi semata, akan tetapi harus berlandaskan pada pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan Papua bukan saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan, lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 lingkup kebijakan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan

lingkungan. Oleh karenanya pembangunan berkelanjutan Papua mengandung aspek-aspek keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial ekonomi; keberlanjutan komunitas, dan keberlanjutan kelembagaan.

(8) Kampung Mandiri Papua

Kampung atau Desa menurut pengertian universal, adalah sebuah aglomerasi (pengumpulan atau pemusatan) permukiman di area perdesaan (rural). Sementara untuk mandiri, pengertiannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud dengan Kampung Mandiri Papua adalah kampung yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Suatu kampung di Papua dikatakan menuju mandiri harus memperhatikan beberapa aspek yaitu : (1) mempunyai potensi sumber daya alam; (2) mempunyai potensi sumber daya manusia; (3) mempunyai potensi prasarana dan sarana yang memadai; (4) mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa; (5) mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa; (6) terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa; (7) tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata; (8) besarnya tingkat pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi; (9) banyaknya jumlah dan jenis kelembagaan, (10) adanya tokoh penggerak /inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat, dan (11) tingginya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

(9) Mandiri Pangan Papua

Kemandirian Pangan Papua adalah kemampuan Papua dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat individu dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi, dan kearifan lokal

secara bermartabat. Kemandirian pangan sudah lama menjadi cita-cita bersama namun hingga saat ini belum bisa diwujudkan. Padahal, dengan sumber daya alam yang melimpah, pada dasarnya tidak ada alasan bagi Papua untuk tidak mandiri dalam pangan. Papua memiliki semua prasyarat untuk mewujudkan kemandirian pangan dan energi. Sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh sumber daya manusia yang banyak menjadi salah satu syarat mewujudkan hal tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada pengelolaan yang baik, maka kemandirian pangan tidak akan dapat diwujudkan, dan Papua akan terus menerus menjadi daerah pengimpor bahan pangan. Oleh karena itu Kemandirian Pangan penting sekali diikuti juga dengan Kedaulatan pangan, Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan.

(10) Reformasi Birokrasi Papua

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi Papua, yaitu: (1) *Mental aparatur*: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel; (2) *Organisasi*: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran; (3) *Tata laksana*: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good

governance; (4) *Peraturan perundang-undangan*: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (5) *Sumber daya manusia aparatur*: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6) *Pengawasan*: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN; (7) *Akuntabilitas*: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan (8) *Pelayanan publik*: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Keterkaitan antara Agenda Pembangunan Daerah Papua periode 2019-2023 dengan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dapat divisualisasikan dalam Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1. Keselerasan Agenda Pembangunan Daerah Papua 2019-2023 Dengan Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024		Agenda Pembangunan Daerah Papua 2019-2023
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi;	<ul style="list-style-type: none"> • BERDAYA EKOMAS PAPUA • MANDIRI PANGAN PAPUA
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah;	<ul style="list-style-type: none"> • INFRADAS PAPUA • KAMPUNG MANDIRI PAPUA

Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024		Agenda Pembangunan Daerah Papua 2019-2023
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk;	<ul style="list-style-type: none"> • GEMAS PAPUA • KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN PAPUA • SUKSES PON XX PAPUA
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja;	<ul style="list-style-type: none"> • REFORMASI BIROKRASI PAPUA • PERLINDUNGAN DAN KEBERPIHAKAN ADAT PAPUA
5	Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	<ul style="list-style-type: none"> • INFRADAS PAPUA
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;	<ul style="list-style-type: none"> • PEMBANGUNAN KEBERLanjutan PAPUA
7	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> • REFORMASI BIROKRASI PAPUA

Sumber: RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023

Merujuk pada Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dan Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2019-2023 di atas, berikut disampaikan program-program prioritas yang menjadi acuan dalam penetapan program pembangunan di tahun 2020 dan 2021.

Tabel 5.2. Program-Program Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Periode 2019-2023

No	Misi	Agenda Pembangunan	Program Prioritas
1.	Memantapkan Kualitas & Daya Saing SDM	GEMAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan & pengembangan SMK, BLIC & Politeknik • Program peningkatan akses & kualitas pendidikan SD, SMP & SMA • Program akselerasi & afirmasi pendidikan anak berprestasi & unggul • Program pemantapan iaminan kesehatan • Program peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap wabah • Program peningkatan & pembenahan puskesmas, rumah sakit & sistem rujukan • Program pemantapan upaya kesehatan berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/ bergerak • Program pengurangan penyakit & kematian pada ibu, bayi, & balita • Program peningkatan kualitas SDM kesehatan • Program peningkatan prestasi kepemudaan
		INFRADAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penyediaan dan peningkatan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah
		SUKSES PON XX PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan prestasi kepemudaan • Program penyelenggaraan sarana & prasarana PON • Program peningkatan ekonomi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan PON
		MANDIRI PANGAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> • Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan

No	Misi	Agenda Pembangunan	Program Prioritas
2	Memantapkan Rasa Aman, Tenram & Damai Serta Kehidupan Demokrasi Memperkuat Bingkai NKRI	KESETARAAN GENDER DAN KEMITRAAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan kemitraan dalam perrbuatan/ pengambilan keputusan publik, pembangunan, dan ketertiban masyarakat
3	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	PERLINDUNGAN DAN KEBERPIHAKAN ADAT PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan dan Keberlanjutan Adat Papua
		INFRADAS PAPUA	Penguatan kebijakan pembagian dana Otsus untuk mengurangi kesenjangan, insentif jasa lingkungan, dan infrastruktur
		KAMPUNG MANDIRI PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan kelembagaan kampung
		REFORMASI BIROKRASI PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan sinergi antara pemerintah prov.& kab./kota Program penataan struktur organisasi & teknologi birokrasi untuk pelayanan publik, pengawasan, & penegakan aturan yang lebih efektif & efisien Program penguatan sistem akuntabilitas & pengawasan dalam pengelolaan keuangan & kinerja daerah
		REFORMASI BIROKRASI- INFRADAS-SUKSES PON XX PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang & pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung & daya tampung lingkungan
4	Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kuitural & Berkelanjutan	MANDIRI PANGAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan nilai tukar & daya beli petani, peternak, & nelayan Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan & menghasilkan nilai tambah komoditas
		BERDAYA EKOMAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program pembangunan & pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan Program peningkatan & pemenuhan infrastruktur pertanian, perternakan, & perikanan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah Program perbaikan tata kelola penzinan berbasis SDA dan lahan skala luas Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan & menghasilkan nilai tambah komoditas Program peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mendorong kemandirian ekonomi
		GEMAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program pembangunan dan pengembangan SMK, BLK, dan Politeknik
		PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang & pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung & daya tampung lingkungan Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup, serta revitalisasi pembangunan rendah karbon Program pengendalian banjir & abrasi pantai
		INFRADAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, dengan lingkungan yang sehat & bersih Program peningkatan akses transportasi antar moda Program peningkatan pengelolaan air baku yang mendukung produktivitas wilayah Program peningkatan ketersediaan energi murah dan energi terbarukan Program peningkatan akses informasi dan komunikasi
		PERLINDUNGAN DAN KEBERLANJUTAN ADAT PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan & infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan, terluar & tertentu
5	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Tertentu	MANDIRI PANGAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan
		KAMPUNG MANDIRI PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program penguatan Kelembagaan Kampung
		GEMAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program akselerasi & afirmasi pendidikan anak berprestasi & unggul Program perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, & difabel
		INFRADAS PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan ketersediaan perumahan layak hum, & lingkungan sehat
		PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Program peningkatan kapasitas SDM & sarana prasarana penanggulangan bencana
		KESETARAAN GENDER DAN KEMITRAAN PAPUA	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan

Sumber: RPJMD Provinsi Papua 2019-2023

5.3. ARAH PEMBANGUNAN DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

5.3.1. Arah Pembangunan Wilayah

Kebijakan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting artinya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakang. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Untuk itu sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi sektoral dan spasial. Lima KPE berbasis wilayah adat yang dimaksud adalah : (1) Wilayah adat Saireri yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen, (2) Wilayah adat Mamta yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang sungai memberamo hingga lautan pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya, (3) Wilayah adat Me Pago yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat terdiri atas Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyiai, (4) Wilayah adat La Pago yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan

Pegunungan Bintang, dan terakhir (5) Wilayah adat Anim Ha yang berada di wilayah selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digul.

5.3.2. Kerangka Pengembangan Kewilayahan

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkadilans maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua.

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Dan sebagai landasannya, berikut ini disampaikan kerangka pengembangan kewilayahan Papua.

Penjelasan masing-masing kerangka pengembangan kewilayahan di atas dapat diurai sebagai berikut :

a. Penguatan Pusat Pertumbuhan

- Peningkatan skill OAP untuk menggiatkan sektor unggulan di pusat pertumbuhan;
- Keterkaitan antar kegiatan sektor ekonomi secara berkeadilan & berkelanjutan;
- Pengembangan industri pengolah produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan;
- Penguatan pusat pertumbuhan tersebar setara.

b. Peningkatan Kesejahteraan di Kawasan Perbatasan

- Pengintegrasian PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas
- Penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan di kawasan PKSN

- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
 - Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur PLBN, PKSN, dan lokasi prioritas
 - Pelintas batas tradisional
- c. Percepatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal Melalui Peningkatan Kemandirian kampung/ perkampungan**
- Budidaya dan nilai tambah lahan komunal untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal
 - Teknologi dan organisasi produksi pertanian berbasis sumber daya lokal
 - Pengolahan hasil produksi pertanian agar bernilai tambah lebih tinggi
 - Peningkatan akses produk lokal terhadap lokal, regional, dan nasional
 - Keterampilan masyarakat lokal dalam kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan
 - Efisiensi Perdagangan lokal
- d. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar, Pendidikan, dan Kesehatan**
- Pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan terutama untuk daerah pinggiran
 - Pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di daerah pinggiran dengan insentif dan disinsentif untuk memastikan mereka dapat bekerja di wilayah tersebut
- Memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama untuk memastikan siswa dapat mengakses
 - Pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan masyarakat
 - Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk pengembangan obat-obatan tradisional
- e. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah**
- Pemerataan kesempatan ekonomi
 - Pemerataan infrastruktur dasar
 - Konsistensi penerapan penataan ruang
- f. Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan**
- Menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal, khususnya dalam pengembangan ekonomi Orang Asli Papua
 - Pemanfaatan Energi baru terbarukan
- g. Pengelolaan Urbanisasi**
- Memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan
 - Penyediaan perumahan layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan
 - Pencegahan konflik horizontal
 - Pengendalian kerusakan lingkungan

Gambar 5.1
Kerangka Pengembangan Kewilayahan Papua



Sumber: RPJMD Provinsi Papua 2019-2023



BAB VI

Penutup

6.1. KESIMPULAN

1. Peranan ekspor sangat dominan terhadap PDRB Papua selama periode Triwulan I-2023 hingga Triwulan III-2023, dimana bila dianalisis lebih jauh komoditi utama ekspor yang menjadi andalan Papua adalah dari pertambangan non migas, yang juga tampak mendominasi struktur PDRB Papua menurut lapangan usaha. Sehingga besar kecilnya ekspor pertambangan non migas sangat mempengaruhi variasi naik turunnya pertumbuhan ekonomi Papua baik itu dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Dengan memperhatikan kecenderungan harga acuan tembaga dan emas selama tahun 2023, dan pertumbuhan ekspor yang rata-rata mengalami penurunan -8,27% per triwulan, maka angka pertumbuhan nilai ekspor yang cukup moderat untuk PDRB Papua 2023 adalah 5,43% yang melambat dari tahun 2022.
2. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Papua di 3 kota IHK, pada Januari 2023, terjadi inflasi y-o-y sebesar 5,23 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,76 pada Januari 2022 menjadi 112,35 pada Januari 2023. Tingkat inflasi month-to-month sebesar -0,40 persen dan tingkat inflasi year-to-date sebesar -0,40 persen. Jika dirinci menurut 3 kota HK dan inflasi mtm, maka pada Januari 2023 di Merauke terjadi inflasi sebesar 0,41 persen, Timika terjadi inflasi -0,60 persen dan Kota Jayapura dengan inflasi sebesar -0,55 persen. Sedangkan untuk inflasi yoy, terjadi inflasi sebesar 4,41 persen di Merauke, sebesar 5,75 persen di Timika dan Kota Jayapura mengalami inflasi 5,26 persen. Secara nasional, inflasi yoy tertinggi terjadi di Kotabaru sebesar 7,78 persen dan terendah di Sorong sebesar 3,23 persen. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran dan kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yoy
3. Provinsi Papua mengalami kecenderungan peningkatan PDRB per kapita meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2022, PDRB per kapita harga berlaku mengalami peningkatan yang dapat diartikan bahwa Provinsi Papua semakin mengakselerasikan kemakmuran bagi daerahnya
4. Tahun 2011 menjadi tahun dengan rasio gini terendah di Provinsi Papua yaitu sebesar 0,274. Sementara tahun 2013 menjadi tahun dengan capaian rasio gini tertinggi yaitu sebesar 0,442. Tercatat bahwa indeks gini pada mayoritas kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2023 masih berada di bawah garis provinsi terkecuali pada Kabupaten Waropen.
5. Terdapat beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan diatas 20% diantaranya adalah Kabupaten Supiori (37,70%), Mamberamo Raya (0,73%), Waropen (30,22%), Kepulauan Yapen (26,15%), dan Biak Numfor (24,48%). Sedangkan daerah lainnya memiliki tingkat kemiskinan dibawah rata-rata Provinsi Papua, seperti Kota Jayapura (11,12%), Kabupaten Jayapura (11,94%),armi (13,76%), dan Keerom (15,77%).

6. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia pada kurun waktu 2010-2022. Hal tersebut membuat Provinsi Papua kini berstatus “sedang” dari status sebelumnya “rendah”. Kota Jayapura menjadi kota di Provinsi Papua yang memiliki IPM tertinggi pada tahun 2010-2022, sementara Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua sekaligus berada di bawah garis provinsi.
7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di provinsi Papua mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2019 sebesar 76,92 turun menjadi 72,16 ditahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 78,29 ditahun 2021. Bila dilihat menurut kabupaten/kota dengan TPAK tertinggi di tahun 2021 adalah Kabupaten Nduga sebesar 97,93 dan yang terendah adalah kabupaten Waropen sebesar 56,39. Sementara, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi Papua mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar 3,65 meningkat menjadi 4,28 ditahun 2020 dan kembali menurun menjadi 3,33 ditahun 2021. Bila dilihat menurut kabupaten/kota dengan TPT tertinggi di tahun 2021 adalah Kota Jayapura sebesar 11,67 dan yang terendah adalah kabupaten Mamberamo Tengah sebesar 0,90.
8. Pengeluaran per kapita tertinggi dari tahun 2018-2023 adalah Kota Jayapura dengan pengeluaran per kapita pada tahun 2023 mencapai 15.272 rupiah diikuti oleh Kabupaten Jayapura sebesar 10.671 rupiah dan Kabupaten Biak Numfor sebesar 10.229 rupiah. Sebaliknya, Kabupaten Mamberamo Raya menjadi kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah yaitu sebesar 5.105 rupiah pada tahun 2023.
9. Komponen pembentuk produktivitas total pada indikator PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sedangkan pada Angkatan kerja terjadi penurunan pada periode 2019-2020. Pandemi COVID-19 juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi yang berdampak kepada pengurangan tenaga kerja khususnya pada sektor swasta. Sehingga meningkatkan angka pengangguran secara keseluruhan di Provinsi Papua. Sampai dengan tahun 2021 produktivitas TK dalam perekonomian dalam perekonomian adalah sebesar Rp.76,12 Juta/TK/tahun yang tercatat menurun dari tahun sebelumnya yaitu Rp.80,64 Juta/TK/tahun.
10. Tingkat perkembangan demokrasi di Provinsi Papua pada tahun 2021 sebesar 66,39. Dengan aspek kebebasan sebesar 75,64, aspek kesetaraan sebesar 62,30 dan aspek kapasitas lembaga demokrasi sebesar 62,15.
11. Realisasi penanaman Modal Dalam Negeri sepanjang tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dimana sampai dengan tahun 2021 sebanyak 1.218 unit proyek dengan nilai investasi mencapai 911 miliar rupiah. Sementara, jumlah investor PMA di Provinsi Papua mengalami fluktuasi. Sampai dengan tahun 2021 jumlah investor PMA adalah sebanyak 95 proyek. Selain itu, realisasi investasi PMA dinilai sangat tinggi. Realisasi investasi PMA adalah sebesar 1,49 miliar US\$.
12. Rasio ketergantungan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua meningkat pada tahun 2021. Kabupaten dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura menjadi kota dengan rasio ketergantungan terendah pada tahun 2021. Rasio ketergantungan yang cenderung meningkat pada tahun 2021 di Provinsi Papua menandakan bahwa semakin banyak penduduk produktif yang harus menanggung sejumlah penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi.

6.2. REKOMENDASI

1. Setelah pemekaran wilayah, implementasi kebijakan di Provinsi Papua harus mempertimbangkan kondisi baru yang muncul, termasuk perubahan demografis, sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan-kebijakan tersebut harus disusun dengan memperhatikan konteks lokal, kebutuhan masyarakat, dan potensi wilayah tersebut untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional juga sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan pasca pemekaran wilayah.
2. Tantangan pembangunan Papua ke depan, khususnya di tahun 2024 dan 2025 tidaklah mudah, bahkan akan semakin berat. Dibutuhkan komitmen dan keseriusan semua pihak yakni, pemerintah, stakeholder, dan seluruh masyarakat Papua untuk bahu membahu mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2023-2026.
3. Untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah, maka upaya penggalian dan identifikasi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) perlu dioptimalkan, terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial antara lain melalui optimalisasi kelembagaan OPD penghasil; optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi yang memudahkan wajib pajak untuk membayar; meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kinerja BLU dan BUMD; dan meningkatkan pendayagunaan asset-aset daerah.



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
PROVINSI PAPUA, 2023**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
PROVINSI PAPUA, 2023**